

Solid dan Fokus Menjaga Pertumbuhan Berkelanjutan



Tahun 2022 masih menjadi tahun yang sangat menantang bagi PID. Masih berlanjutnya pandemi COVID-19 yang membuat kondisi ekonomi nasional masih belum juga stabil sepanjang tahun merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi Perseroan.

Namun demikian PID berkomitmen untuk terus tumbuh sehat dan berkelanjutan, meski di tengah-tengah sulitnya kondisi tersebut. PID berupaya fokus pada kekuatan di bisnis inti Perseroan dan terus meningkatkan kapasitas dan kualitas layanannya guna tercapainya target kinerja bisnis dan keuangan.

PID juga berupaya terus mengoptimalkan aset dan kemampuan yang dimiliki untuk menciptakan peluang demi terwujudnya visi dan misi Perseroan dan memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

Di tengah situasi ekonomi nasional yang masih belum kondusif tersebut, PID juga secara cerdas memanfaatkan momen ini guna berbenah diri dan memperkuat sejumlah aspek fundamental perusahaan guna menciptakan pondasi bisnis yang lebih kuat untuk ke depannya.

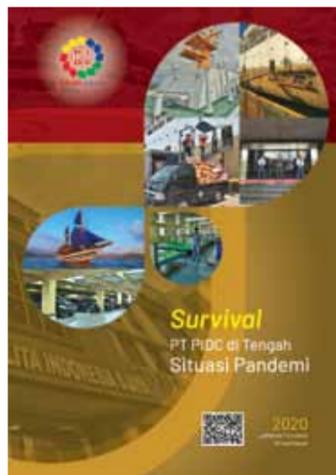
Pada akhirnya selama tahun 2022 PID mampu mempertahankan komitmennya untuk melakukan pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.



2018
PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN
UNTUK MENATAP MASA DEPAN
GEMILANG



2019
OPTIMALISASI SUMBERDAYA
UNTUK KEBERLANJUTAN



2020
SURVIVAL PT PID DI TENGAH
SITUASI PANDEMI



2021
MEMPERKOKOH KINERJA
DAN PELAYANAN UNTUK
KEBERLANJUTAN



2022
Solid dan Fokus
Menjaga
Pertumbuhan
Berkelanjutan

• Tema	1
• Kesenambungan Tema	2
• Daftar Isi	4
• Tentang Laporan Tahunan 2021	4
• Ikhtisar Kinerja Tahun 2021	6

8-47
**BAB 1
PROFIL PERUSAHAAN**

• Peristiwa Penting	10	• Sekilas Perusahaan	30
• Kilas Kinerja	12	• Arti Logo	32
• Ikhtisar Kinerja Keuangan	13	• Visi dan Misi	33
• Sambutan Komisaris	15	• Budaya Perusahaan	34
• Sambutan Direksi	19	• Nilai Perusahaan	35
• Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi	24	• Akhlak BUMN	36
• Profil Komisaris	25	• Kegiatan Perusahaan	37
• Profil Dewan Direksi	27	• Struktur Organisasi PT PID	45
• Identitas Perusahaan	28		

48-61
**BAB 2
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN**

• Tinjauan Segmen Usaha	51	• Jumlah Aset	56
• Laporan Laba (Rugi) Perusahaan per 31 Desember 2021		• Kelangsungan Usaha	59
• Pendapatan Usaha	52	• Program Kepemilikan Saham oleh karyawan dan/atau Manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)	61
• Biaya Usaha	53		
• Laba Usaha	54		

62-77
**BAB 3
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

• Komitmen pada Tanggung Jawab Sosial	64	• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Lingkungan Hidup	69
• Dasar Kebijakan Pelaksanaan CSR	65	• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	70
• Anggaran dan Realisasi Biaya Tanggung Jawab Sosial	66	• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen	74
• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Hak Asasi Manusia	67	• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembanagn Sosial Kemasyarakatan	74
• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Operasi Yang Adil	68		

78-91
**BAB 4
LAPORAN TEKNOLOGI INFORMASI**

• Tata Kelola Teknologi Informasi PT PID - <i>IT Governance</i>	82
• <i>Website Corporate</i>	84
• Aplikasi System Keuangan SAP	86
• Teknis Tata Kelola Surat Elektronik (<i>E-Mail</i>)	88
• Inovasi Teknologi Informasi Selama 2021	90
• Rencana Pengembangan Teknologi Informasi 2021	90

92-101
**BAB 5
LAPORAN SUMBER DAYA MANUSIA**

• Komposisi SDM	94
• <i>Roadmap</i> Pengembangan SDM	95
• Pengembangan SDM	97
• <i>Turn Over</i>	98
• Sistem Manajemen Kinerja	98
• Tujuan Pelatihan	99
• Kesempatan Keselamatan Kerja	99
• Reward and Punishment	99

102-121
**BAB 6
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

• Dasar dan Penerapan GCG	104
• Pelaksanaan GCG	104
• Rapat Umum Pemegang Saham	107
• Dewan Komisaris	108
• Direksi	109
• Sekretaris Dewan Komisaris	111
• Sekretaris Perusahaan	112
• Profil Sekretaris Perusahaan	112
• Sistem Pengendalian Internal (SPI)	116
• Profil SPI	116
• Manajemen Risiko	117
• Perkara Hukum	118
• Rencana Pengembanagn GCG Tahun 2021	120

122
**BAB 7
LAPORAN KEUANGAN**



Selamat Datang di Laporan Tahunan Tahunan PT Pelita Indonesia Djaya (selanjutnya disingkat PID) tahun 2022. Laporan ini merupakan komitmen kami untuk terus berupaya menyajikan informasi kinerja. Kami berharap Laporan Tahunan ini dapat memberikan kemudahan membaca informasi tentang Kinerja PID tahun 2022 dan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Isi Laporan

Penyusunan Laporan Tahunan ini berdasarkan aspek-aspek yang materialitas dan penting sebagai isi laporan, yang mencakup Profil Perusahaan, Laporan Manajemen, Tata Kelola Perusahaan, Analisis dan Pembahasan Manajemen, Laporan Keuangan berstandarisasi PSAK, serta informasi lain yang dapat mempengaruhi Pengambilan Keputusan pemangku kepentingan.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai pernyataan prospektif dalam laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perusahaan.

Referensi dan standar yang digunakan dalam penyusunan laporan Tahunan PID menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia, tempat dimana Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam rangka menjalankan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*, penyampaian laporan ini juga mengacu pada pedoman praktik tata kelola yang berlaku di lingkup nasional.

Periode Laporan

Laporan Tahunan ini merupakan dokumentasi kinerja PID selama satu tahun pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2022.

“

Selama tahun 2022, di tengah situasi ekonomi Global dan Nasional yang masih belum kondusif, PID ternyata sanggup menunjukkan ketahanannya. Perseroan tetap mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan mencatatkan realisasi Pendapatan Usaha Bersih sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp457.529 juta atau naik 35,77% dari Pendapatan Usaha Bersih tahun 2021 sebesar Rp336.999 juta.



PENDAPATAN USAHA

Rp457.529 juta

(98,54% dari Target)

Laba tahun berjalan tahun 2022 sebesar
Rp25.930 Juta atau 120,51%

LABA TAHUN BERJALAN

Rp25,930 juta

(120,51% dari Target)

TOTAL ASET

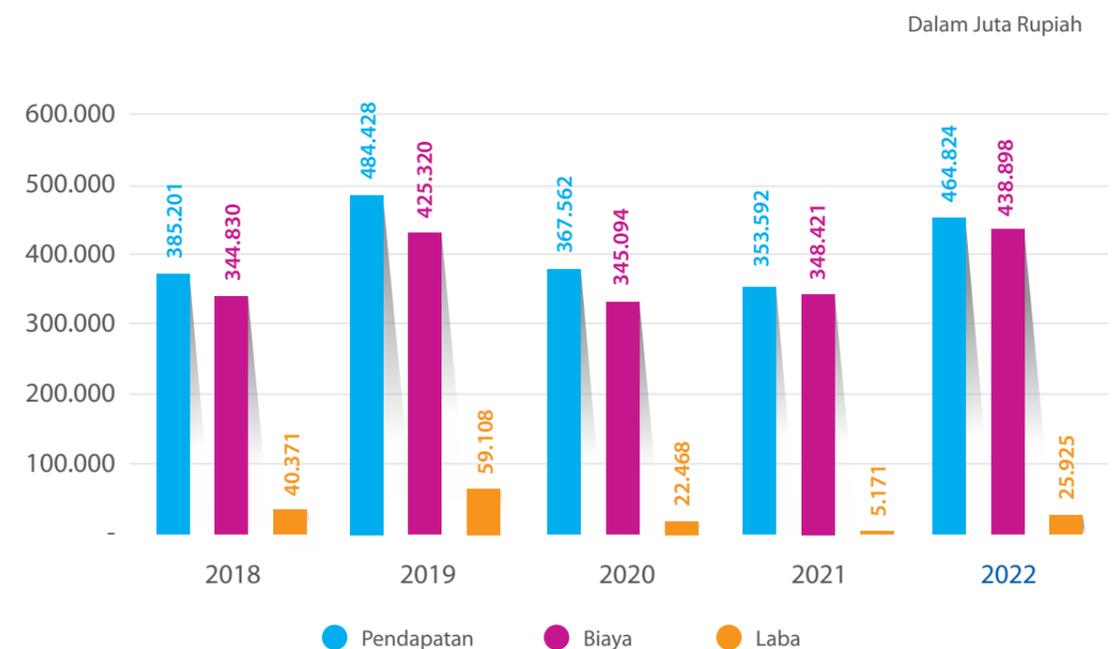
Rp333,651 juta

(107,88% dari Target)

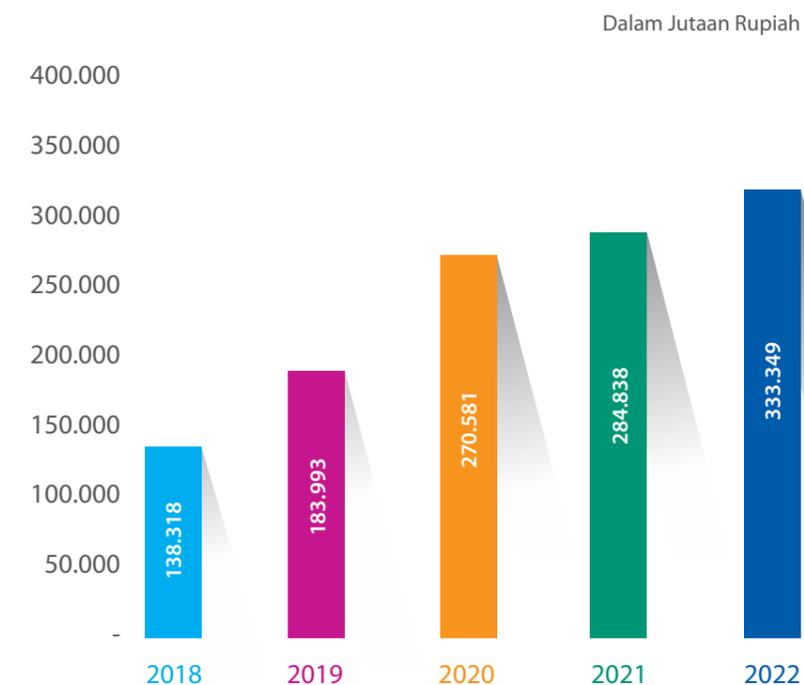
IKHTISAR KINERJA TAHUN 2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
LAPORAN LABA (RUGI) KONSOLIDASIAN (dalam satuan Juta Rupiah)					
Pendapatan Usaha	384,661	485,848	368,211	337,000	457,529
Biaya Usaha	(304,504)	(368,406)	(295,857)	(302,610)	(379,658)
Laba Kotor	80,157	117,441	72,354	34,390	77,871
Beban Administrasi dan Umum	(26,437)	(36,413)	(41,527)	(45,759)	(51,143)
Laba Usaha	53,720	81,028	30,827	(11,370)	26,728
Pendapatan (Beban) Non Usaha Bersih	242	(1,686)	(733)	16,593	6,898
Laba Sebelum Pajak	53,962	79,343	30,093	5,223	33,626
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Pajak Kini	(13,930)	(20,487)	(7,754)	(58)	(8,092)
Pajak Tangguhan	298	266	85	-	397
Laba Tahun Berjalan	40,329	59,122	22,424	5,166	25,930
Penghasilan Komprehensif Lain	(53)	769	(29)	-	-
Jumlah Laba Komprehensif	40,382	58,353	22,454	5,166	25,930
Hak Minoritas	(11)	(14)	44	6	5
Laba Rugi Konsolidasian	40,317	59,108	22,468	5,171	25,925
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam satuan Juta Rupiah)					
Aset Lancar	125,140	156,914	227,267	220,401	255,944
Aset Tidak lancar	13,178	27,079	43,314	47,395	77,405
TOTAL ASET	138,318	183,993	270,581	267,796	333,349
Liabilitas Jangka Pendek	50,941	54,409	97,133	114,358	134,395
Liabilitas Jangka Panjang	9,353	11,347	33,594	11,621	12,160
Total Liabilitas	60,294	65,755	130,726	125,978	146,555
Modal Kerja	77,931	181,133	139,586	158,733	186,794
Kepentingan Non Pengendali	94	105	269	127	132
Total Ekuitas	78,024	118,238	139,855	158,860	186,926
Total Liabilitas Dan Ekuitas	138,318	183,993	270,581	284,838	333,349
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN					
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	11,233	24,396	35,371	(5,026)	2,814
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(5,391)	(17,518)	(18,955)	(14,669)	(8,458)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	1,332	(1,435)	(2,627)	(4,671)	(5,477)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	7,175	5,442	13,789	(24,367)	(11,120)
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	14,604	21,779	27,221	41,067	33,950
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	21,779	27,221	41,009	16,700	22,829
RASIO KEUANGAN					
Gross Profit Margin	19,99%	20,84%	23,68%	19,62%	16,68%
Operating Profit Margin	14,43%	14,09%	16,40%	1,53%	5,67%
Net Profit Margin	10,73%	10,48%	12,17%	6,09%	5,67%
EBITDA Margin	14,47%	13,27%	16,83%	8,83%	7,10%
Net Return On Investment	24,41%	21,92%	31,90%	12,25%	9,75%
Net Return On Equity	32,82%	34,11%	67,16%	17,94%	20,74%
Debt to Equity Ratio	43,29%	55,61%	83,54%	76,84%	78,46%
Debt to Total Asset	43,59%	35,74%	45,52%	43,45%	43,96%
Current Ratio	245,66%	271,37%	266,77%	228,02%	192,51%
Total Asset Turn Over	227,43%	209,06%	179,99%	139,04%	140,10%

Perkembangan Pendapatan, Biaya dan Laba Konsolidasi Perusahaan



Perkembangan Aset Perusahaan





SOLID DAN FOKUS MENJAGA PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN



PROFIL PERUSAHAAN

PT PID adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mendukung perusahaan induk yaitu PT PELNI (Persero) dengan branding nama PELNI Services untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa (PT PELNI dan lainnya) dalam pelaksanaannya berdasarkan berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu.

PERISTIWA PENTING 2022



Intimate Moments Direksi & Dekom PT. PID (Pergantian Komisaris dan Direktur Utama PT. PID)



25 April 2022
Santunan Panti Asuhan Cahaya Rabbani.



Kegiatan Coklit PT. PID - PT. PELNI
(Bersama Dir. PAP PT. PELNI).

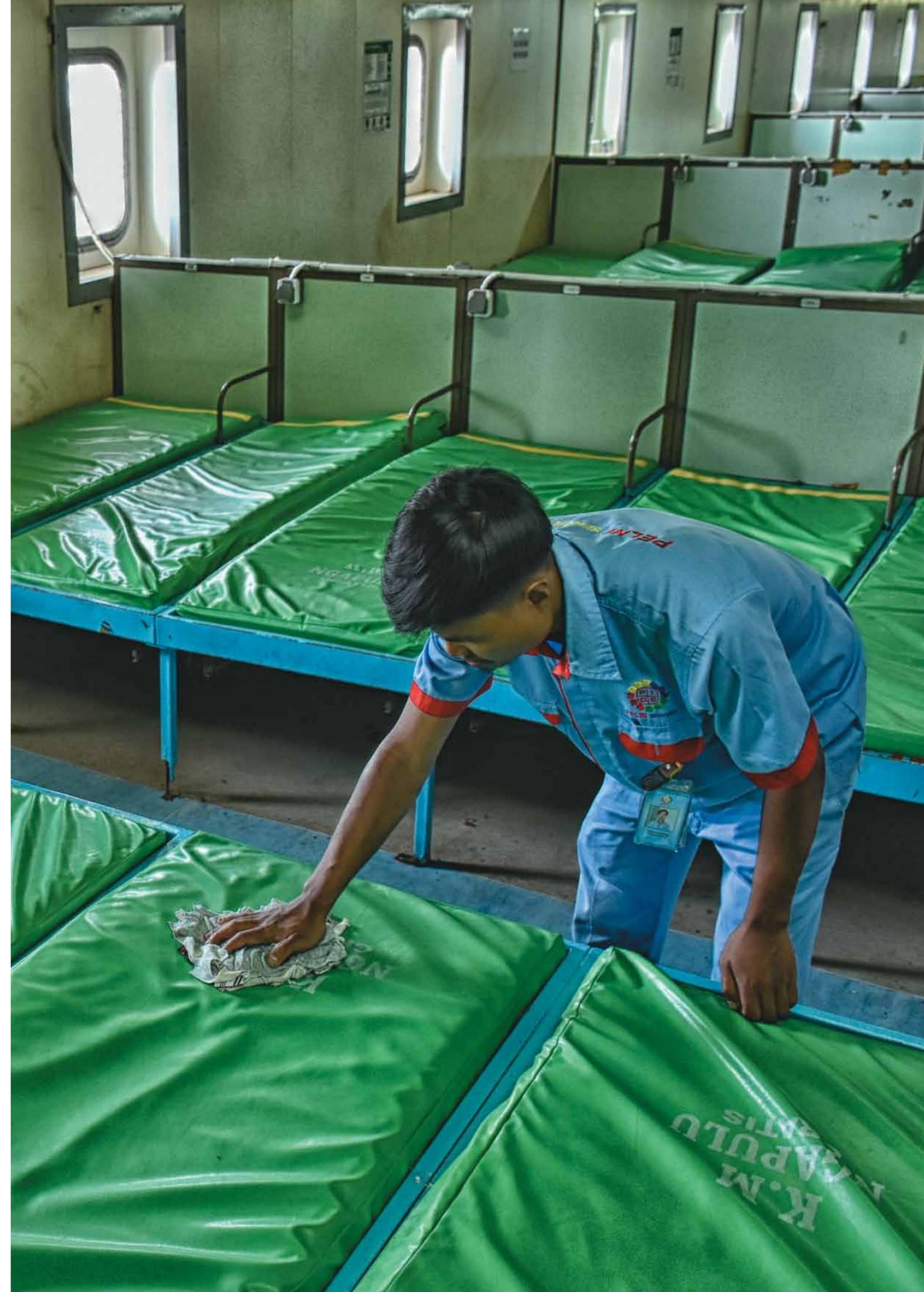


17 Agustus 2022
Perayaan HUT RI yang ke 77
Tahun.

KILAS KINERJA

Keunggulan PT PID:

- Revitalisasi layanan jasa yang menaikkan *customer value* (kecepatan, ketepatan, keefisienan, keandalan);
- Percepatan akuisisi pasar melalui keunggulan kompetitif;
- Optimalisasi jaringan bisnis untuk meningkatkan *coverage area* pelayanan dan sekaligus mengimbangi ekspansi pesaing;
- *Equal treatment* dalam menyusun *service level* dengan para *vendor* bisnis;
- Membangun sistem operasi berbasis proses bisnis yang efisien;
- Penguatan tim pelayanan;
- *Brand building* dan *repositioning* ke layanan jasa pelayanan;
- Menguasai *captive market*;
- Memiliki *customer based* dilingkup industrinya.



SAMBUTAN KOMISARIS



ROBERT MP SINAGA
Komisaris

“

“ PT PID Sukses Melewati Tahun 2022 dengan Pencapaian Kinerja yang Cukup Baik”

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan atas pengelolaan perusahaan selama tahun 2022.

Dewan Komisaris menyadari bahwa semakin besar dan kompleks perusahaan maka tugas pengawasan yang harus dilakukan Dewan Komisaris akan semakin berat. Namun demikian, berkat dukungan dari semua pihak dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab kami selaku Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik selama tahun 2022.

Penilaian atas kinerja Direksi Mengenai pengelolaan Perusahaan

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi dan seluruh jajaran perusahaan selama tahun 2022 telah bekerja sesuai dengan arahan strategi Perusahaan. PT PID selama tahun 2022 tetap mampu menunjukkan kinerja bisnis yang tergolong cukup baik. Dengan pencapaian kinerja tersebut Dewan komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi yang telah berusaha secara maksimal.

Kami mengapresiasi atas pencapaian-pencapaian yang diraih PT PID selama tahun 2022. Seluruh pencapaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh tim manajemen, Direksi beserta jajaran karyawan PT PID.

Makro ekonomi global tidak kondusif

Kondisi makro ekonomi global memang relatif belum stabil sepanjang tahun 2022, dengan kenaikan suku bunga acuan bank sentral di banyak negara di seluruh dunia, yang disertai dengan perlambatan aktivitas ekonomi, serta koreksi pada pasar komoditas.

Tekanan inflasi global pada 2022 juga meningkat tinggi. Ketidakseimbangan pemulihan sisi permintaan dan penawaran mendorong kenaikan harga-harga.

Hal ini turut disebabkan oleh gangguan mata rantai pasokan global serta pasar tenaga kerja yang menguat di sejumlah negara maju.

Perang antara Rusia dan Ukraina juga memicu gangguan suplai, sehingga mendorong kenaikan tinggi harga energi dan pangan global. Kebijakan moneter yang ketat ditempuh di banyak negara maju dan berkembang untuk merespon tekanan inflasi.

Kondisi ekonomi global tersebut juga turut berimbas pada perekonomian di Indonesia, meskipun secara umum kondisi perekonomian di tanah air sebenarnya sudah mulai membaik dibanding tahun sebelumnya.

Kinerja bisnis cukup baik

Meskipun kondisi iklim bisnis di tanah air masih kurang kondusif selama tahun 2022, Dewan Komisaris mengapresiasi PT PID masih tetap mampu menunjukkan kinerja bisnis yang cukup baik dan Perseroan mampu tetap fokus melanjutkan pertumbuhan berkelanjutan.

Sebagian besar indikator kinerja Perseroan mengalami peningkatan, dengan beberapa indikator mampu melampaui target yang telah ditetapkan meskipun dalam kondisi ekonomi di tanah air yang belum sepenuhnya pulih.

Dewan Komisaris melihat pencapaian bisnis pada tahun 2022 sejalan dengan ekspektasi dan tantangan yang dihadapi. Seperti Pendapatan Usaha yang meningkat 35,77% menjadi Rp457.000 juta dari Pendapatan Usaha di tahun 2021 yang masih Rp337.000 juta. Kemudian, Laba Bersih Konsolidasi Setelah Pajak tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp25.925 juta, yang meningkat 502,42% dibandingkan realisasi Laba Bersih Konsolidasi Setelah Pajak tahun 2021 yang masih sebesar Rp5.160 juta.

Konsisten Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu fokus utama didalam pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Kami senantiasa mendorong Direksi agar terus menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan bisnis.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut antara lain kami dukung dengan pengawasan secara melekat dari Dewan Komisaris yang secara rutin memberikan masukan/arahan, guna mendukung pengoptimalan kinerja bisnis dari Perseroan, meskipun di saat situasi ekonomi di tanah air yang masih kurang kondusif selama tahun 2022.

Komitmen PT PID untuk terus tumbuh berkelanjutan telah mendorong kami untuk senantiasa berbenah diri terutama dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik mengacu pada standar praktek terbaik. Pelaksanaan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku menjadi pilihan strategi yang tepat dengan melibatkan seluruh pegawai di setiap tingkatan organisasi.

Semangat yang terkandung dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah niat dan tekad manajemen untuk menjadikan PT PID sebuah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2022 telah dilakukan berbagai inisiatif implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pihak independen dalam mencapai tata kelola perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable governance*).

Secara keseluruhan Dewan Komisaris menilai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT PID selama tahun 2022 sudah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris mengapresiasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perseroan yang telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Concern meningkatkan kompetensi SDM

Kami dari Dewan Pengawas juga *concern* terhadap pentingnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) PT PID. Karena pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia menjadi strategi penting bagi Perseroan untuk tetap tumbuh berkelanjutan.

Memiliki SDM yang kompeten dan berintegritas sudah menjadi suatu keharusan, mengingat tantangan yang dihadapi di dalam bisnis semakin sulit sehingga membutuhkan SDM yang unggul. Untuk itu, kami

mendukung upaya Direksi dan jajarannya untuk menerapkan berbagai rencana strategis dalam rangka pengembangan SDM yang efektif.

Kami mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Direksi dan jajaran di dalam memperkuat SDM Perseroan selama tahun 2022 dengan program-program peningkatan dan pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dan sasaran Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perlu terus ditingkatkan

Dalam laporan ini, kami Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT PID.

Kami menilai selama tahun 2022 PT PID konsisten melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang membantu lingkungan di sekitar Perseroan.

Perusahaan berkomitmen untuk dapat memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat dan mengurangi dampak negatif bagi lingkungan hidup dalam setiap aktivitas operasionalnya.

Apresiasi Kepada Seluruh Pemangku Kepentingan

Mewakili Dewan Komisaris, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemegang saham dan pemangku kepentingan kepada PT PID.

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Direksi atas kepemimpinan dengan wawasan yang luas, serta kepada manajemen dan seluruh pegawai yang telah bekerja dengan penuh kesungguhan.

Dewan Komisaris yakin kinerja baik yang tercapai pada tahun 2022 akan mewujudkan visi dan misi PID serta memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, September 2023
Atas Nama Dewan Komisaris

ROBERT MP SINAGA
Komisaris

PROFIL KOMISARIS



ROBERT MP SINAGA

Komisaris

Pria kelahiran Medan, 29 Desember 1967 ini mengenyam pendidikan terakhirnya di Pasca Sarjana (S2) Manajemen Logistik dan Teknik Transportasi University of Lille (1998). Untuk pendidikan S1-nya, Robert adalah lulusan Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1992).

Robert semenjak Januari 2021 menjabat sebagai Direktur Armada dan Teknik PT PELNI (Persero). Sebelumnya di tahun 2018, beliau adalah Direktur Utama PT. Prima Multi Terminal. Pada tahun 2017 Robert menjabat *President Director Project Organisation* Pengembangan Kuala Tanjung. Di tahun 2016 beliau menempati jabatan Komisaris PT. Prima Husada Cipta Medan. Semenjak tahun 2022 Robert dipercaya menjadi Komisaris PT PID.





SAMBUTAN DIREKSI

**“Di saat ekonomi sulit
PT PID Tetap Mampu
Mewujudkan Pertumbuhan
Berkelanjutan”**

SUKENDRA
Direktur Utama

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pertama-tama kami memanjatkan puji serta syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena PT PID telah berhasil melalui tahun 2022 yang penuh tantangan ini dengan baik.

Di sepanjang tahun 2022 PT PID mampu survive dengan kinerja bisnis yang relatif cukup baik dan tingkat kesehatan Perusahaan juga masih terjaga bagus.

Sebuah hasil pencapaian yang realistis, mengingat pada tahun 2022 PT PID kembali harus menghadapi iklim bisnis/usaha di tanah air yang masih belum juga kondusif, karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan juga terjadinya krisis perlambatan ekonomi global yang turut berdampak ke tanah air.

Situasi makro ekonomi global belum kondusif

Tahun 2022 dalam konteks makro ekonomi global memang masih menjadi tahun yang menantang, terutama akibat perebutan dominasi politik, pertahanan dan ekonomi, serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif, sehingga menyebabkan perekonomian Dunia melambat.

International Monetary Fund (IMF) melaporkan ekonomi dunia tumbuh 3,2% pada tahun 2022 dalam laporan *World Economic Outlook* bulan Januari 2023. IMF memprediksi ekonomi global pada tahun 2023 mencapai sekitar 3,4%.

Sedangkan, kenaikan suku bunga acuan bank sentral untuk merespon tekanan inflasi akibat perang Rusia-Ukraina terus membebani aktivitas ekonomi global.

Kondisi perekonomian global tahun 2022 memang masih dibayangi oleh pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung, namun akselerasi vaksinasi menjadi salah satu faktor yang mendorong perbaikan pada kondisi ekonomi.

Berdasarkan laporan *International Monetary Fund (IMF)* dalam *World Economic Outlook* yang dikeluarkan pada bulan Januari 2023, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 diestimasikan berada di angka 3,40% yoy dan akan mengalami trend penurunan hingga menjadi 2,90% yoy di tahun 2023.

Sementara itu, inflasi mengalami kenaikan, bahkan lebih tinggi dari beberapa dekade lalu, yang dipicu oleh minimnya suplai barang untuk mencukupi peningkatan permintaan, terlebih di tengah konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan.

Disrupsi yang ditimbulkan atas konflik Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap kestabilan pasokan energi dan suplai bahan makanan secara global.

Dengan inflasi yang cenderung tinggi dan pertumbuhan ekonomi cenderung turun, memberikan sinyal, bahwa situasi ekonomi dunia sedang tertekan. Aktivitas ekonomi global yang masih terus melemah, sehingga menimbulkan resesi ekonomi di hampir semua negara di dunia.

Situasi dan kondisi perekonomian global yang tidak kondusif seperti terurai di atas tentu saja berpengaruh terhadap perekonomian di tanah air.

PT PID mampu mengatasi tantangan disaat kondisi perekonomian sulit

Pada realitanya hampir semua sektor ekonomi di tanah air mengalami situasi yang kurang kondusif selama tahun 2022.

Sama seperti entitas bisnis lainnya, PT PID juga ikut terdampak dari kondisi memburuknya situasi ekonomi nasional seperti tersebut di atas.

Namun demikian, meski menghadapi situasi iklim bisnis yang sulit, PT PID ternyata tetap mampu menghasilkan kinerja bisnis yang relatif cukup baik di sepanjang tahun 2022.

Portofolio bisnis Perseroan secara umum di tahun 2022 tetap mampu bertumbuh dengan cukup baik, meskipun untuk beberapa segmen tidak berhasil melampaui target anggaran yang ditetapkan dalam RKAP. Meskipun begitu, pada beberapa segmen kinerja lainnya, PID tetap mampu mencatatkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya 2021.

Kata kuncinya, didalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan di atas, kami terus berupaya memanfaatkan setiap peluang untuk mencapai target bisnis, dan kami juga terus merespon setiap perubahan yang terjadi dengan melakukan penyesuaian secara cepat dan efisien.

Pada tahun 2022, secara konsisten kami juga terus menerapkan berbagai inisiatif terkait efisiensi, penyederhanaan proses kerja, optimalisasi biaya operasional, prioritas belanja modal dan lain sebagainya. Hasilnya, pertumbuhan biaya operasional dapat ditekan dengan cukup signifikan.

Di samping berfokus pada pertumbuhan usaha, kami juga tetap solid mengedepankan penerapan pertumbuhan keberlanjutan didalam menjalankan bisnis/usaha Perseroan.

Kinerja bisnis bertumbuh relatif cukup baik

Dengan manajemen melakukan berbagai strategi dan upaya untuk menghasilkan kinerja bisnis yang optimal, kami dapat melaporkan, meskipun dalam situasi ekonomi yang sulit, PT PID selama tahun 2022 tercatat meraih Pendapatan Usaha sebesar Rp457.529 juta, atau mencapai 98,54% dari anggaran dan tercapai 135,77% dari Pendapatan Usaha Bersih tahun 2021 sebesar Rp336.999 juta."

Sementara itu, Laba usaha tahun 2022 terealisasi sebesar Rp77.871 juta atau 99,59% dari anggaran sebesar Rp78.193 juta, dan tercapai 226,44% dibandingkan dengan laba usaha tahun 2021 sebesar Rp34.390 juta.

Sedangkan dari sisi Aset, PT PID mencatat Total Aset di tahun 2022 adalah sebesar Rp333.651 juta atau 107,88% dari anggaran sebesar Rp309.287 juta dan apabila dibandingkan dengan Jumlah Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp284.838 juta, maka *trendnya* tercapai sebesar 117,14%.

Kami juga melaporkan bahwa Tingkat Kesehatan Entitas yang dinilai berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 yang meliputi Aspek Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Administrasi. Sesuai Laporan Kantor Akuntan Publik "Djoko Sidik & Indra" Nomor: 00013/2.0999/NASSLEK/05/0139-2/1/II/2023, tanggal 28 Februari 2023 mencatat dengan kriteria SEHAT kategori AA dengan nilai skor 92.00.

Sementara Capaian kinerja Entitas berbasis *Key Performance Indicator (KPI)* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai Laporan Kantor Akuntan Publik "Djoko Sidik & Indra" 00014/2.0999/NASS-KPI/05/0139-2/1/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, Capaian Nilai Skor 100,77 Nilai Maksimal Skor 100,00.

Komitmen menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kami juga menjabarkan tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT PID selama tahun 2022.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik memang menjadi salah satu elemen penting bagi keberhasilan Perseroan di dalam menjalankan kegiatan bisnis/usahanya.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi arahan sekaligus panduan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Perseroan. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dasar yang harus dimiliki adalah komitmen. Hal ini menjadi hal yang mutlak bagi Perseroan sebelum memulai pembangunan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Untuk itulah, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris memastikan bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dimulai dari top level management sampai dengan ke semua level di Perseroan.

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, selama tahun 2022 PID melakukan kampanye Program Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Sistem

Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik agar menjadi bagian dari kultur PID. Selain itu, sosialisasi dan internalisasi *Code of Conduct* terus menerus dilakukan, tidak saja kepada internal PID, namun juga kepada stakeholders lainnya.

Kami meyakini, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan optimal di Perseroan selama tahun 2022, mempunyai andil besar terhadap keberhasilan PT PID mampu meraih kinerja bisnis yang cukup baik di saat kondisi perenoman di tanah air masih dalam situasi sulit.

Concern meningkatkan kompetensi SDM

Kami juga melaporkan dari sisi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) PT PID selama tahun 2022. Meskipun masih dalam situasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, kami terus berupaya meningkatkan pembinaan SDM, yang kami lakukan secara kontinyu, guna terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme segenap insan SDM perusahaan.

PID menyadari bahwa keberhasilan Perseroan untuk menghadapi seluruh tantangan usaha bergantung pada kualitas dan kapasitas SDM yang dimiliki.

Upaya untuk memiliki SDM yang berkualitas dan profesional dilakukan oleh Manajemen PID melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara in house maupun bekerjasama dengan lembaga lain. Sehingga diharapkan PID mampu memiliki keunggulan bersaing. Bentuk pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain meliputi program pendidikan karir, pendidikan profesi, ketrampilan, serta berbagai kursus, latihan, penataran, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Kami senantiasa melakukan pengelolaan dan pengembangan SDM yang terintegrasi dengan visi, misi serta strategi Perseroan, dan berupaya untuk terus melakukan peningkatan kualitas pengelolaan SDM, agar dapat mendukung perkembangan dan kemajuan bisnis Perseroan.

Di tahun 2022 kami juga *concern* secara bertahap untuk terus memperbaiki sistem Teknologi Informasi (TI) di

Perseroan. Pentingnya pengembangan TI tersebut, agar Perseroan tetap dapat selalu optimal didalam pengelolaan manajemen bisnisnya, dan selalu *up date* terhadap perkembangan teknologi yang dibutuhkan oleh industri di era digital ini.

Kami juga melaporkan, bahwa PT PID di tahun 2022 tetap berkomitmen dan berkontribusi kuat dalam program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Selama tahun 2022, kami melakukan beberapa kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan Perseroan haruslah dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hubungan timbal balik yang harmonis dan saling menguntungkan antara Perseroan dan masyarakat merupakan salah satu faktor penentu keberlanjutan (*sustainability*) PID.

Apresiasi

Kami menyadari, keberhasilan Perseroan merupakan hasil dari proses *teamwork* yang solid, bukan saja dari team Manajemen, namun juga dari seluruh insan Perseroan yang telah memberikan kontribusi optimal demi keberlangsungan Perseroan.

Untuk dapat tumbuh berkelanjutan di masa mendatang, kami membutuhkan dukungan team Manajemen dan jajaran pegawai yang *excellent*, memiliki karakter, integritas, nilai budaya, profesionalisme, pengalaman, dan kematangan yang diperlukan untuk dapat mengemban tugas dan wewenang dalam menjalankan bisnis.

Berbagai pencapaian yang telah kami lalui di tahun 2022, merupakan hal yang luar biasa. Atas nama Manajemen, kami ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kontribusi yang optimal.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan dukungan penuh. Kami bersama pegawai yang bekerja dengan



semangat kebersamaan menyampaikan terimakasih yang tulus kepada seluruh konsumen dan Pemegang Saham serta regulator atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Perseroan selama ini.

Kami akan terus menyalakan semangat kebersamaan untuk senantiasa menghadirkan layanan terbaik dan tangguh yang bisa Anda banggakan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 22 September 2023
Atas Nama Direksi

SUKENDRA
Direktur Utama



DEWAN DIREKSI



1. SUKENDRA
Direktur Utama

2. SUPARNO
Direktur Keuangan

3. DR. ROOSHARDIANTI
Direktur Operasi

2

3

1

PROFIL DEWAN DIREKSI


SUKENDRA

Direktur Utama

Pria kelahiran Cilacap, 19 Maret 1967 ini memiliki pendidikan terakhir di Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Labora tahun 2000. Bergabung di PT PELNI (Persero) sejak tahun 1996 sebagai Mualim kapal PELNI, karirnya terus meningkat, di tahun 2014 beliau menempati posisi Senior Manager Aset PT PELNI (Persero). Di tahun 2015 Sukendra menjadi Direktur Operasi PT SBL. Tahun 2016 menjabat Senior Manager Pengembangan Usaha dan Logistik PT SBN. Kemudian di tahun 2017 diangkat menjadi VP Pemasaran Angkutan Penumpang PT PELNI (Persero). Semenjak tahun 2022 Sukendra dipercaya menjadi Direktur Utama PT PID.


DR. ROOSHARDIANTI S

Direktur Operasional

Kelahiran Jakarta, 23 Januari 1976. Menyelesaikan Pendidikan S1 Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia tahun 2000, dan Pendidikan terakhir S2 *Master Of Business Administration* di James Cook University Australia di Singapore lulus tahun 2010.

Bergabung di PT PELNI sejak tahun 2002 sebagai dokter umum yang ditempatkan di Rumah Sakit PELNI. Di tahun 2008 beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan dan Pemasaran di tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan dan Pemasaran. Di tahun 2013 beliau mengawali karirnya sebagai Direksi PT Rumah Sakit PELNI dengan menjabat sebagai Direktur Usaha dan kemudian di tahun 2016 menjabat sebagai Direktur Operasional dan kemudian di tahun 2019 beliau merangkap sebagai Direktur Medis dan Digitalisasi Layanan disamping tugasnya sebagai Direktur Operasional. Di tahun 2021 kini menjabat sebagai Direktur Operasional di PT PID.


SUPARNO

Direktur Keuangan

Kelahiran Jakarta, 4 Desember 1974, Suparno menyelesaikan Pendidikan S1 UPN Veteran tahun 2009 dan mengenyam pendidikan terakhir S2 di ST-PPM Jakarta tahun 2014. Bergabung di PT PELNI (Persero) sejak tahun 2001 sebagai *officer* di Unit Tanjung Priok. Karirnya terus menanjak di PT PELNI (Persero). Setelah menempati berbagai posisi jabatan pada tahun 2018 beliau dipercaya menjabat sebagai *Vice President Treasury* PT PELNI (Persero). Semenjak tahun 2022, Suparno diangkat menjadi Direktur Keuangan PT PID.

**PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022
PT PELITA INDONESIA DJAYA (PT PID)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, September 2022

Dewan Komisaris



ROBERT MP SINAGA
Komisaris

Dewan Direksi



SUKENDRA
Direktur Utama



IDENTITAS PERUSAHAAN



Nama Perusahaan : PT PELITA INDONESIA DJAYA
 Nama Sebutan : PT PID
 Kantor Pusat : Jl. Let-Jen Soeprapto Komplek Ruko Cempaka Mas Blok Q no 5, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
 Telepon : 021 42883740
 Surat Elektronik : www.PID.co.id
 e-mail : corporate@PID.co.id
 Tanggal Berdiri : 29 September 1969
 Tanggal Beroperasi : 29 September 1969
 Dasar Hukum : Akta Notaris No. 53 tanggal 29 September 1969 Notaris Djojo Muljadi, SH yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tanggal 10 Pebruari 1970 dirubah Akta Notaris No. 05 tanggal 13 Desember 2019 Notaris Ida Adiningsih, SH. Di Jakarta dan surat pengesahan dari KEMENKUMHAM RI Nomor: AHU-000242605.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1984 tertanggal 9 Juli 1984, menjadi Anak Perusahaan PT PELNI (Persero).

Modal Dasar : Rp2.010.000.000,-
 Modal Disetor : Rp2.010.000.000,-
 Pemegang Saham : 1. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) - 99,50%
 2. Yayasan Kesehatan Pesiunan PT PELNI (YKPP) - 0,50%
 NPWP : 01.307.708.6-093.000
 TDP : 246/24.3PT.7/31.71/-1.824.27/e/2018 Tanggal 24 Juli 2018
 SIUP : 264/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2018 Tanggal 25 Juli 2018
 Jumlah Pegawai : 1.511 orang per 31 Desember 2021
 Kegiatan Usaha : a. Usaha Jasa: Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*), Jasa Pengawasan dan Pengamanan, *House Keeping*, Jasa Hiburan Band, Jasa Pengelolaan Janitor, *Jasa Manage Services*.
 b. Usaha Komersial: Pengelolaan Bahan Makanan, *Supplement food*, Air mineral & *Mealbox*, Kendaraan disewakan & Pinisi.
 c. Usaha Jasa *Maintenance & IT*: Siskomkap, PELNI TV, BTS Multioperator, *Maintenance AHU, AC & Chiler Kapal*, Renovasi dan *Running Repair Kamar mandi, Vending Machine*.
 d. Usaha Jasa Lainnya: *Driver Service & Pengadaan Cover Kasur*.

SEKILAS PERUSAHAAN



Dalam rangka menyehatkan Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI), atas persetujuan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 4 April 1969 nomor: M.8/4/25 Phb, didirikanlah "Usaha Sampingan" dengan akta pendirian tertanggal 29 September 1969 nomor: 53 yang diperbaiki dengan akta tanggal 24 Nopember 1969 nomor 46 oleh Notaris Djojo Muljadi, S.H. yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tanggal 10 Februari 1970 yang bernama "PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION" (disingkat PT PIDC) dengan kegiatan usahanya:

- Perdagangan Impor dan Ekspor, antar pulau/daerah dan lokal;
- Usaha-usaha dibidang perindustrian, Pertambangan, pengangkutan, pertanian, Perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat/laut, perwismaan;
- Usaha-usaha yang berhubungan dengan rumah pendingin (cold storage);
- Pengusahaan galangan pembuatan dan reparasi kapal.

Pendirian Perusahaan PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION yang modal dasarnya dipisahkan dari kekayaan Negara yang tertanam dalam P.N. PELNI, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan

(Persero) maka PT. PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION menjadi Perusahaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari pendirian PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION menjadi perusahaan milik Negara, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 1970 tertanggal 23 September 1970 dimana ditetapkan pemisahan sebagian dari kekayaan Negara Republik Indonesia yang tertanam dalam Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia (PN.PELNI) untuk dipergunakan sebagai penyertaan Negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perseroan Terbatas PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION (PT PIDC).

Berdasarkan penelitian ternyata Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang dikehendaki, untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 tahun 1984 tertanggal 9 Juli 1984 dimana ditetapkan pengalihan pemilikan dan penguasaan modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, sehingga seluruh modal Negara Republik Indonesia dalam bentuk saham pada Perseroan

Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) dialihkan kepemilikan dan penguasaannya kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dan selanjutnya PT. PIDC dijadikan anak perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI).

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1984 tertanggal 9 Juli 1984, dimana ditetapkan Kekayaan Negara yang tertanam pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) untuk dipisahkan dan dijadikan penyertaan modal PT PELNI pada PT Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) sesuai Surat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S- 88/MK.013/1991 tertanggal 23 Januari 1991 sebesar:

Modal Dasar/Disetor	: Rp2.000.000.000,00
Cadangan	: Rp233.930.877,46
Jumlah	: Rp2.233.930.877,46

Perubahan kekayaan Negara yang tertanam pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. PELNI) untuk dipisahkan dan dijadikan penyertaan modal PT PELNI pada PT Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) dengan Akta Notaris nomor 23 tertanggal 14 Juni 1996 Notaris F.J. Mawati yaitu:

- 10.000 lembar saham istimewa dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,-
- 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,- atau seluruhnya berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham istimewa dan 100.000 (seratus ribu) saham biasa atau sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Dengan masuknya pemegang saham baru yaitu YAYASAN KESEHATAN PENSIUNAN PERSEROAN TERBATAS PELAYARAN NASIONAL INDONESIA, berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pengelolaan BUMN tertanggal 12 Mei 1998 Nomor: S-65/M/PBUMN/1998, mengambil sebanyak 10 (sepuluh) saham, maka PT. Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT. PIDC) merubah Anggaran Dasarnya dengan Akta Notaris Nomor 21 tertanggal 10 April 2001 Notaris SP. Henny Singgih, SH sehingga Modal Dasar Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation PT. PID) menjadi:

- PT PELNI (Persero) sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau bernilai nominal sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- YAYASAN KESEHATAN PENSIUNAN PT PELNI sebanyak 10 (sepuluh) saham atau bernilai nominal sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah 2010 (dua ribu sepuluh) saham atau bernilai nominal sebesar Rp2.010.000.000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah) dengan kegiatan usahanya yaitu:

- Berusaha dalam bidang jasa pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan bidang-bidang Jasa Pengurusan Transportasi, ekonomi dan perdagangan, tehnik dan industri serta pembangunan kecuali pelayanan/jasa dalam bidang hukum.
- Berusaha dalam bidang jasa/pelayanan kebersihan (*cleaning service*) perawatan, pemeliharaan dan perbaikan gedung-gedung, rumah-rumah tinggal, dan lainnya, bidang angkutan umum di darat, pengepakan, ekspedisi perbengkelan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan terbatas maka PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION (PT PIDC) merubah nama menjadi PT PELITA INDONESIA DJAYA berkedudukan di Jakarta dengan Akta Notaris nomor 22 tertanggal 10 September 2001.

Terakhir PT. PID merubah Anggaran Dasarnya dengan Akta Notaris nomor: 11 tertanggal 10 Juni 2015 Notaris Yul Khaizar Panuh, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0938906.AH.01.02 tahun 2015 tanggal 07 Juli 2015.

Agar tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan dari Perusahaan Induk yaitu PT. PELNI sebagai pelayanan jasa kepada masyarakat dibidang transportasi laut maka PT. Pelita Indonesia Djaya (PT. PID) ikut berkiprah membantu Induk Perusahaan PT. PELNI (Persero) dalam meningkatkan pelayanannya kepada pengguna jasa PT. PELNI (Persero) sehingga PT. Pelita Indonesia Djaya (PT. PID) merubah brand image pada tanggal 29 September 2014 menjadi PELNI SERVICES dengan kegiatan usahanya yaitu:

- Usaha Jasa Pelayanan Kebersihan (*Cleaning Services*) baik layanan diatas kapal maupun di gedung;
- Usaha Jasa Pengawasan dan Pengamanan baik diatas kapal maupun di gedung kantor ;
- Usaha Jasa Jasa Pengelolaan Kasur Penumpang Kapal;
- Usaha Jasa Pengelolaan Hiburan Band;
- Usaha Pengadaan Bahan Makanan Awak Kapal dan Penumpang;
- Usaha Sewa Kendaraan Dinas;
- Usaha Pengelolaan Kapal Phinisi;
- Usaha Perwismaan;
- Usaha Jasa Manage Service/DCS & Admin Employ;
- Usaha perawatan dan perbaikan kapal penumpang;
- Usaha Sistem Komunikasi Kapal;
- Dan usaha lainnya.

ARTI LOGO PT PID



Kubus warna merah, kuning, biru, hijau tersusun melingkar melambangkan gerakan yang DINAMIS PT PID dalam mencapai tujuan VISI dan MISI serta semangat Inovasi yang sinergi disemua bidang pelayanan yang tidak terpisahkan dimulai dari hal yang kecil menuju ke yang besar sehingga perusahaan tumbuh dan berkembang dengan cepat dan dapat memberikan nilai tambah ke *Stakeholder*.

WARNA KUNING

Melambangkan Intelektualitas kerja serta penuh perhatian dalam merespon kepentingan pelanggan.

WARNA MERAH

Melambangkan semangat yang Tegas, Kreatif Energik penuh motivasi yang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang Prima.

WARNA BIRU

Melambangkan semangat ekspresi Artistik, kekuatan kerjasama dan komunikatif dengan stakeholder sehingga tercipta komunikasi yang nyaman.

WARNA HIJAU

Melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan Pelanggan) kepercayaan bagi pelanggan baik internal maupun eksternal.

VISI DAN MISI



VISI

“Menjadi Perusahaan Jasa Berbasis Teknologi Terkemuka di Indonesia.”

MISI

1. Mengelola dan mengembangkan penyediaan kebutuhan barang dan jasa
Makna: Senantiasa menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan seiring tingginya permintaan kebutuhan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan.
Makna: Memiliki sistem manajemen unggul yang memberikan nilai tambah dan berfokus kepada kepuasan pelanggan.
3. Meningkatkan nilai Perusahaan melalui pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan
Makna: Menjalankan prinsip layanan prima dan perbaikan berkesinambungan demi nilai tambah bagi stakeholder.
4. Melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik guna memberikan nilai tambah bagi karyawan, Perusahaan dan stakeholder.
Makna: Menerapkan prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam menjalankan kegiatan usaha.

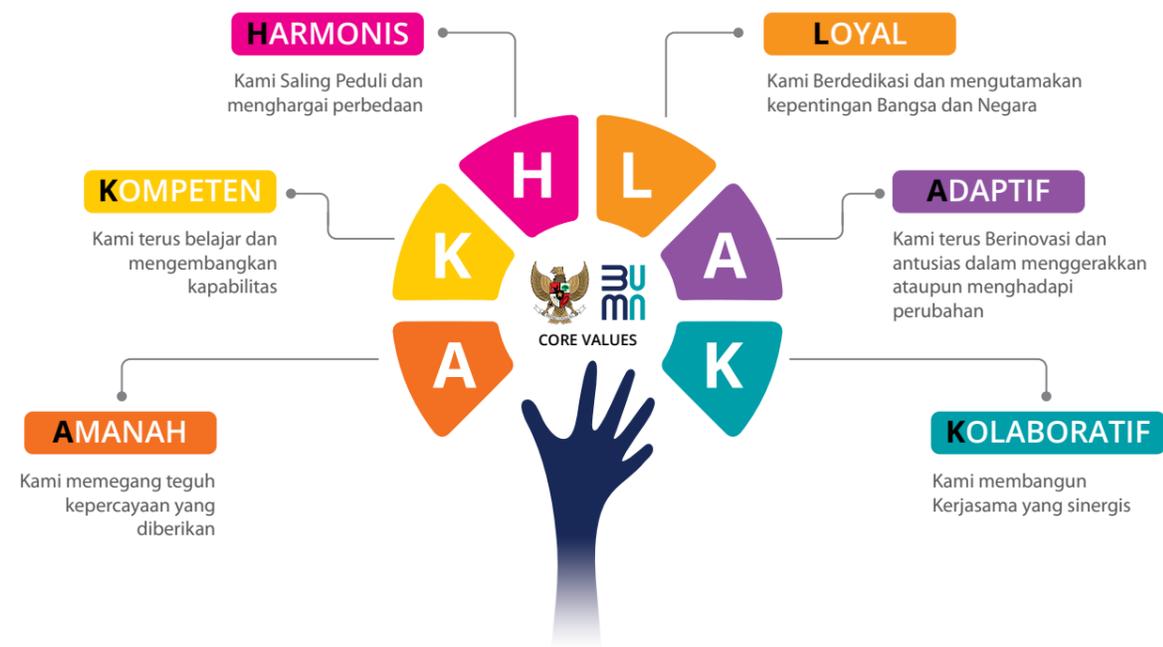
AKHLAK BUMN

Dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN dan entitasnya menjadi pemain global dan menjadikan BUMN sebagai pabrik talenta, maka ditetapkan *Core Values* yang sama untuk seluruh BUMN. PID yang merupakan bagian dari PT PELNI (Persero) sebagai salah satu BUMN terkemuka di Indonesia, juga turut menyelaraskan *core values* ini ke dalam budaya perusahaan PID yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Budaya perusahaan dikembangkan dari sebuah kumpulan norma-norma, nilai, keyakinan, harapan, asumsi, dan filsafat dari orang-orang yang berada di dalamnya, sejalan dengan visi, misi perusahaan. Budaya perusahaan harus dapat tumbuh menjadi identitas perusahaan yang mendasari keseluruhan sistem,

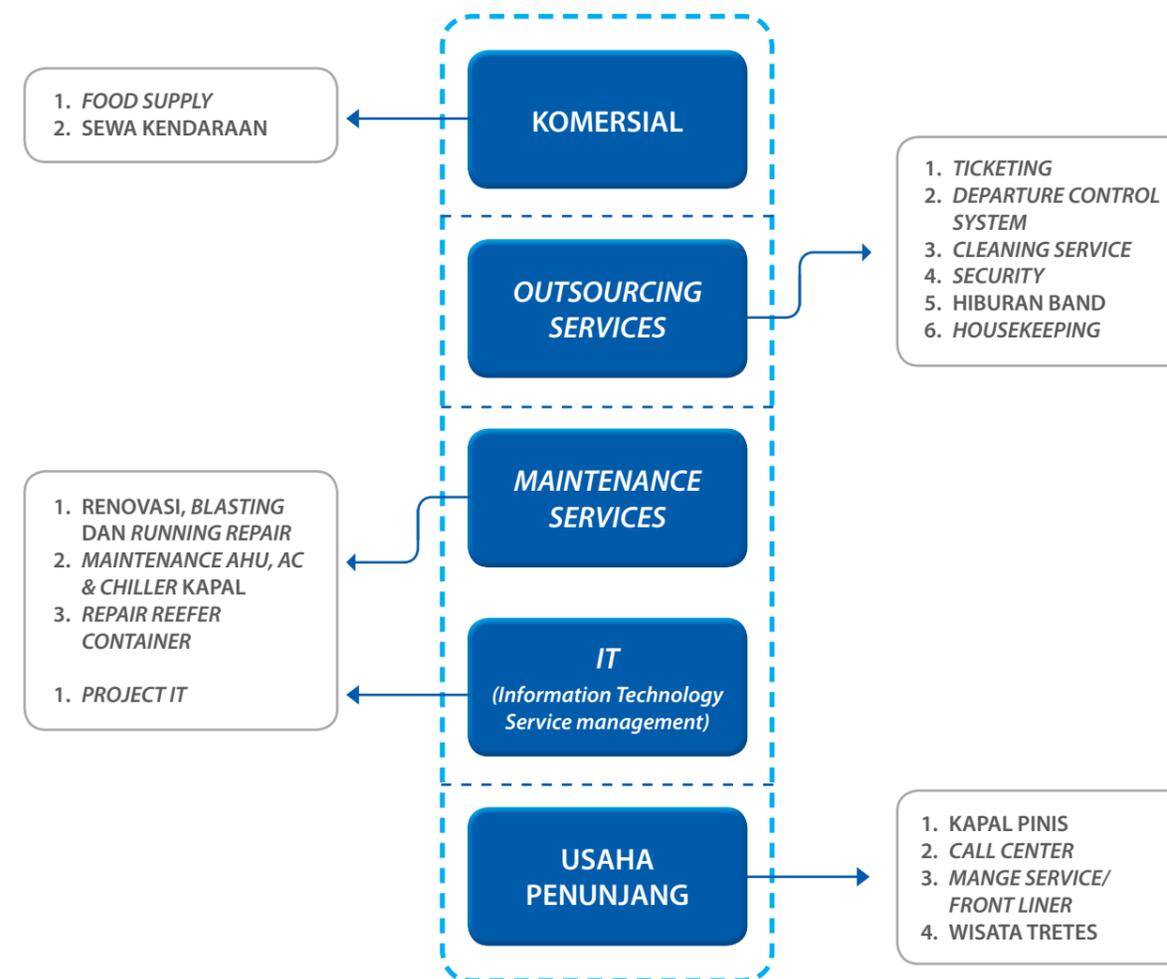
termasuk mekanisme kontrol, atau mempengaruhi cara berinteraksi di dalam perusahaan maupun para pemangku kepentingan di luar organisasi. Sebuah organisasi akan memiliki arah perkembangan perusahaan yang jelas mengenai akan dibawa kemana sebuah perusahaan ini.

Perilaku dan nilai dari budaya organisasi (AKHLAK) ini diyakini dapat memberikan sebuah *added value* untuk dapat meningkatkan produktifitas kinerja dan profesionalisme perusahaan karena PID menjadi mampu untuk dapat bertingkah laku lebih profesional, handal, dan tentunya akan berdampak kepada kinerja perusahaan. Adapun budaya perusahaan tersebut adalah:



KEGIATAN PERUSAHAAN

Dalam tahun 2022 Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:



KEGIATAN USAHA

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah melakukan beragam kegiatan dan inisiatif terkait dengan usaha perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Jasa, terdiri dari:

• Usaha Jasa Pengawasan dan Pengamanan

Usaha Jasa Pengawasan dan Pengamanan adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan. Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak kerjasama yaitu:

NO.	CUSTOMER	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PERIODE KONTRAK	KETERANGAN
1.	PT. PELNI	TH.03.16-03/SS/2022	16 Maret 2022	1 Januari - 31 Maret 2022	Pengamanan a. Receptionist - 2 orang b. Satpam Laut - 113 Orang c. Data Center - 3 Orang d. PAM - 12 Orang e. Satpam Darat - 154 Orang
2.		TH.04.18-01/SS/2022	18-Apr-22	1 April - 30 April 2022	
3.	Hotel Bahtera Cipayung	01.01/001/SPK/047/2022	1 Januari 2022	1 Januari - 31 Desember 2022	Tenaga Pengamanan sebanyak 4 Orang Note: Adendum terkait Kenaikan Tarif PPN
4.		06.29/01/ADD/047/2022	29 Juni 2022		

• Usaha Jasa Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service)

Usaha Jasa Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service) adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kebersihan (Cleaning Service). Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak dengan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

NO.	CUSTOMER	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PERIODE KONTRAK	KETERANGAN
1.	PT. PELNI	TH.03.01-03/SS/2022	01 Maret 2022	1 Januari - 31 Maret 2022	Cleaning Service Laut a. Kapal 3000 - 18 Orang b. Kapal 2000 - 15 Orang c. Kapal 1000 - 9 Orang d. Kapal Roro - 5 Orang
2.		TH.06.24-01/SS/2022	24-Jun-22	1 April - 30 April 2022	
3.		TH.01.24-02/SS/2022	1 Januari 2022	1 Januari - 31 Desember 2022	Cleaning Service Gedung a. Kantor Pusat 31 Orang b. Tg Priok + Presmat 4 Orang c. Kemayoran 3 Orang d. Surabaya 8 Orang e. Makassar 6 Orang f. Kupang 1 Orang g. Balikpapan 1 Orang h. Ambon 2 Orang i. Sampit 1 Orang j. Semarang 2 Orang k. Tual 1 Orang l. Pare-pare 1 Orang m. Kendari 1 Orang n. Denpasar 3 Orang o. Batulicin 1 Orang p. Ternate 1 Orang q. Manokwari 2 Orang r. Jayapura 1 Orang s. Bitung 2 Orang t. Bau- Bau 1 Orang
4.		Adendum 1	6 Juni 2022		
5.		TH.04.01-01/SPK/2021	1 Apr 2021	1 April 2021 - 31 Maret 2022	Pertugas Taman - 2 Orang
6.		TH.04.12-01/SPK/2022	1 Apr 2022	1 April 2022 - 31 Maret 2023	Pertugas Taman - 2 Orang

NO.	NAMA	JUMLAH	NO.	NAMA	JUMLAH
1	Kantor Pusat	31 Orang	11	Tual	1 Orang
2	Tg Priok + Presmat	4 Orang	12	Pare-pare	1 Orang
3	Kemayoran	3 Orang	13	Kendari	1 Orang
4	Surabaya	8 Orang	14	Denpasar	3 Orang
5	Makassar	6 Orang	15	Batulicin	1 Orang
6	Kupang	1 Orang	16	Ternate	1 Orang
7	Balikpapan	1 Orang	17	Manokwari	2 Orang
8	Ambon	2 Orang	18	Jayapura	1 Orang
9	Sampit	1 Orang	19	Bitung	2 Orang
10	Semarang	2 Orang			

• Usaha Jasa Pengelolaan Kasur

Usaha Jasa Pengelolaan Kasur adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga untuk mengelola, merawat kasur di atas kapal penumpang PT PELNI (Persero). Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak dengan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

NO.	CUSTOMER	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PERIODE KONTRAK	KETERANGAN
1.	PT. PELNI	TH.02.25-01/SS/2022	25 Februari 2022	1 Januari - 31 Maret 2022	Housekeeping a. Kapal 3000 - 4 Orang b. Kapal 2000 - 44 Orang c. Kapal 1000 - 27 Orang d. Kapal Roro - 6 Orang Note : Adendum Terkait Perubahan Nilai Kontrak
2.		Adendum Nomor 1	28 Maret 2022		
3.		TH.06.14-02/SPK/2022	14 Jun 2022	1 April - 31 Maret 2023	Housekeeping a. Kapal 3000 - 4 Orang b. Kapal 2000 - 44 Orang c. Kapal 1000 - 27 Orang d. Kapal Roro - 6 Orang

• Usaha Jasa Pengelolaan Tenaga Janitor

Usaha Jasa Pengelolaan Tenaga Janitor adalah Usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga Janitor. Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak dengan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

NO.	CUSTOMER	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PERIODE KONTRAK	KETERANGAN
1.	PT. PELNI	TH.03.09- 02/SS/2022	09 Maret 2022	1 Januari - 31 Desember 2022	Janitor Kantor Pusat - 35 Orang Note: Adendum terkait Kenaikan Tarif PPN
		Adendum Nomor 1	6 Apr 2022		
		TH.02.09-01/SPK/2022	09 Februari 2022	1 Januari - 31 Desember 2022	Janitor Cabang a. Balikpapan - 1 Orang b. Ambon - 1 Orang c. Medan - 1 Orang d. Bima - 1 Orang e. Tarakan - 1 Orang f. Pare-pare - 1 Orang g. Kaimana - 1 Orang h. Tg. Pinang - 1 Orang i. Palu - 1 Orang j. Nunukan - 1 Orang k. Surabaya - 1 Orang l. Bitung - 1 Orang Note: Adendum terkait Kenaikan Tarif PPN
2.	Adendum Nomor 1	20 Mei 2022			

• Usaha Jasa Manage Service, DCS dll

Usaha Jasa Manage Service Embarkasi/Debakasi dan Frontliner, DCS, Contact Center dan Laporan Perjalanan serta Jurnal Harian Kapal, di Cabang-Cabang PT. Pelni:

NO.	CUSTOMER	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PERIODE KONTRAK	KETERANGAN
1.	PT. PELNI	TH.01.31-01/SPK/2022	31 Januari 2022	1 Januari - 31 Desember 2022	TKBM Presmat Tg Priok - 6 Orang
2.		12.29/03/SPL/095/2021	29 Desember 2021	1 Januari - 31 Desember 2022	Teknisi Pelni Surabaya - 1 Orang
3.		10.22/04/SPL/095/2020	22 Oktober 2021	1 Oktober 2021 - 30 September 2022	Teknisi Pelni Pontianak - 1 Orang
4.		TH.03.30-02/SPK/2022	30 Maret 2022	1 Januari - 31 Desember 2022	Operation Room - 3 Orang
5.		TH.03.25-02/SS/2022	25 Maret 2022	1 Januari - 31 Maret 2022	Layanan Tiket - 112 Orang
6.		TH.04.27-02/SS/2022	27 Apr 2022	1 April - 31 Desember 2022	Layanan Tiket - 112 Orang
7.		TH.05-25-01/SPK/2021	25 Mei 2021	1 Mei 2021-30 April 2022	Entry Data Siparsel - 3 Orang
8.		TH.04.28-02/SPK/2022	28 Apr 2021	1 Mei 2022 - 30 Desember 2022	Entry Data Siparsel - 3 Orang
9.		TH.03.07-03/SS/2022	7 Maret 2022	1 Mei 2022-30 Desember 2022	FRONTLINER - 70 Orang
10.		TH.03.09-02/SS/2022	9 Maret 2022	1 Januari - 31 Maret 2022	Driver - 15 Orang
11.		Adendum Nomor 1	12 Juli 2022	1 April - 31 Desember 2022	Note : Perubahan Periode Kerja
12.		TH.03.17-01/SS/2022	17 Maret 2022	1 Januari - 31 Desember 2022	DCS - 104 Orang Admin Employe - 6 Orang
13.		10.21/03/SPL/095/2021	21 Oktober 2021	21 Oktober 2021 - 21 Oktober 2022	Manage Services - 1 Orang
14.		06.21/02/SPL/095/2022	21 Juni 2022	1 April 2022 - 31 Desember 2022	Manage Services - 1 Orang
15.		TH.03.25-01/SPK/2022	25 Maret 2022	1 Januari - 31 Maret 2022	Contact Center - 12 Orang
16.		TH.03.31-01/SPK/2022	31 Maret 2022	1 April 2022 - 31 Desember 2022	Contact Center - 12 Orang

NO.	CUSTOMER	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PERIODE KONTRAK	KETERANGAN
17.	PT. SBN	SBN/AGR/02.16-01/2021	16 Februari 2021	23 Maret 2021 - 22 Maret 2022	TKBM Jayapura - 4 Orang
18.		SBN/AGR/02.02-02/2022	02 Februari 2022	23 Maret 2022 - 22 Maret 2023	TKBM Jayapura - 4 Orang
19.		SBN/AGR/02.02-01/2022	02 Februari 2022	1 Januari - 31 Desember 2022	Contact Center - 3 Orang
20.	RS PELNI (TG DUREN)	SPK/22/06/015	21 Juni 2022	1 Januari - 31 Maret 2022	Pemulasaran Jenazah - 8 Orang Driver Ambulan - 6 Orang Teknisi Gedung - 8 Orang
21.		SPK/22/06/016	21 Juni 2022	1 April - 30 April 2022	Pemulasaran Jenazah - 6 Orang Driver Ambulan - 4 Orang Teknisi Gedung - 8 Orang
22.		SPK/22/06/016A	21 Juni 2022	1 Mei - 31 Desember 2022	Driver Ambulan - 3 Orang Teknisi Gedung - 8 Orang
23.	Hotel Bahtera Cipayung	01.01/002/SPK/047/2022	1 Januari 2022	1 Januari - 31 Desember 2022	Manage Services - 20 Orang

b. Kegiatan Usaha Komersial, terdiri dari:
• Usaha Permakanan

Usaha Permakanan adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan bahan makanan penumpang dan awak kapal. Dalam kegiatan usahanya dan melakukan kontrak sebagai berikut:

NO.	CUSTOMER	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PERIODE KONTRAK	KETERANGAN
1.	PT. PELNI	TH.01.11-05/SS/2022 Adendum Nomor 1	11 Februari 2022	Januari - 31 Desember 2022	Pemakanan Supply 26 Kapal
2.	RS PELNI	07.17/PKS/PT.PID/04/2021	17 Juli 2021	17 Juli 2021 sd 16 Juli 2022	Supply Beras Premium dan Medium
		08.19/PKS/PT.PID/12/2022	9 Agustus 2022	17 Juli 2022 sd 16 Juli 2023	

• Usaha Sewa Kendaraan dinas

Usaha Sewa Kendaraan Dinas adalah usaha yang bergerak di bidang penyewaan mobil dinas atas menyediakan kendaraan dinas. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan kontrak kerjasama yaitu:

NO.	CUSTOMER	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PERIODE KONTRAK	KETERANGAN
1.	PT. PELNI	TH.11.22-01/SS/2021	22 November 2022	10 September 2021 -	Kendaraan disewakan Direksi Note: Adendum terkait Kenaikan Tarif
		Adendum Nomor 1	06 July 2022	10 September 2022	
2.	RS PELNI	TH.04.26-01/SS/2022	26 April 2022	11 April 2022 – 10 April 2023	Kendaraan disewakan Operasional
3.	PT. Alif Jaya Grup	05.03/PKS/DIR/001/100/2022	03 May 2022	03 Mei 2022 – 03 Oktober	Kendaraan disewakan Operasional
4.	PT. Artdeco Sejahtera Abadi	11.01/PKS/DIR/001/100/2022	01 November 2022	01 November 2022 – 01 Januari 2023	Kendaraan disewakan Operasional
5.	PT. Jaya Didarat Sentosa	03.11/PKS/DIR/001/100/2022	11 March 2022	11 Maret 2022 – 10 Maret 2023	Kendaraan disewakan Operasional
6.	PT. Jaminan Kredit Indonesia	02/SPK/UMU/1/2022	10 January 2022	10 Januari 2022 – 09 Januari 2023	Kendaraan disewakan Operasional
7.	PT. Adtrans Rentcar Indonesia	05.19/PKS/DIR/001/100/2022	19 May 2022	19 Mei 2022 – 18 Mei 2022	Kendaraan disewakan Operasional
8.	PT. Sarana Bandar Indotrading	10.25/PKS/DIR/001/100/2022	25 October 2022	01 November 2022 – 31 Oktober 2025	Kendaraan disewakan Operasional
9.	PT. Sarana Bandar Nasional	SBN/AGR/13.16-01/VI/2022	13 June 2022	27 Juni 2022 – 26 Juni 2024	Kendaraan disewakan Operasional
10.		TH.09.23-03/SPK/2022	23 September 2022	12 September 2022 - 31 Desember 2022	Kendaraan disewakan Operasional
11.	PT. PELNI	TH.01.19-02/SS/2022	19 January 2022	12 Desember 2021 - 11 Desember 2022	Kendaraan disewakan Operasional
12.		TH.11.14-01/SPK/2022	14 November 2022	11 Oktober 2022 - 31 Desember 2022	Kendaraan disewakan Operasional

• Usaha Pariwisata Kapal Pinisi

Sebagai tindak lanjut program tahun 2020 mengenai pengembangan usaha dalam bidang usaha wisata, PT. PID merealisasikan pengadaan kapal Pinisi untuk menunjang bisnis PT. PID dibidang pariwisata, yang diresmikan pada tanggal 23 Juli 2019 di Tanjung Bira, Bulukumba dan Sulawesi Selatan. Adapun Paket Wisata yang di tawarkan adalah sebagai berikut:

NO.	PAKET	KETERANGAN
1.	1 Hari (Fullday)	1 Pulau Komodo
		2 Pulau Padar
		3 Pulau Pink
		4 Snorkeling
2.	2 Hari 1 Malam	1 Pulau Bidadari
		2 Pulau Komodo
		3 Pulau Kalong Rinca
		4 Snorkeling
3.	3 Hari 2 Malam	1 Pulau Kalong Rinca
		2 Pulau Kelor
		3 Pulau Rinca
		4 Pulau Komodo
		5 Pulau Padar
		6 Pandai Pink
		7 Gili Laba
		8 Snorkeling

NO.	PAKET	KETERANGAN
4.	4 Hari 3 Malam	1 Pulau Kalong Rinca
		2 Pulau Rinca
		3 Pulau Komodo
		4 Pulau Padar
		5 Pandai Pink
		6 Pulau Kelor
		7 Snorkeling
		8 Gili Laba
		9 Pulau Sembilan
		10 Main Point

c. Kegiatan Usaha Jasa Maintenance & IT, terdiri dari:
• Usaha Maintenance

Usaha Maintenance bergerak di usaha jasa perbaikan dan pemeliharaan Kapal, AHU, Pengadaan Sparepart, dan lainnya, dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan kontrak kerjasama yaitu:

NO.	NOMOR SPK/BA	SPK	KAPAL
1.	04.14/02/SPL/095/2022	Pengadaan Filter AHU No. 1 s/d 18	KM. Sinabung
2.	06.27-05/SPK/2022	Perbaikan Vinyl	KM. Lambelu
3.	05.25/04/SPL/095/2022	Perbaikan Kamar Mandi	KM. Binaiya
4.	05.25/06/SPL/095/2022	Pengadaan Barang 3 Pcs Pipa Flexible AT ST/ ST Pendingin Motor Bantu No. 1 KM. Nggapulu	KM. Nggapulu
5.	05.25/07/SPL/095/2022	Perbaikan AHU AC 16 KM. Bukit Siguntang	KM. Bukit Siguntang
6.	04.04/05/SPL/095/2022	Pengadaan Suku Cadang Mesin Es	KM. Gunung Dempo
7.	TH.06.15-02/SPK/2022	Perbaikan General Overhaul Motor Bantu No. 1 KM. Lognus 6	KM. Lognus 6
8.	06.20/08/SPL/095/2022	Pelaksanaan Pengadaan Barang 6 Pcs Exhaust Valve Seat Insert Motor Induk KM. Bukit Raya	KM. Bukit Raya
9.	07.05/02/SPL/095/2022	Pengadaan Kompresor AC KM. Logistik Nusantara 3	KM. Lognus 3
10.	07.27-03/SPK/2022	Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Vynil	KM. Binaiya
11.	07.26-04/SPK/2022	Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Vynil	KM. Ciremai
12.	TH.07.25-04/SPK/2022	Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Mandi	KM. Nggapulu
13.	TH.08.22-03/SPK/2022	Pengadaan Suku Cadang Battery Untuk Kapal- kapal PT. PELNI (Persero)	Semua Kapal
14.	08.23/ 07 / SPL/095/2022	Pelaksanaan Pengadaan Barang 6 Pcs Exhaust Valve Seat Insert Motor Induk KM. Bukit Raya	KM. Bukit Raya
15.	08.25/02/SPL/095/2022	Pengadaan Suku Cadang Battery KM. Sabuk Nusantara 69	KM. Sabuk Nusantara 69
16.	TH.09.15-04/SPK/2022	Perbaikan AHU Nomor 2 KM. Egon	KM. Egon
17.	TH. 09.19-02/SPK/2022	Pengadaan Kayu KM. Dorolonda	KM. Dorolonda
18.	TH. 09.26-04/SPK/2022	Perbaikan Pintu Utama Kamar Mandi KM. Sinabung	KM. Sinabung
19.	TH. 10.07-01/SPK/2022	Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Vynil KM. Sinabung	KM. Sinabung
20.	TH.10.10-07/SPK/2022	Pengadaan Barang & Jasa Perbaikan Kamar Mandi Ekonomi Dek 2,3,4,5 KM. Dobonsolo	KM. Dobonsolo
21.	TH.10.10-03/SPK/2022	Pengadaan Barang & Jasa Perbaikan Blower AHU AC No.2 s/d 11 KM. Awu	KM. Awu
22.	10.19/01/SPL/095/2022	Pengadaan Suku Cadang Battery	KM. Sabuk Nusantara 105
23.	KM. Sabuk Nusantara 105	Pelaksanaan Perbaikan 3 Unit AHU KM. Labobar	KM. Labobar
24.	11.28/01/SPL/095/2022	Pengadaan Langsung Permintaan Perbaikan Pintu Dapur	KM. Ciremai
25.	10.31/10/SPL/095/2022	Pelaksanaan Perbaikan Kamar Mandi Penumpang	KM. Wilis

NO.	NOMOR SPK/BA	SPK	KAPAL
26.	PBJ-101.00.13	Surat Pemesanan Barang/Jasa(SPB/J) Modifikasi Pipa Kondensor AC Central dalam rangka Docking Tahun 2022 A(SDP)	KMP Sebuku
27.	11.10/03/SPL/095/2022	Pekerjaan Perbaikan Lantai keramik Dapur KM. Ciremai	KM. Ciremai
28.	12.14/02/SPL/095/2022	Pengadaan Suku Cadang Battery	KM. Sabuk Nusantara 98
29.	TH.12.20-04/SPK/2022	Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Blower AC No 1, 12 dan 15	KM. Kelud
30.	TH.12.20-01/SS/2022	Pengadaan barang dan jasa perbaikan vinyl	KM. Labobar, KM. Ciremai, KM. Dorolonda
31.	TH.12.21-03/SPK/2022	Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Evaporator AC No 2 & 3 dan Exhaust Fan Blower E13, E16 & RE1	KM. Ciremai
32.	TH.12.09-02/SPK/2022	Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Suhu Ruangan di Kapal-kapal PT. PELNI (Persero)	Semua Kapal
33.	TH.12.27-04/SPK/2022	Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Pintu Gandrum dan Stop Valve Mesin ES KM. Dorolonda	KM. Dorolonda
34.	12.16/07.A/BA-PLTK/2022	Penawaran Harga Pekerjaan Perbaikan Push Tarik Kamar Mandi ex. (22 Unit) KM. Ciremai	KM. Ciremai
35.	12.19/13.A/BA-PLTK/2022	Penawaran Harga Pekerjaan Perbaikan Grill Ventilasi AC Dek Ekonomi KM. Tatamailau	KM. Tatamailau
36.	12.19/15.A/BA-PLTK/2022	Penawaran Harga Pekerjaan Perbaikan Perbaikan Cover/Penu- tup AC KM. Lawit	KM. Lawit
37.	12.19/14.A/BA-PLTK/2022	Penawaran Harga Pekerjaan Perbaikan Blower AC 11 KM. Gunung Dempo	Gunung Dempo
38.	TH.01.09-01/SPK2023	Pengadaan Barang dan Jasa Perbiakn Kamar Mandi KM. Ciremai	KM. Ciremai
39.	12.23/10.A/BA-PLTK/2022	Pekerjaan Difuser Blower AC KM. Umsini	KM. Umsini

• Usaha IT

Usaha IT bergerak diusaha jasa Pengadaan Perangkat, dan lainnya dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan kontrak kerjasama yaitu:

NO.	CUSTOMER	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PERIODE KONTRAK	KETERANGAN
1.		TH.12.21-01/SS/2021	21 Desember 2021	01 Januari 2022 - 01 April 2022	Penyediaan Layanan Sistem Komunikasi Kapal di 26 Kapal Penumpang PT. PELNI (Persero) Periode Januari - April 2022
2.		TH.01.07-03/SPK/2022	07 Januari 2022	1 Januari - 31 Desember 2022	Pekerjaan Maintenance Vending Machine di 13 Cabang PT. PELNI (Persero) Tahun 2022
3.		TH.01.18-02/SPK/2022	18 Januari 2022	18 Januari 2022 - 18 Maret 2022	Pengadaan Perangkat Sistem E-Ticketing PT. PELNI (Persero)
4.		TH.08.25-01/SPK/2022	25 Agustus 2022	25 Agustus 2022 - 25 Januari 2023	Pengadaan Kertas Cetak / Blanko Boarding Pass PT. PELNI (Persero)
5.		03.28/01/SPL/095/2022	28 Maret 2022	28 Maret 2022	Pengadaan Infrastruktur Jaringan di Cabang Bau Bau
6.	PT. PELNI	05.17/01/SPL/095/2022	17 Mei 2022	17 Mei 2022	Pengadaan Komponen Perangkat Vending Machine
7.		11.07/07/SPL/095/2022	07 November 2022	07 November 2022	Pemasangan CCTV KM. Logistik Nusantara 4
8.		SO VSO-2022-09-09-167275	09 September 2022	09 September 2022	Permohonan Pembayaran Pengadaan Perangkat Cabang Makassar
9.		SO VSO-2022-10-30-7931695	30 Oktober 2022	30 Oktober 2022	Permohonan Pembayaran Pengadaan Komponen Vending Machine Tahun 2022
10.		SO VSO-2022-11-04-4675780	04 November 2022	04 November 2022	Permohonan Pembayaran Pengadaan Perangkat NUC dan HP Samsung PT. PELNI (Persero)
11.		SO VSO-2022-12-14-8702586	14 Desember 2022	14 Desember 2022	Permohonan Pembayaran Pengadaan Perangkat Printer Epson dan PC Dell PT. PELNI (Persero)
12.		SO VSO-2022-12-23-7051973	23 Desember 2022	23 Desember 2022	Permohonan Pembayaran Pengadaan Perangkat Toolkit PT. PELNI (Persero)
13.	PT. Nesmedia Nusantara	02.26/SPK/DIR/004/100/2021	10 Januari 2022	01 Januari 2022 - 31 Maret 2022	Layanan Akses Internet di Kapal PT. PELNI (Persero)
14.	PT. Solusi Integrasi Utama	S-015/MD/SIU/08/2022	04 Agustus 2022	4 Agustus 2022 - 04 Desember 2022	Pekerjaan Pengadaan Perangkat Pendukung Implementasi Etiket Kapal Penumpang Tahun 2022

c. Kegiatan Usaha Sampingan Lainnya, perusahaan melakukan kontrak kerjasama yaitu:

NO.	CUSTOMER	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	PERIODE KONTRAK	KETERANGAN
1.	PT. PELNI	TH.03.07- 04 / SS / 2022	07 March 2022	01 Januari 2022 - 31 Desember 2022	Pekerjaan Cover Kasur
2.	PT. PELNI	TH.06.06-02/SPK/2022	06 June 2022	06 Juni 2022 - 05 Juli 2022	Pekerjaan Mudik Gratis
3.	PT. PELNI	TH.01.05-02/SPK/2023	05 January 2023	04 November 2022 - 03 Mei 2023	Pekerjaan Sail Tidore



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Hasil kinerja bisnis PT PID di tahun 2022 ini secara umum masih tergolong cukup baik dan relatif bisa mendekati dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP. Bahkan jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun sebelumnya, beberapa ratio kinerja dari PID terbukti mampu meningkat secara signifikan.

DI TENGAH SITUASI SULIT, PT PID TETAP MAMPU MERAH KINERJA CUKUP BAIK

Kebangkitan ekonomi global dari dampak pandemi COVID-19 mulai pertengahan tahun 2021 menumbuhkan optimisme bahwa tahun 2022 akan menjadi tahun pemulihan. Tetapi kemunculan virus SARS-CoV-2 varian Omicron di awal tahun dan invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 menyebabkan ekonomi global kembali berada dalam kondisi ketidakpastian.

Kondisi tersebut berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar keuangan global, yang menyebabkan koreksi atas forecast pertumbuhan ekonomi secara global.

Perang di Ukraina yang diikuti oleh sanksi Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat dan Asia-Pasifik terhadap Rusia memicu ketegangan geopolitik dan berdampak pada aktivitas perekonomian global.

Krisis pangan dan energi dengan cepat menjadi ancaman baru karena Rusia dan Ukraina memiliki posisi penting dalam rantai pasokan pangan dan energi global. Gangguan rantai pasokan membuat harga komoditas bahan baku, energi dan bahan pangan melonjak melampaui *level* yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga mendorong lonjakan inflasi. Tingkat inflasi global mencapai level tertinggi sejak terjadinya krisis sektor keuangan dunia tahun 2008.

Lembaga Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) dalam laporan *World Economic Outlook* yang dirilis pada Januari 2023, memprediksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2022 sebesar 3,4% atau turun signifikan dari realisasi pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 yang tercatat sebesar 6,2%.

Penurunan Signifikan terjadi pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang di tahun 2022 di estimasikan tumbuh, melambat menjadi 2,0% dari 5,9% di tahun 2021. Hal tersebut akibat oleh tekanan inflasi yang tinggi sehingga menggerus daya beli konsumsi serta diikuti dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat dan agresif.

Negara Uni Eropa juga di estimasikan tumbuh melambat menjadi 3,5% di tahun 2022 dari 5,3% di tahun 2021, perlambatan tersebut disebabkan oleh disrupsi pasokan energi akibat konflik Rusia-Ukraina sehingga mendorong peningkatan inflasi ke level yang tinggi.

Demikian halnya dengan estimasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun signifikan menjadi 3,0% di tahun 2022 dari 8,1% di tahun 2021, disebabkan oleh implementasi *Zero Covid Policy (ZCP)* yang diikuti dengan kebijakan *lockdown* serta perlambatan di bidang properti, meskipun pada akhirnya, Tiongkok melakukan reopening atas pembatasan dan aktivitas ekonomi.

Dinamika global tentu berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju Inflasi Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai 5,51%, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 3,0+1% dan jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2021 sebesar 1,87% dan tahun 2020 sebesar 1,68%.

Kenaikan inflasi terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga Elpiji non subsidi yang menimbulkan dampak lanjutan terutama pada harga bahan pokok dan biaya transportasi.

Dengan tingkat penghasilan yang masih relatif stagnan, masyarakat terutama kalangan ekonomi menengah bawah lebih mengutamakan belanja kebutuhan pokok dan menunda kebutuhan lainnya yang tidak mendesak.

Situasi ekonomi di tanah air yang masih kurang kondusif seperti diurai di atas, tentu saja juga berpengaruh pada PT PID.

Namun demikian, hasil kinerja bisnis PT PID di tahun 2022 ini secara umum masih tergolong cukup baik dan relatif bisa mendekati dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP. Bahkan jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun sebelumnya, beberapa ratio kinerja dari PID terbukti mampu meningkat secara signifikan.

Realisasi Pendapatan Usaha Meningkat Signifikan Dibanding Tahun 2021

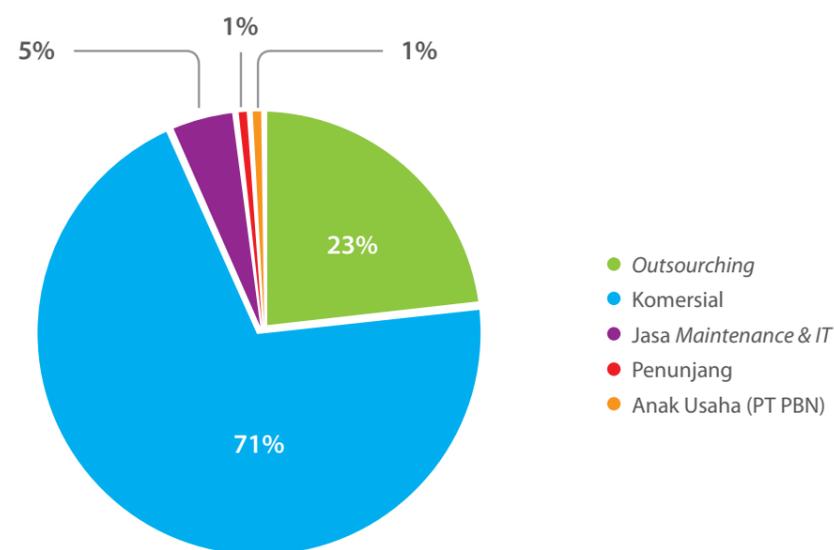
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO.	URAIAN	TAHUN 2021 REALISASI AUDITED	TAHUN 2022					
			RKAP	PRANOGSA	REALISASI AUDITED	CAPAIAN (%) 7=(6/4)	DEVIASI (%) 8=(6-5)/5	TREND (%) 9=(6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PENDAPATAN USAHA							
A	PENDAPATAN USAHA SENDIRI							
1	Usaha Jasa	95.954	113.659	111.382	104.054	91,55	(6,58)	108,44
2	Usaha Komersial	190.700	284.569	416.155	324.070	113,88	(22,13)	169,94
3	Usaha JMI	41.855	61.215	28.947	21.575	35,24	(25,47)	51,55
4	Usaha Penunjang	5.188	1.477	1.972	4.075	275,98	106,62	78,55
	Jumlah Pendapatan Usaha Sendiri	333.696	460.920	558.456	453.774	98,45	(18,74)	135,98
B	PENDAPATAN USAHA ANAK							
1	PT PBN	3.303	3.384	3.705	3.755	110,97	1,36	113,69
	Jumlah Pendapatan Usaha Anak	3.303	3.384	3.705	3.755	110,97	1,36	113,69
	JUMLAH PENDAPATAN USAHA	337.000	464.304	562.161	457.529	98,54	(18,61)	135,77
II	BIAYA USAHA							
A	BIAYA USAHA SENDIRI							
1	Usaha Jasa	93.840	89.783	87.103	98.228	109,41	12,77	104,68
2	Usaha Komersial	166.209	240.579	371.621	262.806	109,24	(29,28)	158,12
3	Usaha JMI	37.091	53.001	24.070	14.520	27,40	(39,67)	39,15
4	Usaha Penunjang	4.078	1.195	1.557	2.535	212,15	62,88	62,17
	Jumlah Biaya Usaha Sendiri	301.219	384.558	484.350	378.090	98,32	(21,94)	125,52
B	BIAYA USAHA ANAK							
1	PT PBN	1.391	1.553	1.638	1.569	101,00	(4,23)	112,77
	Jumlah Biaya Usaha Anak	1.391	1.553	1.638	1.569	101,00	(4,23)	112,77
	JUMLAH BIAYA USAHA	302.610	386.111	485.988	379.658	98,33	(21,88)	125,46
III	LABA (RUGI) KOTOR USAHA	34.390	78.193	76.173	77.871	99,59	2,23	226,44
IV	BIAYA OVERHEAD	45.759	51.069	46.281	52.191	102,20	12,77	114,06
V	LABA (RUGI) BERSIH USAHA	(11.370)	27.124	29.892	25.680	94,68	(14,09)	(225,87)
VI	LABA (RUGI) DILUAR USAHA	16.593	(213)	2.034	7.946	(3.735,09)	290,71	47,89
VII	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	5.223	26.911	31.925	33.626	124,95	5,33	643,76
	Bagian Kepemilikan Minoritas	6	12	154	5	43,10	(96,75)	89,67
	Penghasilan (Beban) Pajak	(58)	(5.382)	(7.080)	(7.695)	142,99	8,70	13.360,10
	Tanggungan & Pajak Kini							
VIII	LABA (RUGI) KONSOLIDASI	5.160	21.517	24.692	25.925	120,48	5,00	502,42

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2022 terealisasi sebesar Rp457.000 juta atau 98,54% dari anggaran sebesar Rp464.304 juta, dan meningkat 135,77% dibandingkan dengan Pendapatan Usaha tahun 2021 sebesar Rp337.000 juta.

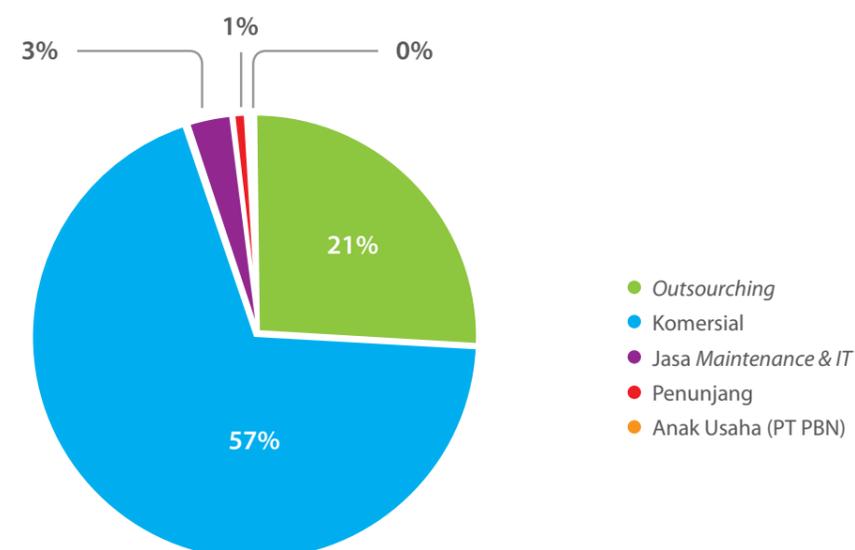
Kontribusi Pendapatan usaha tersebut tergambar pada grafik di bawah ini:



Biaya Usaha Mendekati Target Anggaran

Biaya usaha tahun 2022 terealisasi sebesar Rp379.658 juta atau 98,33% dari anggaran sebesar Rp386.111 juta, dan tercapai 125,46% dibandingkan dengan Biaya Usaha tahun 2021 sebesar Rp302.610 juta.

Kontribusi Biaya usaha tersebut tergambar pada grafik di bawah ini:



Pendapatan usaha tahun 2022 sebesar Rp457.000 juta berkontribusi dari:

1. Usaha Jasa sebesar 23%
2. Usaha Komersial 71%
3. Usaha JMI (Jasa Maintenance & IT) 5%
4. Usaha Penunjang 1%
5. Usaha Entitas Anak (PT PBN) sebesar 0,98%

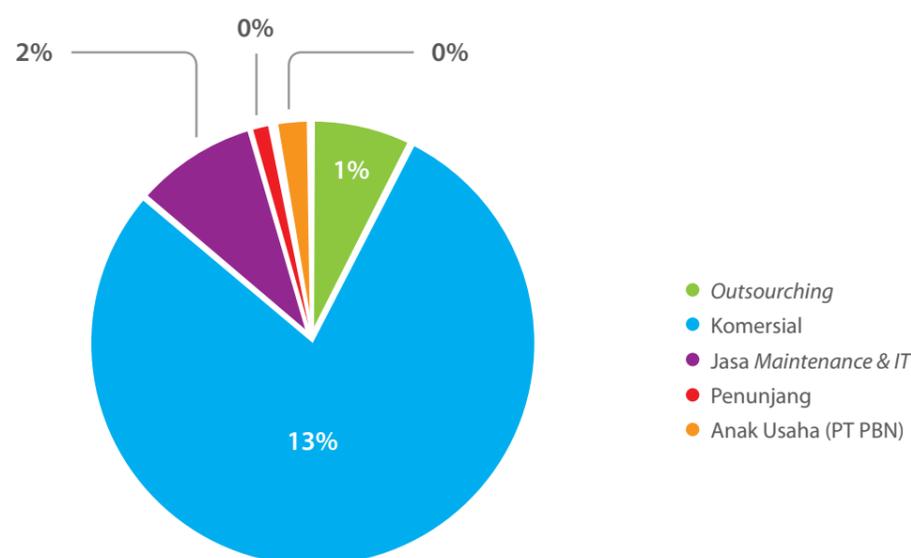
Biaya usaha tahun 2022 sebesar Rp379.658 juta tersebut berkontribusi dari:

1. Usaha Jasa sebesar 26%
2. Usaha Komersial 69%
3. Usaha JMI (Jasa Maintenance & IT) 4%
4. Usaha Penunjang 1%
5. Usaha Entitas Anak (PBN) sebesar 0,98%

Laba Usaha Meningkatkan Tinggi Dibanding 2021

Laba usaha tahun 2022 terealisasi sebesar Rp77.871 juta atau 99,59% dari anggaran sebesar Rp78.193 juta, dan tercapai 226,44% dibandingkan dengan laba usaha tahun 2021 sebesar Rp34.390 juta.

Laba usaha tahun 2022 sebesar Rp77.871 juta berkontribusi dari:



1. Usaha Jasa sebesar 6%
2. Usaha Komersial sebesar 71%
3. Usaha Jasa Maintenance & IT sebesar 14%
4. Usaha Penunjang sebesar 3%
5. Usaha Entitas Anak (PT PBN) sebesar 0%

Laba Usaha terdiri dari:

1. Usaha Jasa *Outsourcing*, laba usaha jasa tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.826 juta atau 24,40% dari anggaran sebesar Rp23.876 juta, dan 275,65% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.113 juta. Tahun 2022 laba usaha jasa memberikan kontribusi laba usaha sebesar 6% dari total laba usaha.
2. Usaha Jasa Komersial, laba usaha komersial tahun 2022 terealisasi sebesar Rp61.265 juta atau 139,27% dari anggaran sebesar Rp43.990 juta, dan 250,16% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp24.490 juta. Tahun 2022 laba usaha komersial memberikan kontribusi laba usaha sebesar 71% dari total laba usaha.
3. Usaha Jasa *Maintenance & IT*, laba usaha Jasa *Maintenance & IT* tahun 2022 terealisasi sebesar Rp7.054 juta atau 85,88% dari anggaran sebesar Rp8.214 juta, dan 148,06% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.764 juta. Tahun 2022 laba usaha Jasa *Maintenance & IT* memberikan kontribusi laba usaha sebesar 14% dari total laba usaha.

4. Usaha Penunjang, laba usaha penunjang tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.540 juta atau 546,89% dari anggaran sebesar Rp282 juta, dan trend naik 138,75%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.110 juta. Tahun 2022 laba usaha penunjang memberikan kontribusi laba usaha sebesar 3% dari total laba usaha.
5. Laba usaha Entitas anak (PT PBN) tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.180 juta atau 119,42% dari anggaran sebesar Rp1.831 juta, dan naik 114,35% dibandingkan dengan laba usaha Entitas anak (PT PBN) tahun 2021 sebesar Rp1.912 juta. Tahun 2022 Entitas anak (PT PBN) memberikan kontribusi laba usaha sebesar 6% dari total laba usaha.

Laba Bersih Konsolidasian Meningkatkan Hingga 502,42%

Laba bersih Konsolidasi setelah pajak tahun 2022 terealisasi sebesar Rp25.925 juta atau sebesar 120,53% dari anggaran sebesar Rp21.517 juta. Dan jika dibandingkan realisasi laba bersih konsolidasi di tahun 2021 yang masih sebesar Rp5.160 juta, maka kenaikannya mencapai 502,42%.

Capaian Posisi Keuangan

Total Aset

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp 333.651 juta atau 107,88% dari anggaran sebesar Rp 309.287 juta dan apabila dibandingkan dengan Jumlah Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp 284.838 juta, maka trendnya naik sebesar 117,14%.

Adapun rincian Posisi Keuangan Entitas sebagai berikut:

PERKIRAAN	AUDITED 31/12/2021	PROYEKSI 31/12/2022	AUDITED 31/12/2022	PROSENTASE	
				4 : 3	4 : 2
1	2	3	4	5	6
ASET					
Asset Lancar	220.401	243.073	256.288	116,28%	116,28%
Asset Tetap	26.004	31.310	26.526	84,72%	102,01%
Properti Investasi	17.042		19.942	0,00%	0,00%
Asset Sewa Guna Usaha	15.237	24.153	26.001	107,65%	170,64%
Asset Tak Berwujud	2.510	3.706	2.006	54,13%	79,93%
Asset Dalam Penyelesaian	49	4.547	124	2,72%	252,45%
Asset Hak Guna Usaha	670	328	-	0,00%	0,00%
Asset Pajak Tangguhan	2.925	2.170	2.765	127,38%	94,51%
JUMLAH ASET	284.838	309.287	333.651	107,88%	117,14%
LIABILITAS MODAL					
Liabilitas Lancar	114.358	117.232	134.697	114,90%	117,79%
Liabilitas Jangka Panjang	5.745	11.765	10.483	89,10%	182,45%
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	579	345	-	0,00%	0,00%
Hak Minoritas	127	142	132	92,66%	103,61%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	5.296	5.072	1.678	33,08%	31,68%
Modal dan Cadangan	133.985	120.075	144.305	120,18%	107,70%
Saldo Laba (Rugi)	25.686	56.065	41.291	73,65%	160,75%
Komponen Ekuitas Lainnya	(937)	(1.407)	1.067	-75,85%	-113,85%
Ekuitas	158.733	174.732	186.794	106,90%	117,68%
JUMLAH LIABILITAS DAN MODAL	284.838	309.287	333.651	107,88%	117,14%

Capaian Penerimaan Dan Pengeluaran Kas (Cash Flow)

(Dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		PROSENTASE	
		RKAP	REALISASI	CAPAIAN (%)	TREND (%)
1	2	3	4	5	6
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan Kas dari Pelanggan	373.609	432.360	465.343	107,63	124,55
Pembayaran Kepada Pemasok	(201.676)	(252.697)	(402.583)	159,31	199,62
Pembayaran Biaya Operasional	(109.134)	(140.821)	(31.004)	22,02	28,41
Pengeluaran Lain-lain	(27.299)	(592,42)	(2.356)	397,73	8,63
Pembayaran Pajak	(20.213)	(12.852)	(13.449)	104,65	66,54
Penerimaan Lain-lain	15.721	493	223	45,24	1,42
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	31.009	25.891	16.175	62,47	52,16
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penambahan Deposito	-	-	-	-	-
Penambahan Aset Tetap	(18.377)	(10.282)	(16.043)	156,04	87,30
Pemasangan IT	(1.867)	(2.000)	-	-	-
Penambahan Aset Tak Berwujud	-	-	2.028	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(20.243)	(12.282)	(14.015)	114,12	69,23
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan Pinjaman Bank	29.200	-	-	-	-
Penerimaan/Pembayaran Hutang Bank/Pihak III	(20.658)	- 6.369	(13.317)	-	-
Penerimaan Dari Investasi	-	1.100	-	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	8.542	(5.269)	(13.317)	252,75	155,90
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	19.307	8.340	(11.157)	133,77	57,79
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	14.642	28.817	33.950	117,81	231,86
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	33.950	37.157	22.793	61,34	67,14

Realisasi kas bersih sampai dengan akhir tahun 2022 yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp16.175 juta atau sebesar 62,47 % dari RKAP tahun 2022 sebesar Rp25.891 juta. Dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp31.009 juta, maka realisasi tahun 2022 hanya 52,16%-nya.

Sepanjang tahun 2022 dalam penggunaan dana, Entitas sangat selektif agar tepat sasaran sehingga saldo akhir kas dan setara kas menjadi Rp22.793 juta atau 61,34% dari RKAP tahun 2022 sebesar Rp37.157 juta.

Dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp33.950 juta, maka trendnya 67,14%. Penggunaan dana sampai dengan akhir tahun 2022 dipergunakan untuk pembiayaan operasional dan investasi baik alat produksi dan alat penunjang.

Capaian Investasi

Realisasi investasi sampai akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp18.352 juta, atau 89.80% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.437 juta.

Adapun rincian investasi sebagai berikut:

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO.	URAIAN	REALISASI AUDITED 2021	RKAP TAHUN 2022	REALISASI AUDITED 2022	CAPAIAN 5 : 4	TREND 5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
I OPERASIONAL						
1	Toyota Veloz	4.440	-	6.463	-	145,57
2	Innova	-	4.980	5.777	116,00	-
3	Camry	-	2.406	-	-	-
4	Truck 6 Roda	296	-	-	-	-
5	Pajero	-	-	1.858	-	-
6	Alphard	-	1.270	1.354	106,61	-
	Total Kendaraan Disewakan	4.736	8.656	15.452	178,51	326,27
1	Polisher	-	135	18	13,02	-
2	Mobil Box	-	1.800	-	-	-
3	Mobil Box Pendingin	-	1.611	-	-	-
4	Reefer container	-	900	185	20,59	-
	Total Alat untuk Pelayanan	-	4.446	203	4,56	-
	Jumlah Operasional	4.736	13.102	15.655	119,48	330,55
II PENUNJANG						
1	Gudang dan Tanah	-	4.000	-	-	-
2	Renovasi Kantor & Gedung	-	1.000	-	-	-
	Total Tanah	-	5.000	-	-	-
	Total Gedung	-	-	-	-	-
1	Mobil Honda CRV 1.5 Prestige	-	225	2.093	930,27	-
	Total Kendaraan Penunjang	-	225	2.093	930,27	-
1	Kamera	-	14	-	-	-
2	Meja + Kursi kerja Dir Keuangan	-	12	-	-	-
3	Laptop	-	24	29	119,80	-
4	Lemari atau Peralatan Lainnya	-	10	575	5.753,98	-
	Total Kendaraan Penunjang	-	60	604	1.015,38	-
1	Hand Stacker electric/handlift electric 1.5 ton 3 meter	-	50	-	-	-
	Alat Operasioanal	-	50	-	-	-
	ERP	983	2.000	-	-	-
1	Total Aplikasi	983	2.000	-	-	-
	Jumlah Penunjang	983	7.335	2.697	36,77	274,39
	TOTAL INVESTASI	5.719	20.437	18.352	89,80	320,90

Investasi terdiri dari antara lain kendaraan disewakan dan alat untuk pelayanan operasional, sehingga jumlah operasional nilainya sebesar Rp15.655 juta.

Kinerja Entitas

Kinerja perusahaan tahun 2022 masih dipengaruhi oleh kondisi baik eksternal maupun internal antara lain:

1. Kondisi Eksternal:

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dirilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,31%. Dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dollar Amerika (USD) pada tanggal 31 Desember 2021 dengan kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp14.858,-/USD, inflasi rata-rata selama tahun 2021 \pm 4,97% dan suku bunga 5,50%.

2. Kondisi Internal:

Dari sisi SDM & Umum: Kompetensi SDM masih kurang dan Etos kerja kurang maksimal, disiplin pegawai masih kurang, belum sempurna sistem manajemen SDM, tidak ada penilaian kinerja pegawai berbasis Performansi, dan beberapa Aset masih bermasalah Hukum dalam proses penyelesaian.

Dari sisi Fasilitas Kerja: Proses pembuatan ERP dan penerapan aplikasi *Dashboard Invoice*, Portal PID, Absensi *mobile* simpeg, penggajian karyawan produksi menggunakan aplikasi simpeg dan aplikasi WMS terhadap *supply* bahan makan.

Dari sisi Operasional: Usaha masih rata-rata *capture*, Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) atas *supply* bahan makanan dan daftar absensi petugas kapal sebagai dasar pembuatan tagihan sering terlambat, proses perpanjangan kontrak atas pekerjaan dengan PT PELNI (Persero) sering terlambat di perpanjang, sehingga tidak dapat dilakukan penagihan.

Dari sisi Keuangan: *Cash flow* belum stabil, *collection* periode masih tinggi, sehingga posisi modal sering terganggu.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2022 Kinerja Entitas adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Entitas telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Djoko Sidik & Indra" sesuai dengan laporannya Nomor: LAI: 00026/2.0999/AU.1/05/0139-1/1/III/2022, 1 Maret 2022 dengan Pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".

- a. Laba bersih Konsolidasi setelah pajak tahun 2022 sebesar Rp25.925 juta atau 120,48% dari anggaran sebesar Rp 28.112 juta dan tercapai 502,42% dibanding tahun 2021 sebesar Rp5.160 juta.
- b. *Total Asset* per 31 Desember 2022 sebesar Rp333.651 juta atau naik 17,14% dari total *Asset* per 31 Desember 2021 sebesar Rp284.838 juta.
2. Tingkat Kesehatan Entitas yang dinilai berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 yang meliputi Aspek Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Administrasi. Sesuai Laporan Kantor Akuntan Publik "Djoko Sidik & Indra" Nomor: 00013/2.0999/NASSLEK/05/0139-2/1/II/2023, tanggal 28 Februari 2023 mencatat dengan kriteria SEHAT kategori AA dengan nilai skor 92.00.
3. Capaian kinerja Entitas berbasis *Key Performance Indicator (KPI)* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai Laporan Kantor Akuntan Publik "Djoko Sidik & Indra" 00014/2.0999/NASS-KPI/05/0139-2/1/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, Capaian Nilai Skor 100,77 Nilai Maksimal Skor 100,00.
4. *Market Share Growth* realisasi tahun 2022 sebesar 132,42%.
5. Rasio Entitas sebagai berikut:
 - a. Rasio Likuiditas:
 - *Current Rasio* tahun 2022 sebesar 190,23% dan ditahun 2021 sebesar 192,57%.
 - *Cash Ratio* tahun 2022 sebesar 16,92% dan ditahun 2021 sebesar 29,67%.
 - b. Rasio Aktivitas:
 - *Collection Period* tahun 2022 47 hari dan ditahun 2021 *Collection* Periode 76 hari.
 - *Total Asset Turn Over* tahun 2022 sebesar 139,88% dan ditahun 2021 123,50%.
 - c. Rasio Rentabilitas:
 - *Gross Profit Margin* tahun 2022 sebesar 16,64% dan ditahun 2021 sebesar 9,73% %.
 - EBITDA Margin tahun 2022 sebesar 10,82% dan tahun 2021 sebesar 9,64%.
6. Realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp18.352 juta atau 89,90% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.437 juta.

Kelangsungan Usaha

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih melambat di tahun 2023. Hal ini terjadi karena berbagai risiko seperti ketidakpastian tensi geopolitik, potensi terjadinya *extreme weather*, tingginya tingkat suku bunga, dan kebijakan fiskal yang relatif sempit.

Sehingga, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023. Kondisi global yang tidak kondusif tersebut tentu saja berpotensi berdampak terhadap situasi ekonomi di tanah air.

Namun demikian, Manajemen Perusahaan merasa optimis, kondisi global tidak berpengaruh signifikan pada fundamental perusahaan dan tidak mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

Karena berdasarkan Analisa Perusahaan, tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Perusahaan meyakini hal ini berdasarkan:

1. Tingkat Kesehatan Entitas yang dinilai berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 yang meliputi Aspek Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Administrasi. Sesuai Laporan Kantor Akuntan Publik "Djoko Sidik & Indra" Nomor: 00013/2.0999/NASSLEK/05/0139-2/1/II/2023, tanggal 28 Februari 2023 mencatat dengan kriteria SEHAT kategori AA dengan nilai skor 92.00.
2. Perusahaan tetap berhasil membukukan pendapatan usaha yang cukup baik di tahun 2022 yaitu sebesar Rp457.529 juta atau 98,54% dari anggaran sebesar Rp464.304 juta. Bahkan pendapatan usaha sebesar Rp457.529 juta tersebut meningkat 135,77% dibandingkan pendapatan usaha tahun 2021 yang masih sebesar Rp337.000 juta.
3. Rasio-rasio keuangan sebagaimana disajikan dalam ikhtisar kinerja keuangan menunjukkan, bahwa Perusahaan tetap dalam kondisi likuid, *solvable*, dan *profitable*.
4. Tidak terdapat gugatan hukum yang menuntut pailit terhadap Perusahaan.

Prospek Usaha

Di tengah terpaan tantangan global dan pertumbuhan ekonomi negara-negara besar yang melambat, Indonesia dan ASEAN menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan Indonesia disebut merupakan *the bright spot in the dark* di tengah ketidakpastian global.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh solid sebesar 5,3% (yoy). Pada sisi pengeluaran, konsumsi masih menjadi kontributor utama terbesar dan kinerja ekspor mampu tumbuh pada angka dua digit. Pada sisi lapangan usaha, sektor utama masih tumbuh kuat seperti manufaktur, perdagangan, transportasi, dan infokom. Di tahun 2023 mendatang pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan semakin membaik.

Berbagai *leading indicator* baik dari sektor riil dan eksternal, menunjukkan prospek ekonomi ke depan berada di *level* yang baik, tercermin dari nilai IKK yang masih optimis, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang masih dalam level aman.

Karena itu, Perusahaan merasa optimis bahwa di tahun 2023 dan ditahun-tahun selanjutnya, bisnis Perusahaan akan kembali membaik dan akan kembali bertumbuh dan berkembang dengan pesat, sebagaimana pada tahun-tahun sebelum pandemi.

Program Kepemilikan Saham oleh karyawan dan/atau Manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)

Sampai dengan tahun 2022, Saham Perusahaan dimiliki oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar 99,50% dan Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Pelni sebesar 0,50%.

Oleh karena itu tidak terdapat program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP).

Informasi Transaksi Material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan kepemilikan dalam kegiatan usahanya:

NO.	PIHAK-PIHAK BERELASI	SIFAT HUBUNGAN PIHAK-PIHAK BERELASI	TRANSAKSI
1	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Entitas induk	Hutang piutang
2	PT Pelita Bandar Nasional	Entitas anak	Penyertaan, hutang-piutang
3	PT PANI	Entitas anak	Penyertaan, hutang piutang





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perseroan berupaya untuk memberikan kontribusi positif kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menjalankan pengembangan usaha yang selaras dengan pengembangan masyarakat dan lingkungan.

BERKOMITMEN TURUT MENANGKAT KEMANDIRIAN LINGKUNGAN MASYARAKAT SEKITAR PERUSAHAAN

PT PID mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) terhadap warga masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan beroperasi, maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.

Perseroan berprinsip, tidak hanya beroperasi dengan membangun kinerja bisnis terbaik, namun Perseroan juga turut memikirkan lingkungan dan masyarakat di sekitar lingkup usahanya. Tanggung Jawab Sosial dari PT PID merupakan wujud dari komitmen berkesinambungan perusahaan ini untuk memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan, maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.

Karena itu PT PID memberikan perhatian yang besar terhadap implementasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, khususnya untuk memastikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam bisnis telah dilaksanakan dengan baik.

Perseroan berupaya mengelola program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara profesional, memiliki target terukur dan berkelanjutan, agar dapat memberikan dampak bermakna bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Perseroan memahami, bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya diukur dari pencapaian keuntungan, melainkan juga ditinjau dari kemampuan perusahaan mengusahakan kepentingan stakeholders-nya. Memandang kelangsungan atau keberlanjutan usaha merupakan prioritas utama bisnis. Hal ini dapat dicapai jika Perusahaan mampu membangun keseimbangan yang harmonis antara kepentingan komersial/profit, sosial dan lingkungan hidup.

Perwujudan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Perseroan pada setiap tahunnya terus berusaha untuk ditingkatkan, baik dari sisi kualitasnya, maupun kuantitasnya.

Seluruh program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dijalankan Perseroan didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN PENTING TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN

Dalam memaparkan isu-isu, data dan informasi terkini yang relevan dengan hak para Pemangku Kepentingan, PID melakukan *Focus Group Discussion* kepada para pemangku kepentingan. Adapun isu-isu penting pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi
2. Kepatuhan Lingkungan
3. Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja
4. Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepuasan Karyawan
6. Kesejahteraan Masyarakat

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAIK YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

Lingkup tanggung jawab sosial PID adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
2. Hak Asasi Manusia
3. Operasi Yang Adil
4. Lingkungan Hidup
5. Ketenagakerjaan
6. Pemenuhan Kepentingan Konsumen
7. Kemasyarakatan

ANGGARAN DAN REALISASI BIAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

PID memandang CSR sebagai sebuah investasi dalam jangka panjang, sehingga perencanaan harus diperhitungkan secara matang guna kelancaran realisasi semua program CSR dan pencapaian targetnya. Faktor penting dari pelaksanaan program CSR adalah tersedianya dana atau anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan CSR.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

PID memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. PID juga memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya, termasuk dalam hal pengangkatan calon pekerja.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni berkaitan dengan ketenagakerjaan meliputi perlakuan/tindakan diskriminasi, pengakuan dan jaminan bagi Serikat Pegawai, hak pemberian waktu kerja, cuti tahunan, izin istirahat jika melahirkan/keguguran atau sakit karena haid, izin menjalankan ibadah maupun izin meninggalkan pekerja jika ada sesuatu hal.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Terjalinnnya hubungan kerja yang harmonis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan dan Tidak diterimanya laporan terkait pelanggaran HAM.

Pelaksanaan Dan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Setiap tahun, PID senantiasa menyusun perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam program kerja yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PID (RKAP). Program kerja tersebut ditujukan untuk menjamin proses kerja di PID telah memperhatikan juga implementasi HAM antara lain pengalokasian biaya untuk kegiatan-kegiatan pegawai.

Waktu Kerja

1. Memperhatikan kelancaran operasional PID, kerja lembur dapat dilaksanakan dengan persetujuan bersama antara PID dengan Pegawai guna menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan untuk itu PID akan membayar upah kerja lembur kepada Pegawai.
2. Waktu Kerja Lembur disesuaikan dengan kebutuhan operasional Perusahaan dan Perusahaan menetapkan fasilitas lembur. Terhadap besarnya upah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.



3. Bagi pegawai *teller, customer service*, dan pegawai operasional lainnya pada jama-jam istirahat tetap melayani konsumen, selanjutnya waktu istirahat dapat diatur secara bergilir dengan rekan sekerja lainnya.
4. Khusus bagi pegawai wanita yang menyusui, telah diberikan kesempatan yang sepatutnya untuk melakukan laktasi dan atau menyusui anaknya selama waktu kerja.

Izin Pernikahan

1. Bagi pegawai yang akan melangsungkan pernikahan harus mengajukan izin tertulis kepada Direksi melalui unit kerja dengan ketentuan bagi pegawai pria untuk istri pertama, bagi pegawai wanita menjadi istri pertama dengan menyebutkan identitas calon istri/suami.
2. Permohonan izin tersebut harus melampirkan Surat Keterangan Belum Menikah atau yang bisa dipersamakan dari kantor kelurahan/kepala desa dari instansi berwenang lainnya bagi pegawai atau calon yang memiliki status belum pernah melakukan perkawinan.
3. Permohonan izin secara tertulis diajukan selambat-lambatnya 15 hari sebelum melaksanakan pernikahan.

Cuti Tahunan

1. Cuti tahunan diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja di Perusahaan selama 1 (satu) tahun secara terus menerus.
2. Selama menjalani masa cuti tahunan, Pegawai tetap menerima gaji penuh.
3. Lamanya cuti tahunan ditentukan berdasarkan jabatan Pegawai yang diatur oleh PID.
4. Ketentuan pelaksanaan cuti tahunan diatur oleh PID.
5. Hak cuti tahunan dilaksanakan berdasarkan permintaan pegawai dan/atau penugasan oleh Perusahaan dan disesuaikan dengan beban kerja/kebutuhan PID.
6. Bagi pegawai yang mengajukan rencana cuti tahunan namun ditolak oleh kepala unit kerja yang bersangkutan, maka diwajibkan kepada kepala unit dimaksud untuk memberikan alasan penolakannya secara tertulis dan ditembuskan ke unit kerja *Human Capital*.

Izin Menjalankan Ibadah

PID senantiasa memberikan ijin kepada Pegawai untuk menjalankan ibadah yang ketentuannya diatur oleh PID, termasuk izin untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Izin Meninggalkan Pekerjaan

Setiap pegawai yang berhalangan hadir di kantor karena alasan apapun wajib memberitahukan hal tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan pada hari yang bersangkutan. Dalam hal pemberitahuan secara lisan, harus disusun pemberitahuan secara tertulis kepada atasannya paling lambat pada kesempatan pertama masuk kantor. Izin meninggalkan pekerjaan diberikan pada saat:

1. Peristiwa khusus yaitu pernikahan pegawai, pegawai menikah anak, suami/istri/anak/menantu/orang tua/ mertua/anggota dalam satu rumah meninggal dunia, kelahiran anak, istri pegawai mengalami keguguran kandungan, khitanan anak, dan lain-lain.
2. Sakit, yaitu sakit dengan surat dokter selama maksimum 3 (tiga) hari, sakit tanpa surat dokter selama 1 (satu) hari dan sakit dengan rawat inap.
3. Keperluan pribadi yang penting, mendadak dan tidak dapat diwakilkan.
PID telah mengatur ketentuan pelaksanaan ijin meninggalkan pekerjaan.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Dengan memberikan izin cuti dan menjamin pelaksanaan ibadah masing-masing pegawai, berdampak pada peningkatan kinerja karyawan serta kesungguhan dalam bekerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM, PID dapat meningkatkan keharmonisan dalam kegiatan operasional PID. Selain itu, para karyawan akan merasa nyaman berada di lingkungan PID. Hal ini berdampak pada meningkatnya survei kepuasan karyawan. Pada tahun 2021, PID belum mendapatkan penghargaan terkait hak asasi manusia.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi Yang Adil

Sebagai salah satu perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PID memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-

praktik operasi yang adil. PID telah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur dilaksanakan operasi yang adil diantaranya kebijakan pengendalian internal, *Whistleblowing System (WBS)*, *Code of Conduct*, dan kebijakan gratifikasi. Kebijakan tersebut khususnya ditujukan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat. Ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang ditekankan oleh PID saat ini adalah pencegahan benturan kepentingan, penerapan anti korupsi, kompetisi yang sehat, dan pencegahan perilaku insiders. Penerapan anti korupsi diwujudkan melalui pelaksanaan *WBS, Code of Conduct* dan Kebijakan Gratifikasi.

Rumusan Dan Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi Yang Adil

Lingkup kegiatan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil meliputi pencegahan benturan kepentingan, implementasi *Whistleblowing System* dan *Code of Conduct*, larangan perilaku insiders serta hubungan dengan organisasi lain.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi Yang Adil

PID senantiasa menargetkan dalam perencanaan tahunannya untuk menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dengan tegas sesuai kebijakan PID dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi Yang Adil

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang secara konsisten dilaksanakan oleh PID meliputi hal-hal berikut ini:

Pencegahan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interests*)

PID melalui penerapan kode etik telah menegaskan kembali Larangan Pencegahan/Anti Korupsi dan Gratifikasi bagi seluruh jajaran PID. Hal ini terkait dengan komitmen bersama sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan, yang antara lain mengatur mengenai *conflict of interest*, larangan penyalahgunaan jabatan dan pengaturan integritas karyawan Perusahaan sangat menyadari perlunya menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan konsumen, rekanan dan seluruh

stakeholder dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tindakan yang dikategorikan sebagai gratifikasi dan menciptakan budaya anti korupsi.

Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon) komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Implementasi *Whistleblowing System*

Dalam rangka penyelenggaraan operasional Perusahaan yang sehat dan penerapan tata kelola yang baik, seluruh pegawai/pejabat PID wajib melaporkan setiap dugaan tindakan penyimpangan yang terjadi di lingkungan PID. Kebijakan *whistleblowing* diimplementasikan untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat PID untuk melaporkan *fraud* yang terjadi. Lingkup pengaduan meliputi:

- a. Perbuatan *fraud*.
- b. Pelanggaran kode etik antara lain meliputi:
 - Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau dokumen.
 - Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar PID.
 - Menginformasikan/mengungkapkan rahasia konsumen dan PID.
 - Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan/atau mengakibatkan kerugian PID.
 - Penyelewengan uang/kas PID.
 - Penggelapan aset dan/atau inventaris PID.
 - Pemasaran.
 - Perbuatan Asusila.

Capaian Dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi Yang Adil

Komitmen PID dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil telah meningkatkan kepercayaan para stakeholders kepada PID. Dengan meningkatnya kepercayaan dari stakeholder diharapkan dapat meningkatkan

kinerja PID. Sampai dengan tahun 2021, Perusahaan tidak dikenakan sanksi dalam perkara hukum serta diakuinya kinerja Perusahaan oleh pihak eksternal. Sampai dengan Desember 2021, PID belum memiliki penghargaan terkait operasi yang adil.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya. Beberapa program peduli lingkungan telah dilaksanakan PID. Program Peduli lingkungan tersebut dibagi kedalam dua kelompok, yaitu: program internal dan *external*.

Sebagai salah satu penerapan keuangan berkelanjutan, PID telah memiliki beberapa kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, baik di internal maupun eksternal.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Terjadinya efisiensi di lingkungan internal PID sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan profit kepada Perusahaan dengan menekan biaya operasional. Sedangkan untuk kegiatan eksternal, dapat dijalin hubungan yang baik antara masyarakat dan PID, sehingga citra PID di masyarakat dapat terjaga.

Kegiatan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Kegiatan Operasional Perusahaan

Wujud dukungan PID terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup tercermin dalam setiap kegiatan Perusahaan baik itu operasional di kantor pusat maupun kegiatan bisnisnya, antara lain sebagai berikut.

Peduli Lingkungan Internal

PID terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Perusahaan termasuk kinerja kami pada lingkungan. Oleh sebab itu, PID senantiasa menerapkan peduli lingkungan di lingkungan operasional PID. Perusahaan menyadari, efisiensi energi dan air tidak hanya baik untuk keberlanjutan lingkungan, namun juga sebagai salah satu upaya penghematan biaya perusahaan dalam menghadapi perlambatan ekonomi. PID membuat kebijakan terkait lingkungan internal yaitu melalui program PID *Go Green*. Melalui program PID *Go Green* ini, seluruh pegawai diminta untuk peduli akan 5 (lima) hal, yakni:

- Gunakan air sehemat mungkin;
- Nyalakan listrik jika diperlukan;
- Tanam pohon sebanyak mungkin;
- Gunakan bahan yang mudah didaur ulang;
- Buang sampah pada tempatnya.

Selain hal tersebut, manajemen telah menentukan kebijakan antara lain hemat penggunaan listrik terutama di gedung kantor pusat PID dimana seluruh bagian gedung akan dimatikan saat jam 18.00 sore untuk penghematan. Selain itu dalam melaksanakan rapat sudah jarang digunakan kertas dalam menduplikasi bahan rapat melainkan dengan presentasi melalui TV atau *Infocus*, selain itu dalam penggunaan kertas juga diminimalisasi dengan penggunaan *email* dan kertas yang sudah terpakai untuk dimanfaatkan sisi yang masih bisa digunakan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

K3 (Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) adalah sebuah konsep untuk mencapai kondisi keselamatan yang bebas dari kecelakaan dan kerusakan dimana para karyawan bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi peralatan, keselamatan, dan kondisi karyawan sebagai pekerjaannya. Yang paling utama adalah bagaimana perusahaan membuat sistem dan kebijakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja biasanya adalah:

1. *Unsafe Action*: Tindakan Membahayakan
2. *Unsafe Condition*: Kondisi Membahayakan
3. *Factor X*: Faktor diluar kemampuan manusia

Lingkup Dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Lingkup kegiatan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja antara lain meliputi berbagai program ketenagakerjaan. Selain itu, dalam lingkup kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja, Perusahaan memiliki program untuk memberikan fasilitas kesehatan serta memberikan jaminan keselamatan kerja kepada seluruh karyawan.

Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Semua karyawan PID dapat memahami prosedur dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga jika pada suatu saat nanti terjadi kondisi *force majeure*, maka semua karyawan dapat melakukan tindakan yang benar demi keselamatan diri dan lingkungan (*safety officer*). Di sinilah pentingnya keberadaan *safety officer* yang bertanggung jawab menakar risiko dan memberikan solusi atas permasalahan K3.

Kegiatan Dan Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Kegiatan Dan Dampak Kuantitatif Kegiatan Ketenagakerjaan Dan Kesehatan

Kesetaraan Dalam Program Pendidikan Dan Pelatihan pada tahun 2021 dilakukan penyempurnaan jalur karir berbasis manajemen talenta dengan penyempurnaan aturan dan kebijakan jalur karir pegawai atau *Career Path Management*. Pengembangan sistem *E-learning* yang terus dilanjutkan dalam pengelolaan *knowledge management*, Pengembangan *Learning Center* yang menjadi wadah bagi pegawai dalam pembelajaran baik melalui *e-learning* maupun *inhouse training* dengan menyiapkan kurikulum dan silabus (pendidikan yang terprogram) serta instruktur internal yang handal di bidangnya. *Database* kepegawaian juga terus dilakukan penyempurnaan sistem informasi mengenai kepegawaian.

Selama tahun 2021, PID telah menyelenggarakan pelatihan/training baik itu yang berupa *inhouse* dan Pelatihan Ekstern Dalam Negeri yang diikuti oleh pegawai. PID memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengoptimalkan potensi diri dan keahliannya dengan mengikuti berbagai pendidikan, kursus dan pelatihan. Seluruh program pelatihan dan pengembangan SDM yang diselenggarakan oleh PID disesuaikan dengan standar kompetensi yang diinginkan, guna memenuhi kebutuhan bisnis dan suksesi SDM PID di masa depan.

Program Kesejahteraan Pegawai

PID senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan berusaha memfasilitasi kebutuhan pegawai. Program peningkatan kesejahteraan pegawai yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, antara lain melalui materi maupun nonmaterial. Kesejahteraan pegawai secara material berkaitan langsung dengan prestasi pegawai, dan dapat diberikan berupa kenaikan gaji pegawai, kenaikan tunjangan pegawai, pemberian bonus, serta memberikan penghargaan pegawai.

Kesempatan Bekerja yang Adil dan Merata

PID menerapkan prinsip non diskriminasi dalam pengelolaan SDM. Rekrutmen pegawai dilakukan secara transparan dan fair tanpa adanya nepotisme dari kalangan internal dan eksternal. Proses rekrutmen pegawai mempertimbangkan kesesuaian kompetensi calon pegawai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan.

PID menjamin kesetaraan gender dan kesempatan kerja yang luas bagi semua pegawai tanpa memandang jenis kelamin, suku maupun agama dan kepercayaan pegawai.

Reward System

Reward System memiliki bagian yang penting dalam memotivasi produktivitas dan meningkatkan *retention* SDM. Untuk itu, sistem penggajian dan kesejahteraan terus di-*review* dengan mempertimbangkan prinsip internal *equity* dan *external competitiveness*. Unsur-unsur penggajian adalah: Gaji pokok dan tunjangan tetap. Selain remunerasi, sesuai dengan kemampuan Perusahaan terus berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi pegawainya sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi, diantaranya dengan memberikan fasilitas dan tunjangan sebagai berikut:

1. Fasilitas Perawatan Kesehatan baik Jaminan Perusahaan dan BPJS Kesehatan
2. Bekal Cuti Tahunan & Cuti Besar
3. Bantuan Pakaian Dinas
4. Uang santunan kematian
5. Jasa Produksi
6. THR
7. Pembayaran Penghargaan Masa Pengabdian 15, 25 dan 30 Tahun
8. Jaminan Hari Tua (BPJS)
9. Manfaat Pensiun
10. Tunjangan Hari Tua
11. Tunjangan Pajak

Cuti Tahunan dan Cuti Besar

Setiap pegawai di PID berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja setiap tahun. Selain itu Pegawai juga berhak atas istirahat panjang/cuti besar setelah menjalani masa dinas sebagai pegawai tetap selama setiap 5 (lima) tahun sekali, selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- Kesetaraan Gender dalam Kesempatan Kerja
Dalam melakukan perekrutan pegawai, PID senantiasa memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya. Demikian juga dalam hal pengangkatan calon pekerja, PID tidak melakukan diskriminasi atas alasan apapun karena mendasarkan keputusannya pada hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.
- Kesetaraan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan
Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai, PID secara berkesinambungan menyelenggarakan beberapa metode program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional Perusahaan. PID menjamin bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan.
- Penggunaan Tenaga Kerja Lokal
Perusahaan selalu berupaya untuk melaksanakan praktik ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain praktik kesetaraan gender dalam kesempatan bekerja, Perusahaan juga

senantiasa menggunakan tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama dalam seluruh kegiatan operasional.

- Remunerasi
PID senantiasa mentaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional PID. Terkait dengan remunerasi, PID senantiasa berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.
- Kegiatan Kesejahteraan Pegawai
PID senantiasa memerhatikan kesejahteraan seluruh pegawainya agar dapat saling bersinergi demi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Program peningkatan kesejahteraan pegawai diberikan baik secara material maupun non-material. Program yang bersifat material merupakan program kesejahteraan yang berkaitan langsung dengan prestasi pegawai dan kompensasinya dapat diberikan dalam bentuk uang transportasi, uang makan, uang pensiun, tunjangan hari raya, uang jabatan, bonus, uang pendidikan, uang pengobatan, pakaian dinas, uang cuti, dan uang kematian. Sedangkan program yang bersifat non-material merupakan program kesejahteraan pegawai melalui pemberian fasilitas dan pelayanan kepada seluruh pegawai PID tanpa melakukan diskriminasi.
- Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan
Sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, maka PID telah menyusun suatu mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis Kegiatan Kreatifitas, Bakat Olah Raga dan Seni Pegawai

Kegiatan Keselamatan Kerja

PID senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman bagi seluruh pegawai. Terkait hal tersebut, maka Perseroan telah

menyusun pedoman/panduan dalam menjaga kemandirian dan keselamatan jiwa seluruh pegawai di lingkungan kerja PID. Prosedurnya terfokus pada kesiapan peralatan dan sarana keselamatan gedung, kesiapan pelaksanaan penyelamatan jiwa manusia, serta pelatihan kepada pegawai. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan inspeksi/pemeriksaan terhadap peralatan proteksi kebakaran gedung secara rutin untuk memastikan bahwa peralatan kebakaran tersebut dapat berfungsi dengan baik. Pengecekan untuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dilakukan oleh Petugas Security setiap 1 (satu) bulan sekali sedangkan untuk pemeriksaan terhadap Alat Pemadam Api Tersistem (APAT) dan Fire Alarm dilakukan oleh pengelola gedung yang bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Melakukan standardisasi spesifikasi, penempatan perangkat keselamatan gedung dan jalur evakuasi yang dimasukkan dalam buku panduan standar renovasi gedung kantor yang disusun bersama dengan konsultan perencanaan yang akan dilakukan review setiap 1 (satu) kali atau sesuai kebutuhan.
3. Menerapkan standar operasional dalam rangka pengamanan gedung kantor pada saat jam kerja dan pada saat cash supply dengan menggandeng aparat kepolisian.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Keselamatan Kerja

Sepanjang tahun 2022, PID tidak mencatat adanya kecelakaan kerja (zero accident) dalam kegiatan operasional Perseroan di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan prosedur dan standar keamanan kerja yang berlaku.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Ketenagakerjaan Dan Kesehatan

Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan untuk memastikan dan menjamin aspek kesehatan dalam rangka menjaga produktivitas karyawan. Keseluruhan upaya Perusahaan berdampak pada meningkatnya produktivitas karyawan.

Kegiatan Dan Dampak Kuantitatif Kegiatan Keselamatan Kerja

Tugas safety officer meliputi penentuan jam kerja aman bagi karyawan, mengecek kondisi site, hingga

inspeksi peralatan kerja secara kontinyu setiap bulan. Dan juga diadakan simulasi setahun sekali, dimana pada keadaan yang darurat dan perlu evakuasi, lalu dilihat apakah para karyawan aware atau tidak dengan bahaya. Semua orang bekerja pasti ada risikonya. Meski bekerja di dalam ruangan kantor, bisa saja kecelakaan atau sakit. Kesadaran karyawan sama saja baik di kantor maupun di lapangan. Tapi karyawan yang berada di kantor, selalu diingatkan dan disosialisasikan. Ini karena karyawan yang berada di dalam kantor, tempatnya tenang, adem, sehingga tidak sedikit yang menyepelekan K3.

Baik bekerja di dalam maupun di luar kantor, risiko akan tetap ada. Tanda-tanda peringatan dan fasilitas keselamatan gedung kantor Menara Dang Merdu Perusahaan telah dipasang di dalam ruangan, seperti emergency exit, alat pemadam kebakaran, panel-panel tanda bahaya, dan sebagainya. Gedung mesti mempunyai perlengkapan pemadam kebakaran berbentuk hidran air didalam ataupun diluar gedung, sprinkler atau alat yang bisa menyemprotkan air apabila suhu meraih 68 derajat celsius.

Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Perkantoran

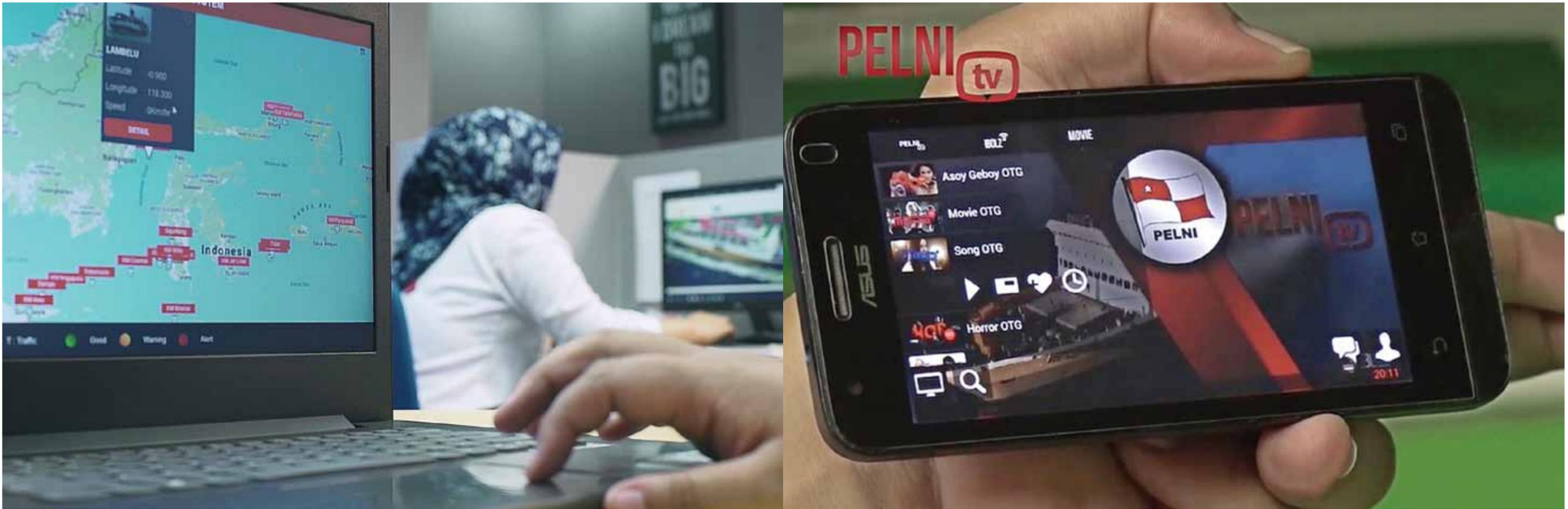
Kementerian Kesehatan mengeluarkan regulasi terbaru terkait Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, peraturan tersebut dimuat di dalam Permenkes No. 48 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada bulan September 2016. Dengan dikeluarkan peraturan ini, maka standar keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran dapat ditingkatkan. Peraturan Standar K3 Perkantoran ini ditujukan sebagai acuan bagi pemimpin Kantor dan/atau pengelola gedung dalam mengelola Perkantoran untuk mewujudkan kantor yang aman, sehat, dan nyaman sehingga karyawan dapat bekerja dengan selamat, sehat, bugar dan tetap produktif.

Perkantoran adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran baik yang bertingkat maupun yang tidak bertingkat. Di dalam Permenkes No. 48 Tahun 2016 mewajibkan pengelola gedung atau pemimpin kantor untuk menyelenggarakan K3 Perkantoran dengan membentuk dan mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran dan menerapkan standar K3 Perkantoran.



LAPORAN TEKNOLOGI INFORMASI

PT PID percaya bahwa teknologi informasi (TI) saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis Perseroan.



PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI GUNA Mendukung KEMAJUAN BISNIS PERUSAHAAN

Perkembangan teknologi dari pengaruh era globalisasi sekarang ini begitu pesat, yang diiringi dengan perkembangan sistem informasi yang berbasis teknologi. Hal ini telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam berbagai bidang.

Teknologi informasi dalam hal ini merupakan salah satu tiang penopang keberhasilan dalam era globalisasi. Pentingnya teknologi informasi dalam bisnis adalah untuk memberikan dukungan yang efektif atas strategi bisnis perusahaan, agar dapat memperoleh keunggulan yang kompetitif.

Teknologi informasi dapat mengembangkan berbagai produk, layanan, dan kemampuan yang memberikan keunggulan besar atas tekanan kompetitif dalam pasar global.

Teknologi informasi dapat mengembangkan berbagai produk, layanan, dan kemampuan yang memberikan keunggulan besar atas tekanan kompetitif dalam pasar global. Karena itulah, salah satu cara agar Perseroan dapat bersaing adalah dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang handal.

Tersedianya sistem teknologi informasi yang memadai, tentunya sudah merupakan tuntutan atau kebutuhan dari perusahaan, tak terkecuali PT PID. Secara strategis, sistem teknologi informasi juga dapat berperan membantu kelancaran berbagai proses administrasi dan pengelolaan perusahaan.

Perkembangan teknologi informasi semakin berkembang pesat dan persaingan bisnis yang semakin kompetitif mengharuskan Perseroan untuk menata dan membenahi kualitas layanan yang berbasis teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan masyarakat

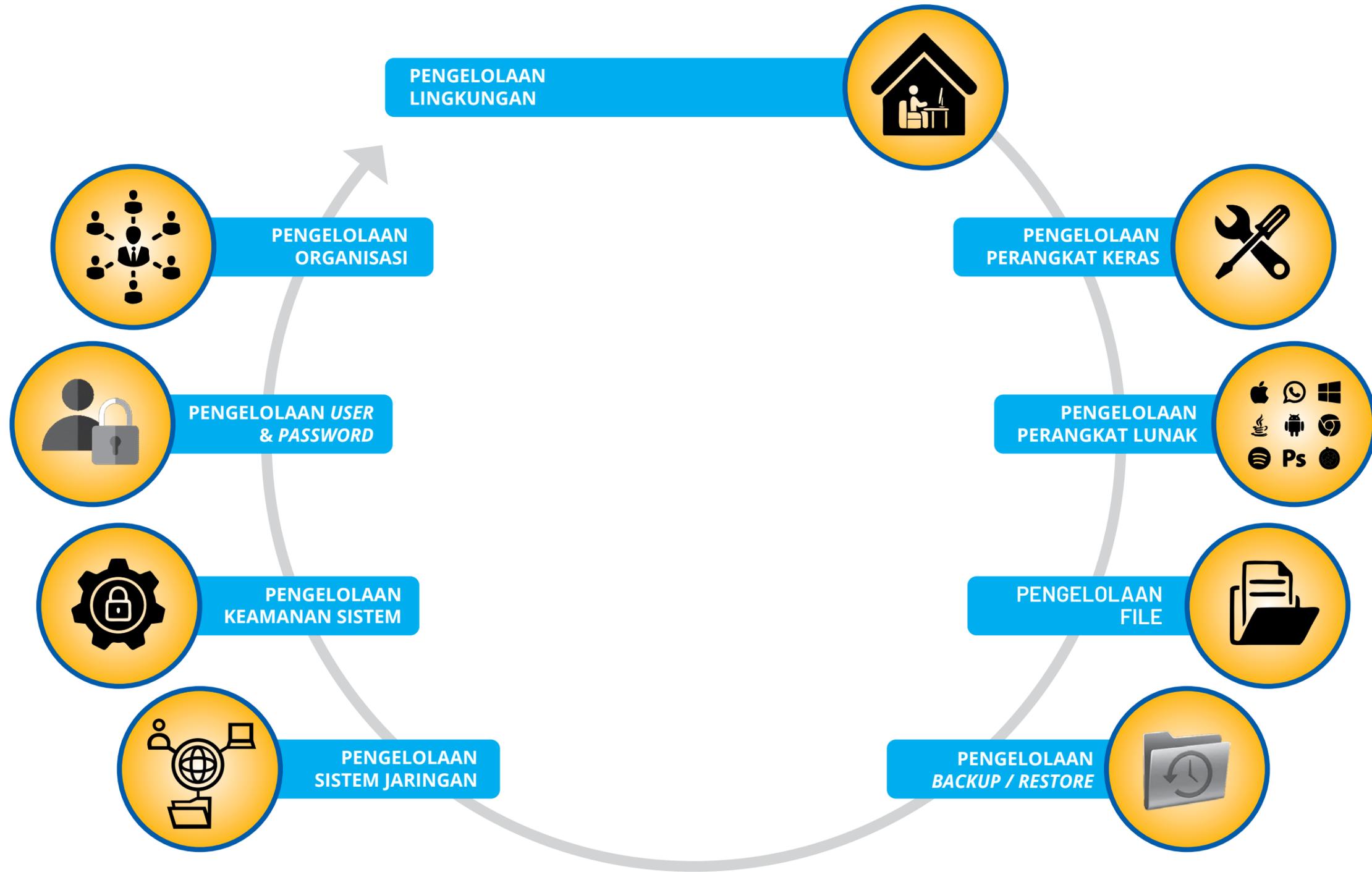
Karena itu, PT PID sangat memandang penting peran sistem teknologi informasi dalam keberlangsungan usahanya selama ini. Karena itu, Perseroan secara berkala terus berusaha menyempurnakan sistem teknologi informasi yang dipergunakannya selama ini.

PT PID juga selalu terus mengamati perkembangan terbaru (up date) dari sistem teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kelancaran proses administrasi, maupun membantu mengoptimalkan program-program bisnis dari Perseroan.

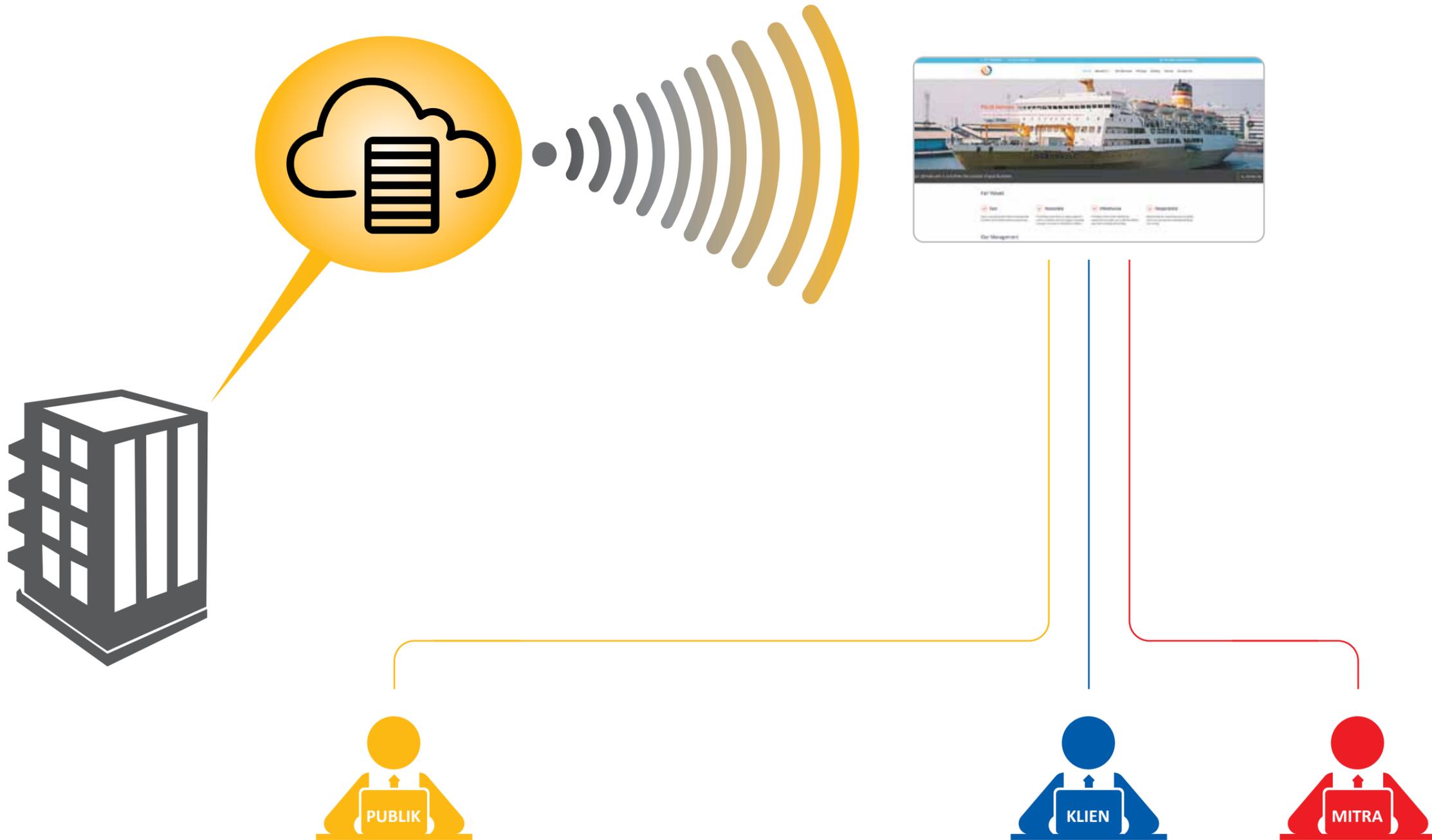
Dan apabila sistem teknologi informasi terbaru tersebut dipandang layak untuk diaplikasikan di Perseroan, PT PID tidak akan ragu-ragu untuk bisa menerapkan sistem baru tersebut, guna mengejar pertumbuhan bisnis Perseroan yang lebih bagus lagi untuk ke depannya.

Pada tahun 2022 PID terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan teknologi informasi di perusahaan.

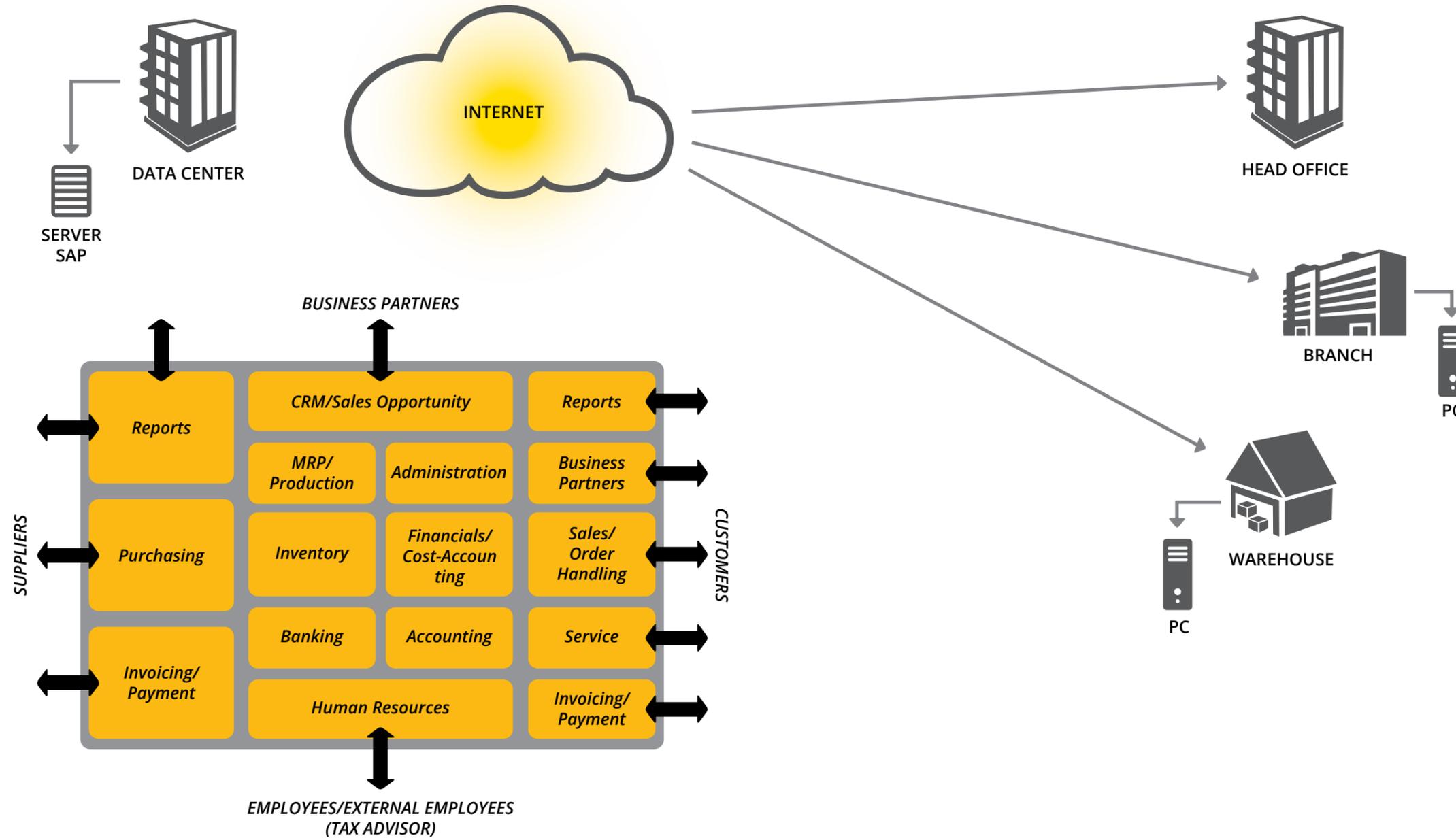
**TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PT PID – IT GOVERNANCE**



WEBSITE CORPORATE DAN SOSIAL MEDIA: INSTAGRAM @PELNISERVICES



APLIKASI SISTEM KEUANGAN SAP

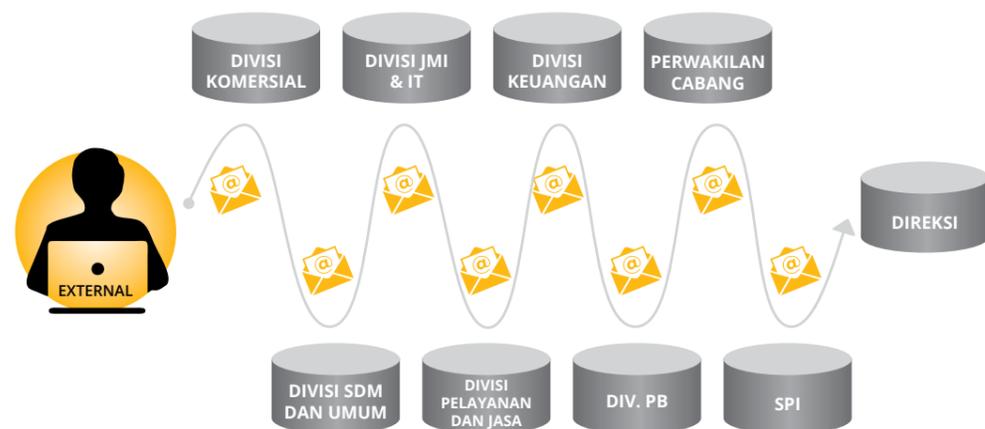


Teknis Tata Kelola Surat Elektronik (E-Mail)

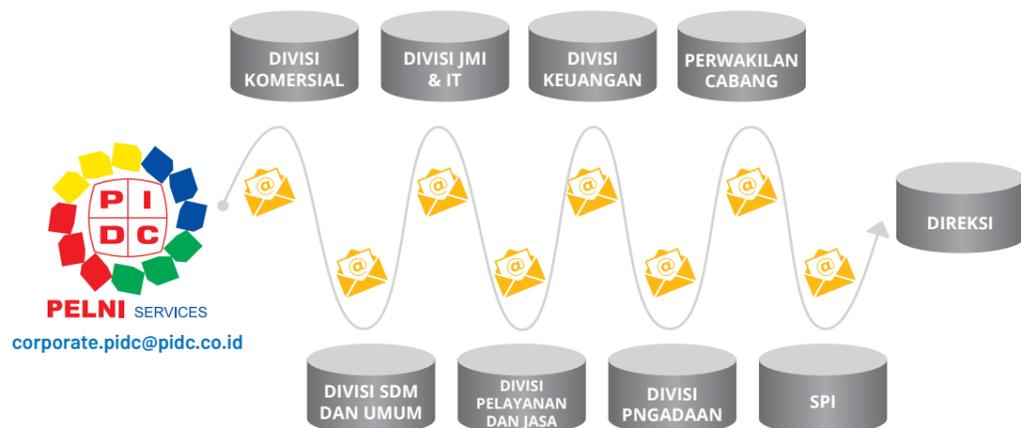
1. User external kirim email ke alamat corporate.pidc@pidc.co.id sebagai main email PT PID



Atau User external kirim email langsung ke account email divisi unit kerja/account email Direksi.



2. PIC email corporate.pidc@pidc.co.id share email ke masing-masing email divisi unit kerja dan email Direksi.

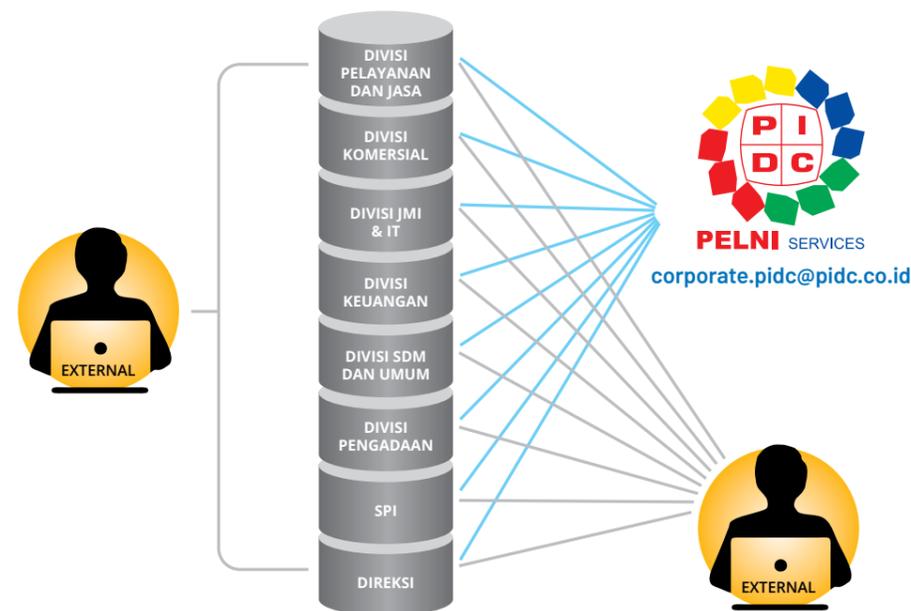


Catatan:

PIC *back Up* berkala *attachment email* masuk ((24 Hour), dan di kelola rapih sebagai database/dokumentasi dengan media *external HDD (hardisk)*. PIC diberikan hak *acces* pada *account email* direksi (direktur Utama dan Direktur Operasi).

System Response

3. Pada saat merespon *email* pihak *user external* tersebut tiap Divisi unit kerja atau Direksi diperkenankan merespon langsung melalui *account email* Divisi / Direksi masing-masing di cc: ke *email corporate.pidc@pidc.co.id (main email)*.



Dari *account Gmail* ptPID@gmail.com ke *account email corporate.pidc@pidc.co.id*

1. Jika pihak *user external* kirim email ke *account Gmail* pada saat merespon harus via *email corporate.pidc@pidc.co.id*.
2. Tidak diperkenankan merespon *email* pihak ke-3 melalui *account Gmail*.
3. Selama masa peralihan tersebut, *account Gmail* hanya untuk menerima *email* pihak ke-3.
4. *Account Gmail* dapat digunakan untuk merespon apabila terjadi kendala, dan proses *maintenance* pada *account corporate*.
5. *Account Gmail* tetap dapat di *acces* oleh masing-masing divisi unit kerja.
6. *Account personal domain corporate.pidc@pidc.co.id* digunakan untuk pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
7. Hubungi dan laporkan bila ada kendala pada saat pelaksanaannya ke *Staff IT*.

PENILAIAN SKOR KPI PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI

Perspektif Kepemimpinan Teknologi

Peta perspektif Kepemimpinan Teknologi merupakan pengembangan dan implementasi system IT dan gambaran indikator-indikator yang ada pada perspektif Kepemimpinan Teknologi. *Lag indicator* yang ingin dicapai pada perspektif ini sebagai berikut:

1. Implementasi System ERP Tahap II di Kantor Pusat dan 9 Cabang Supply

Untuk mengukur peningkatan dan pengembangan layanan berbasis IT (Aplikasi ERP tahap II).

2. Mengembangkan Sistem Untuk Reservasi Layanan Pariwisata

Untuk mengukur jumlah reservasi kapal wisata pinisi melalui pemesanan *online*.

Formula dan Mutu Proses Perspektif Kepemimpinan Teknologi

1. Implementasi System ERP Tahap II di Kantor Pusat dan 9 Cabang Supply

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Lokasi yang Terimplementasi}}{\text{Jumlah Kantor Pusat dan Cabang}} \times 100\%$$

Polaritas: Nilai semakin tinggi, semakin baik

2. Pengembangan Sistem Untuk Reservasi Layanan Pariwisata

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Pemesanan Melalui Sistem Reservasi Online}}{\text{Total Pemesanan 26}} \times 100\%$$

Polaritas: Nilai semakin tinggi, semakin baik

Penilaian Skor KPI Perspektif Kepemimpinan Teknologi

1. Implementasi System ERP Tahap II di Kantor Pusat dan 9 Cabang Supply

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Lokasi yang Terimplementasi}}{\text{Jumlah Kantor Pusat dan Cabang}} \times 100\%$$

$$\frac{10}{10} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Realisasi implementasi system ERP tahap II telah dilakukan pada Kantor Pusat dan 9 Cabang Supply. Rasio jumlah lokasi yang terimplermentasi dengan jumlah Kantor Pusat dan Cabang sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga diperoleh perhitungan nilai capaian skor KPI sebesar 7 (sama dengan bobot yang ditetapkan).

2. Pengembangan Sistem Untuk Reservasi Layanan Pariwisata

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Pemesanan Melalui Sistem Reservasi Online}}{\text{Total Pemesanan}} \times 100$$

$$\frac{44}{44} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Realisasi pengembangan sistem untuk reservasi layanan pariwisata telah dilakukan melalui aplikasi *whatsapp*, *instagram* dan *google spreadsheet*. Rasio jumlah pemesanan melalui sistem reservasi *online* dengan total pemesanan sebesar 100% atau meningkat 11,11% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, sehingga diperoleh perhitungan nilai capaian skor KPI sebesar 8,89. Dengan demikian nilai capaian maksimalnya sebesar 110% yang diukur dengan polaritas maksimal. Adapun bobot yang ditetapkan sebesar 8,00, maka nilai Skor KPI untuk indikator Index Presentase Kesesuaian Supply Permakanan sebesar 8,80 (sama dengan batas maksimal 110% dari bobot yang ditetapkan).

Simpulan Hasil Penilaian Skor KPI Perspektif Kepemimpinan Teknologi

Realisasi skor KPI untuk Perspektif Kepemimpinan Teknologi sebesar 15,80 atau 5,33% melampaui target bobot yang ditetapkan sebesar 15. Pelampauan skor KPI tersebut dipengaruhi realisasi pengembangan *system* untuk reservasi layanan pariwisata melalui *online* capaiannya 100% atau meningkat 11,11% dari target 90%.

Berikut rekapitulasi penilaian capaian target dan skor KPI Perspektif Kepemimpinan Teknologi tahun 2022.

PERSPEKTIF	INDIKATOR	URAIAN	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN 2022	PERHITUNGAN SKOR KPI	NILAI MAKSIMAL SKOR KPI 2022
					2022	2022			
		KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI							
	8	Implementasi System ERP Tahap II di Kantor Pusat dan 9 Cabang Supply	%	7,00	100	100	100	7,00	7,00
	9	Pengembangan Sistem Untuk Reservasi Layanan Pariwisata	%	8,00	90	100,00	111,11	8,89	8,80
		Jumlah Bobot & Skor Prespektif Kepemimpinan Teknologi		15,00				15,89	15,80



LAPORAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu yang memegang peranan penting dalam kelangsungan bisnis perusahaan. Dengan manajemen yang bagus dan terarah terkait pengelolaan SDM, akan menghasilkan sebuah kinerja yang positif bagi kelangsungan usaha, dan unggul di tengah persaingan yang semakin ketat.

PERSEROAN BERKOMITMEN MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETEN DAN MEMILIKI ETOS KERJA BAIK

PT PID berkomitmen untuk senantiasa menaruh perhatian penuh terhadap peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawainya. Hal ini karena keberadaan SDM yang kompeten dan memiliki etos kerja baik, merupakan salah satu faktor kunci untuk kesuksesan bisnis perusahaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu yang memegang peranan penting dalam kelangsungan bisnis perusahaan. Dengan manajemen yang bagus dan terarah terkait pengelolaan SDM, akan menghasilkan sebuah kinerja yang positif bagi kelangsungan usaha, dan unggul di tengah persaingan yang semakin ketat.

PT PID sebagai perusahaan yang terus bertumbuh dan berkembang dengan sangat pesat, seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan yang semakin membesar, maka untuk bisa menjalankan dengan optimal pertumbuhan tersebut, hal itu membutuhkan peran serta menyeluruh dari segenap komponen sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki perusahaan.

Bagi PT PID perkembangan signifikan bisnis yang dijalankannya memunculkan tuntutan terhadap kecukupan SDM, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun dari segi kompetensi (kualitas).

Karena itu, Perseroan sangat menganggap penting tentang SDM ini. Karena Perseroan menyadari, bahwa SDM sangat berpengaruh terhadap kesuksesan perusahaan ini ke depannya.

Dalam pencapaian tujuannya, SDM mempunyai fungsi mengelola input yang dimiliki Perseroan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Pengembangan SDM di lingkungan Perseroan didasari pada sebuah filosofi yaitu membentuk SDM yang disiplin, profesional, dan *visioner*. Pengembangan SDM tersebut dititikberatkan pada peningkatan skill, knowledge, dan attitude yang implementasinya dilakukan melalui pelaksanaan program pelatihan yang bersifat teknis, manajerial, dan kepemimpinan, *on job training*, penugasan (mutasi dan rotasi), dan promosi jabatan.

PT PID sangat menyadari, mengelola SDM sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan menjadi sangat penting. Sebab, seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berubah, mengakibatkan persaingan usaha menjadi semakin ketat. Untuk itu dibutuhkan sebuah organisasi yang solid dan siap dalam menghadapi setiap perubahan yang terus terjadi dalam dunia bisnis.

Mengingat sangat pentingnya keberadaan SDM bagi Perseroan, karena itu Perseroan selama ini secara rutin dan kontinyu terus melakukan berbagai kegiatan pembinaan bagi para SDM, guna meningkatkan kapabilitas, dan profesionalisme. SDM PT PID secara berkala dikirim guna mengikuti pelatihan-pelatihan dari berbagai bidang atau disiplin ilmu yang terkait dengan bisnis perusahaan maupun manajemen pengelolaan perusahaan.

Pembinaan SDM secara internal memang selalu dilakukan untuk semakin menghasilkan output kerja yang optimal. Di sisi lain, Perseroan juga berusaha untuk membuat para SDM-nya didalam melaksanakan pekerjaannya dalam keadaan yang tenang dan nyaman. Guna mengejar hal tersebut, Perseroan menerapkan remunerasi yang pantas, dengan memperhitungkan skill, maupun masa kerja dari SDM tersebut. Karena Perseroan meyakini, dengan suasana kerja atau lingkungan kerja yang menyenangkan akan membuat karyawan bekerja secara lebih optimal

PT PID menyadari SDM merupakan aset strategis paling berharga guna mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam pengelolaan SDM, agar terbentuk hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dengan karyawan maupun antar sesama karyawan, kami bersama dengan wakil karyawan semua satuan kerja telah memiliki Peraturan Perusahaan yang mengacu pada Induk Perusahaan.

Perseroan memperlakukan SDM sebagai aset yang paling berharga secara adil dan menghargai setiap kontribusi yang diberikan tanpa memandang unsur gender maupun ras. Perseroan menjamin hak dan kewajiban setiap Karyawan dengan mematuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

KEGIATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah melakukan beragam kegiatan terkait dengan fokus Manajemen SDM sebagai berikut:

A. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sesuai

Perkembangan Perusahaan

Struktur Organisasi PT. Pelita Indonesia Djaya (PT. PID) sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 11.23/DIR/SK/001/100/2021 tanggal 23 November 2021 Tentang Struktur Organisasi dan *Job Description* PT. Pelita Indonesia Djaya adalah sebagai berikut:

1) Organisasi Kantor Pusat

Unsur Pimpinan adalah Dewan Direksi yang bekerja secara kolektif dan beranggotakan:

- a. Direktur Utama
Menentukan, memutuskan dan menetapkan strategi perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan Perseroan di antaranya internal audit dan divisi Pengadaan & Pergudangan di mana seluruh kegiatan tersebut dikaitkan dengan usaha pencapaian visi dan misi Perusahaan.
- b. Direktur Operasi
Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan pembuatan kebijakan operasi Perseroan meliputi Divisi Pelayanan dan Jasa dan Divisi Komersial dan Divisi *Maintenance & IT*.
- c. Direktur Keuangan
Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan pembuatan kebijakan operasi Perseroan meliputi Divisi Keuangan, Divisi SDM & Umum serta mengevaluasi dan mengkaji kinerja operasi.

2) Tim Manajemen Risiko

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen resiko serta memastikan bahwa kebijakan manajemen resiko telah dilaksanakan dengan baik.

Terkait Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai unit kerja yang dibentuk sebagai tim *ad hoc* berdasarkan SK. Nomor: 07.08/DIR/SK/001/100/2022 Tentang Tugas dan Fungsi Tim Manajemen Risiko PT. Pelita Indonesia Djaya.

Peran Tim Manajemen Risiko antara lain:

1. Tim Manajemen Risiko mempunyai tugas/tanggungjawab rumusan kebijakan, pelaksanaan, penelaahan, pengendalian dan pelaporan pengelolaan kegiatan identifikasi risiko, pengukuran risiko, analisa dan evaluasi risiko, mitigasi risiko.
2. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Tim Manajemen Risiko memiliki tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan program kerja yang berkaitan dengan identifikasi risiko;
 - b. Menyiapkan konsep peraturan/kebijakan dan sistem prosedur identifikasi risiko, pengukuran risiko, analisa dan evaluasi risiko, mitigasi risiko;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan identifikasi risiko, pengukuran risiko, analisa dan evaluasi risiko, mitigasi risiko.
 - d. Memantau, mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan identifikasi risiko, pengukuran risiko, analisa dan evaluasi risiko, mitigasi risiko;
 - e. Melakukan pengelolaan risikokorporat dan mitigasi risiko secara khusus;
 - f. Memberikan saran ahli dalam pengelolaan risiko pada perusahaan dan anak perusahaan;
 - g. Memberi saran/masukan tingkat resiko untuk keputusan Direksi yang bersifat korporasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Unsur jabatan fungsional terdiri dari:

Satuan Pengawas Intern (SPI), merupakan unit kerja yang secara teknis dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

4) Unsur Jabatan struktural terdiri dari:

- a. Divisi Pelayanan dan Jasa, merupakan unit kerja yang secara teknis dipimpin oleh seorang Senior Manager Pelayanan dan Jasa terdiri atas unit kerja:
 - Manager Pelayanan (Laut)
 - Manager Pelayanan (Darat)

- b. Divisi Komersial, merupakan unit kerja yang secara teknis dipimpin oleh seorang Senior Manager Komersial dan terdiri atas unit kerja:
 - Manager Optimalisasi Asset
 - *Manager Supplement Food*
 - Manager Bahan Makanan
- c. Divisi JMI & IT, merupakan unit kerja yang secara teknis dipimpin oleh seorang Senior Manager JMI dan IT, terdiri atas unit kerja:
 - *Manager Maintenance*
 - *Manager IT*
- d. Divisi Keuangan, merupakan unit kerja yang secara teknis dipimpin oleh seorang *Senior Manager* Keuangan dan terdiri atas unit kerja:
 - Manager Akuntansi & Pajak
 - Manager Keuangan
- e. Divisi SDM dan Umum merupakan unit kerja yang secara teknis dipimpin oleh seorang *Senior Manager* SDM dan Umum dan terdiri atas unit kerja:
 - Manager SDM & Umum
 - Manager Kesekretariatan dan Hukum
- f. Divisi Pengadaan

5) Organisasi Entitas Anak Perusahaan

Organisasi Kantor cabang Surabaya dipimpin oleh seorang Manager Cabang sebagai unit kerja pelaksana Pusat yang membawahi 4 orang karyawan.
 PT. PELITA BANDAR NASIONAL (PT. PBN) adalah anak perusahaan PT. PID yang didirikan pada tanggal 28 Juni 1989 dengan Akta Pendirian Nomor 19 tertanggal 28 Juni 1989 Notaris Atmadji, SH dan dirubah dengan Akta nomor: 05 tanggal 21 November 2017 Zahrullah Amrozi Johar, SH. Organisasi PT. Pelita Bandar Nasional (PT. PBN) dipimpin oleh seorang Direktur sebagai penanggungjawab pengelolaan perusahaan dan membawahi atas unit kerja:

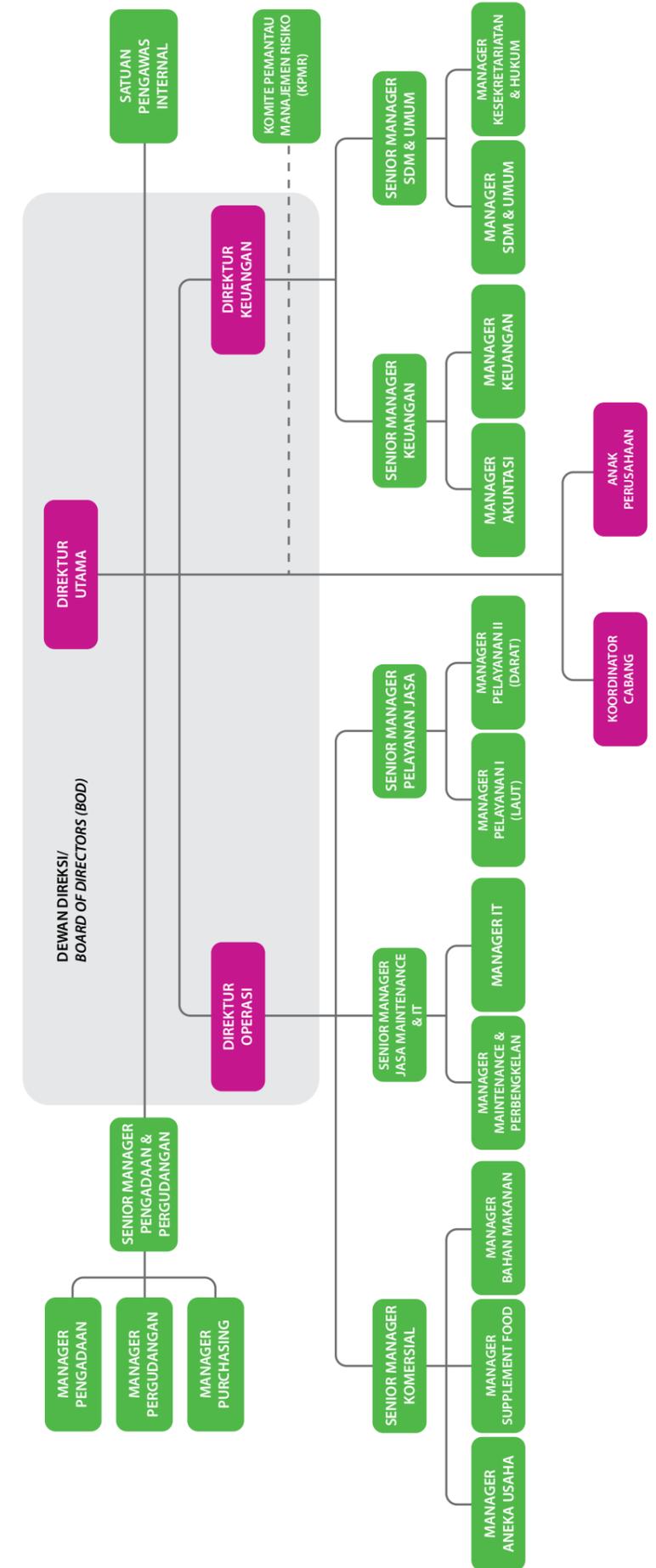
- Bagian Terminal
- Bagian Keuangan

B. Bagan Organisasi

Struktur organisasi yang digunakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor: 11.23/DIR/SK/001/100/2021 tanggal 23 November 2021 Tentang Struktur Organisasi dan *Job Description* PT. Pelita Indonesia Djaya sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
PT PELITA INDONESIA DJAYA (PT PID)**

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
Nomor : 11.23/DIR/SK/001/100/2021
Tanggal : 23 November 2021**



C. Sumber Daya Manusia

1. Jumlah dan Komposisi Pegawai

Hingga akhir tahun 2022, total pegawai Perseroan dan anak Perusahaan tercatat mencapai 1492 orang yang terdiri dari 1487 pegawai Perseroan dan 5 orang ditempatkan di Anak Perusahaan, rincian pegawai berdasarkan jenjang jabatan, unit kerja, status kepegawaian dan pendidikan adalah sebagai berikut:

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan

JENJANG JABATAN	JUMLAH
Direktur	3 Orang
Kepala SPI	1 Orang
Senior Manager & Plt. Senior manager	5 Orang
Manager & Plt. Manager	12 Orang
Asisten Manager	9 Orang
Staf (Kantor Pusat)	92 Orang
Karyawan Produksi	1.365 Orang
Anak Perusahaan	5 Orang
TOTAL	1.492 Orang

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

JENJANG JABATAN	JUMLAH
Kontrak	1.412 Orang
Tetap	80 Orang
TOTAL	1.492 Orang

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Perseroan secara berkelanjutan berusaha mempertahankan komposisi tingkat pendidikan pegawai dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan perubahan bisnis. Komposisi pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan secara lengkap tersaji di bawah sebagai berikut:

JENJANG JABATAN	JUMLAH
Strata 2 (S.2)	
Strata 1 (S.1)	224 orang
Diploma	
≤ SMA	1.217 orang
TOTAL	

2. Kebutuhan Pegawai

Dengan bertambahnya unit usaha dan meningkatnya kegiatan perusahaan, maka Manajemen mengadakan Restrukturisasi Organisasi Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi PT.Pelita Indonesia Djaya No:11.23/DIR/SK/001/100/2021 tanggal 23 November 2021 Tentang Struktur Organisasi dan *Job Description* PT. Pelita Indonesia Djaya. Berkenaan dengan perubahan struktur Organisasi Perusahaan dengan merampingkan Struktur Organisasi sebelumnya yang mana masih terdapat Unit Pengembangan Bisnis kemudian dihapuskan dan digantikan dengan unit Pengadaan dan Pergudangan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memisahkan pengadaan dan pergudangan dari unit yang lain agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan.

3. Remunerasi Pegawai

Penentuan dan pemberian remunerasi pegawai tunduk pada ketentuan dan perundang undangan yang berlaku, termasuk batas Upah Minimum Provinsi (UMR), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan terkait lainnya.

- Tunjangan Hari Raya dengan SK Direksi Nomor 04.08/DIR/SK/001/100/2022
- Pemberian Jasa Produksi Tahun 2022 gaji ke-16 SK Direksi Nomor: 09.30/DIR/SK/001/100/2022
- Pemberian Tunjangan Pendidikan gaji ke-14 SK Direksi Nomor 07.28/DIR/SK/002/100/2022
- Pemberian gaji ke-15 akhir tahun 2022 SK Direksi Nomor 12.19/DIR/SK/001/100/2022.

4. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Pemberian jaminan kesehatan kepada pegawai, perusahaan mengikutsertakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan, dan untuk kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan selain program yang telah diikuti yaitu JK, JKK dan JHT pada pegawai juga telah diikutsertakan pada program baru yaitu Program Jaminan Pensiun.

5. Program Peningkatan/Pengembangan Kompetensi

Dalam tahun 2022, perusahaan berusaha meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan latihan, *workshop*, dan *Coaching* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal guna mendapatkan pengetahuan - pengetahuan dan kemampuan khusus sebagai berikut:

- Diklat Dasar-Dasar Audit
- Bimbingan Teknis Tatacara Pengisian Laporan Kegiatan LKPM tahun 2022
- Sertifikasi Manajemen Risiko
- Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
- Diklat Gada Pratama tingkat POLDA Angkatan Pertama
- Diklat Gada Pratama tingkat POLDA Angkatan Kedua
- Diklat ISO 22000:2018 Sistem Manajemen Keamanan Pangan

Sistem pengembangan sumber daya manusia di PID dikembangkan sesuai dan selaras dengan strategi bisnis perusahaan menuju kinerja bisnis terbaik di era digital. PID menjadikan SDM sebagai tenaga pendukung utama setiap aktivitas operasional. Perencanaan SDM dibuat dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu perkiraan beban kerja, rencana pensiun pegawai, dan rencana anggaran yang ditinjau secara periodik.

PID menyusun perencanaan SDM jangka panjang untuk mendukung rencana pengembangan bisnis sejalan tuntutan pembangunan daerah dan tuntutan pasar.

Perencanaan SDM PID dibuat sebelum tahun berjalan sebagai salah satu program kerja Divisi Sumber Daya Manusia. Perencanaan SDM meliputi perencanaan jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan pada tahun berjalan, analisis ketersediaan pegawai, dan analisis pemenuhan kebutuhan SDM.

Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia

PID memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu Pemangku Kepentingan yang memiliki peran kunci bagi kesuksesan dan keberlanjutan perusahaan serta memandang SDM sebagai mitra strategis dalam menjalankan usaha. Oleh karenanya PID senantiasa berupaya mengelola dan meningkatkan kompetensi serta menciptakan lingkungan kerja kondusif untuk memastikan kinerja SDM yang optimal, efisien dan produktif.

Strategi pengelolaan SDM yang diterapkan PID merupakan alignment terhadap visi dan misi, strategi serta budaya perusahaan. Untuk itu, PID melakukan serangkaian upaya yang berkesinambungan dan terarah dalam melakukan program pengembangan SDM. Untuk mempertahankan kesinambungan dalam pengembangan organisasi, PID menerapkan pengelolaan SDM melalui strategi-strategi peningkatan kualitas SDM PID sebagai berikut,

1. Proses rekrutmen yang selektif baik yang bersifat replacement maupun pengisian posisi-posisi vacant sesuai dengan kebutuhan.
2. Program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pegawai melalui berbagai program baik in-house maupun public training seiring dengan perkembangan bisnis dan volume usaha Perusahaan .
3. Proses rotasi, mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi

Perusahaan sekaligus sebagai jenjang karir pegawai.

4. Pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan pegawai secara terus menerus seiring dengan pencapaian dan perkembangan bisnis dan usaha Perusahaan .
5. Penerapan peraturan internal sebagai panduan Perusahaan dan pegawai agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, dan dinamis.

Dalam rangka pengembangan bisnis dan usaha serta produktivitas, PID secara terus menerus dan berkesinambungan berusaha menciptakan suasana kerja yang kondusif serta memberikan kesempatan bagi pegawai dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kemampuan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen

Kebijakan rekrutmen dilaksanakan untuk memenuhi sumber daya manusia yang bertanggung jawab serta memenuhi standar kualitas yang telah diterapkan sehingga menjamin terpenuhinya upaya peningkatan Bisnis Perusahaan. PID memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada setiap anak bangsa terbaik untuk berkarya dan bekerja di Perusahaan, tanpa memandang unsur gender, agama, ras, maupun hal lainnya yang bersifat diskriminasi. Sistem rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan fair, yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan pegawai untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ruang lingkup proses rekrutmen meliputi:

1. Perencanaan dan persiapan rekrutmen
2. Pelaksanaan seleksi
3. Hasil seleksi

Kebijakan rekrutmen bertujuan untuk:

1. Merancang proses rekrutmen yang handal, sehingga calon pegawai yang akan menjalani seleksi sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai;
2. Mencapai visi dan misi perusahaan secara optimal melalui ketersediaan sumber daya manusia yang bekerja secara profesional;
3. Memperoleh pegawai yang berkualitas berdasarkan syarat dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

PID menyadari SDM memiliki peran penting dalam menunjang keberlanjutan kegiatan bisnis dan

operasional Perusahaan. Keterlibatan SDM yang berkualitas akan memberikan pengaruh positif dan menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, PID senantiasa berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi SDM secara konsisten dan berkesinambungan antara lain dengan menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan *workshop*, baik yang dilakukan oleh pihak internal melalui Lembaga Pendidikan, maupun bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal.

Perencanaan pengembangan sumber daya manusia disusun setiap tahun, yang meliputi antara lain rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, termasuk rencana biaya atau anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk pegawai, Direksi, dan Komisaris, serta rencana pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat tertentu.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir

Pengembangan karir dapat dipahami sebagai pendekatan formal dalam upaya peningkatan atau perbaikan, pertumbuhan, kepuasan kerja, pengetahuan dan kemampuan pegawai agar dapat memastikan bahwa orang-orang yang berkualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia ketika dibutuhkan, dengan demikian perencanaan dan pengembangan karir yang jelas akan membantu pegawai dan organisasi dalam meraih keberhasilan.

Pengembangan karir harus dilihat secara holistik, tidak hanya dari sisi promosi tetapi juga dari sisi peningkatan kapabilitas, perluasan kewenangan, pengembangan individu dan peningkatan remunerasi.

PENGEMBANGAN SDM

Peningkatan sumber daya manusia PID melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan tahun 2022 untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara menyeluruh baik proses seleksi, penilaian kinerja, serta pelatihan dan pendidikan.

Untuk mencapai peningkatan kinerja yang telah ditargetkan, PID mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan potensi karyawan secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses pembelajaran, antara lain menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan *workshop* baik secara internal maupun

secara eksternal bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja, pengelolaan risiko, budaya perusahaan serta profesionalitas.

Dalam tahun 2022, perusahaan berusaha meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan latihan, *workshop*, dan *Coaching* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal guna mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dan kemampuan khusus.

Manajemen dan Penilaian Kinerja

Manajemen dan Penilaian Kinerja merupakan alat evaluasi pencapaian target dan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh Karyawan maupun satuan kerja yang disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan jangka panjang perusahaan serta KPI Perseroan. Penilaian Kinerja masing-masing individu Karyawan yang dilaksanakan secara objektif, berjenjang, periodik, dan transparan.

Penerapan Penghargaan dan Sanksi

Perseroan senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan Karyawan berdasarkan pencapaian kinerja secara adil dan obyektif. Prestasi kinerja terbaik akan memperoleh penghargaan demikian sebaliknya bagi Karyawan yang tidak berprestasi maupun melakukan pelanggaran memperoleh sanksi.

Kesejahteraan dan Jaminan Sosial

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang ketenagakerjaan serta mempertahankan Karyawan, Perseroan senantiasa berupaya terus meningkatkan kesejahteraan Karyawan melalui berbagai aspek antara lain:

- Pemberian dan perbaikan remunerasi dan benefit, kepesertaan jaminan sosial BPJS Kesehatan, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan serta Asuransi
- Program pengembangan karyawan seperti program peningkatan jenjang pendidikan; dukungan pada kebutuhan Karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan keagamaan;

- Dukungan pada kebutuhan Karyawan untuk melaksanakan kegiatan olah raga dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan olah raga;
- Bantuan bagi Karyawan yang mengalami duka cita.
- Dan lain-lain

TURNOVER

Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Pemberian jaminan kesehatan kepada pegawai, perusahaan mengikutsertakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan, dan untuk kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan selain program yang telah diikuti yaitu JK, JKK dan JHT pada pegawai juga telah diikutsertakan pada program baru yaitu Program Jaminan Pensiun. Terkait pemenuhan normatif kewajiban paska kerja/pemberian pesangon, kepada pegawai organik perusahaan telah memprogramkan Jaminan Hari Tua.

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

PID memiliki sistem penilaian kinerja pegawai yang berkaitan dengan sistem penilaian unit kerja masing-masing yaitu berupa *Key Performance Indicator (KPI)* untuk menilai performa/kinerja unit kantor yang dinilai setiap triwulan/tahunan dan Sasaran Kinerja Individu (SKI) untuk mengukur kinerja pegawai setiap setahun sekali. Penilaian SKI secara aktif akan membimbing para pegawai dalam setiap unit kerja dalam mencapai sasaran unitnya dalam kerangka mencapai sasaran usaha PID serta memberikan penilaian kinerja dan potensi secara lebih objektif.

Internalisasi Budaya

Menyadari sepenuhnya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan, maka pengelolaan SDM menjadi salah satu fokus utama PID. Program penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM senantiasa dilakukan secara berkesinambungan, dimana PID juga telah menetapkan budaya perusahaan yang ditanamkan melalui serangkaian program internalisasi visi, misi dan nilai-nilai budaya perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 07.08/DIR/SK/002/100/2022 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia

PT/ Pelita Indonesia Djaya. Penerapan budaya kerja adalah suatu hal penting bagi PID untuk memastikan setiap pegawai mampu menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan, menjalankan secara penuh implementasi *Good Corporate Governance* serta berjalan selaras dengan strategi dan kegiatan usaha Perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan demi menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis agar loyalitas pegawai dapat meningkat sehingga dalam jangka panjang akan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha PID.

Tim Internalisasi Budaya

Dalam menjalankan internalisasi budaya perusahaan, PID melibatkan seluruh pegawai mulai dari level yang tertinggi sampai terendah, dibantu oleh tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan internalisasi budaya di setiap Unit Kerja.

Program Internalisasi Budaya

Selama tahun 2022 PID telah melaksanakan program internaslisasi budaya, di antaranya sebagai berikut,

- Mengenalkan dan mensosialisasikan sejak awaltentang budaya perusahaan yang berlaku di PID yaitu sejak pegawai mengikat kontrak kerja dengan PID.
- Selalu mensosialisasikan kepada pegawai disetiap kesempatan misalnya pada saat *briefing* pagi atau pada pertemuan-pertemuan internal lainnya.
- Membuat dan memberikan buku saku yang berisi budaya perusahaan kepada pegawai.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

PID memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk terus berkembang seiring dengan perkembangan kinerja perusahaan. Program pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan karir, pelatihan dan sertifikasi profesi, keterampilan, serta berbagai kursus, pelatihan, sosialisasi, seminar, *workshop* dan pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Sebelum menentukan program pelatihan, maka dilakukan kajian kebutuhan melalui berbagai tahapan. Metode pelatihan dan pengembangan dalam pengelolaan pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di PID dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan
2. Penetapan Tujuan
3. Pengembangan Metode Pelatihan
4. Pengembangan Materi Pelatihan
5. Pelaksanaan Pelatihan
6. Evaluasi Pelatihan.

Penentuan pelatihan berfokus pada tugas, pekerjaan, atau posisi yang spesifik yang membuat seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu, topik pelatihan ditentukan oleh tingkat kepentingannya.

Program Peningkatan/Pengembangan Kompetensi

Dalam tahun 2022, perusahaan berusaha meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan latihan, *workshop*, dan *Coaching* sebanyak 114 orang yang diselenggarakan oleh pihak eksternal guna mendapatkan pengetahuan - pengetahuan dan kemampuan khusus sebagai berikut:

- Diklat Dasar-Dasar Audit
- Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
- Diklat Gada Pratama tingkat POLDA Angkatan Pertama
- Diklat Gada Pratama tingkat POLDA Angkatan Kedua
- Diklat ISO 22000:2018 Sistem Manajemen Keamanan Pangan.

TUJUAN PELATIHAN

Setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan karir pegawai itu sendiri. Pegawai akan mengikuti program pelatihan baik dalam rangka meningkatkan keterampilan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya sekarang dan antisipasi pengembangan tugas ke depan.

PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS DAN KOMPETENSI PEGAWAI

Pengembangan kualitas dan kompetensi Pegawai dilaksanakan sesuai dengan pedoman *blue print* edukasi PID yang telah dirumuskan sebagai berikut:

KESEMPATAN DAN KESELAMATAN KERJA

PID merupakan Perusahaan yang bergerak dalam lingkungan kinerja yang tidak memicu banyak risiko kecelakaan kerja, namun PID berusaha untuk memberikan perlindungan dalam bekerja, sehingga semua pihak dapat melakukan aktivitas dengan nyaman. PID berupaya memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja serta tercapainya kecelakaan nihil pada setiap unit kerja. Risiko yang diminimalisir berupa bahaya kebakaran, bahaya pencurian, dan fasilitas kesehatan. Penjelasan lebih lengkap terkait kesehatan dan keselamatan kerja ada pada bagian *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

PID menetapkan standarisasi penilaian kinerja pegawai menggunakan kamus dan *balance scorecard* untuk setiap jabatan yang disebut dengan istilah *Key Performance Indicator (KPI)*. Penilaian ini sangat mempengaruhi jenjang karir, promosi, dan rotasi masing-masing pegawai. Namun penilaian ini sedang dalam proses perbaikan dan perubahan untuk lebih memberikan nilai-nilai keadilan bagi seluruh pegawai.

REWARD AND PUNISHMENT

Sistem reward and punishment dari manajemen penting untuk diterapkan oleh Perusahaan. Sistem *reward and punishment* membantu manajemen dalam mewujudkan visi, misi, strategi, dan tujuan perusahaan. Selain itu, sistem reward and punishment dari manajemen menjadi alat manajemen untuk dapat memberikan pengaruh kepada karyawan agar bertindak positif guna pencapaian tujuan perusahaan. Karyawan akan kooperatif apabila manajemen dapat mengembangkan dan mengelola karyawan dengan tepat, sehingga target perusahaan dapat berjalan sesuai harapan manajemen.

Sistem reward and punishment dari manajemen juga dirancang untuk memotivasi karyawan agar tujuan perusahaan tercapai. *Reward* merupakan salah satu alat pengendalian penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi personel agar mencapai tujuan perusahaan dengan perilaku sesuai

dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sedangkan punishment merupakan sesuatu yang tidak disukai/disenangi oleh karyawan untuk menghasilkan efek jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan dan kesalahan yang sama. Bentuk-bentuk punishment antara lain kehilangan pekerjaan, tidak menerima kenaikan gaji, dihapus dari daftar karyawan yang akan dipromosi, kegagalan mendapatkan reward, ancaman pemecatan, dan lain sebagainya.

Penerimaan Sumber Daya Manusia baru akan dilaksanakan guna menunjang pemenuhan pegawai pada jaringan kantor baru, mengisi formasi atau jenis pekerjaan baru, mengganti pegawai yang berhenti baik karena alasan pensiun ataupun lainnya serta pertimbangan hasil *Work Load Analysis (WLA)*.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menawarkan banyak sekali kemudahan, salah satunya ialah memudahkan informasi menyebar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Proses pembelajaran secara serempak dapat dilaksanakan untuk lingkup sasaran yang kecil maupun besar, dimanapun dan kapan pun serta dapat diikuti setiap pegawai.





TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan Perusahaan. Karena itu, PT PID memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara benar dan konsisten, serta terus berusaha untuk menyempurnakan tatanan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dimilikinya.



Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) telah menjadi landasan yang kuat bagi PID untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* yang merupakan komitmen kuat PID, demi kepentingan Pemilik Saham (Oleh karenanya PID selalu menjaga kepercayaan, kredibilitas serta upaya kontinuitas terkait produk dan jasa yang mana menjadi faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan.

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan staf untuk taat dan patuh pada seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di Perusahaan.

Dalam melaksanakan implementasi GCG, Perusahaan melakukan sosialisasi secara terus menerus yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya GCG, mengkomunikasikan dan menginternalisasikan berbagai kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan terkait GCG.

Perusahaan telah menerapkan prinsip dan praktik GCG dalam manajemen dan pengelolaan bisnis usahanya, sehingga dapat melindungi Para Pemilik Modal dengan efektif.

Prinsip-prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran.

DASAR DAN PENERAPAN GCG

Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di PID adalah niat dan tekad manajemen PID untuk menjadikan PID sebuah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang dengan kualitas Produk dan Proses Kerja yang baik, serta memiliki *Code of Conduct*, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungannya. Tujuan Penerapan GCG di PID adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan berjalan secara baik dan kepentingan semua pihak terpenuhi.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan PID.
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4. Mengelola risiko secara lebih baik.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.

6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PID.
7. Memperbaiki budaya kerja PID.
8. Meningkatkan citra PID (*image*) menjadi semakin baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, PID memiliki komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi PID dalam penerapan GCG yaitu:

1. Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (Pasal 5 ayat 3).
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.
3. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas yang diperbaharui oleh Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007.
5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PID. Kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 009/DIR/SK/II/2017 tentang Penetapan Pedoman Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* Pada PT. Pelita Indonesia Djaya.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*

Selama tahun 2022, manajemen memastikan bahwa perusahaan telah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Perusahaan telah memiliki *code of conduct* yang dijadikan sebagai dasar rujukan bagi setiap personil dalam bertindak di dalam relasinya dengan pelaksanaan tugas.

Seluruh personil berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi serta tidak melaksanakan praktik-praktik KKN melalui penandatanganan pakta integritas.

Dalam rangka menilai komitmen perusahaan dalam melaksanakan praktik GCG, sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara BUMN NOMOR: PER01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Perusahaan menerapkan sistem Manajemen Mutu ISO 9001 ditandai dengan melakukan kegiatan dengan pihak ketiga (Diklat ISO).

Perusahaan menerapkan sistem keamanan pangan yang ditandai dengan terbitnya sertifikat ISO 22000.

Perusahaan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan yang ditandai dengan terbitnya sertifikat ISO 37001.

Komitmen Implementasi GCG

Bagi PT. Pelita Indonesia Djaya, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance - GCG*) merupakan prinsip yang senantiasa mengarahkan Perusahaan dalam mengendalikan seluruh kegiatan usaha, mulai dari operasional, keuangan hingga sumber daya manusia untuk memastikan bahwa kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepada Perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham serta pemangku kepentingan. Implementasi GCG senantiasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penerapannya dibuat sejalan dengan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Transparency*

Perusahaan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat melalui jalur komunikasi yang memadai secara terbuka sehingga dapat dengan mudah diakses oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

2. *Accountability*

Perusahaan memiliki sistem manajemen yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ Perusahaan.

3. *Responsibility*

Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip korporasi yang sehat.

4. *Independency*

Perusahaan memastikan diri bebas atau tidak terikat dengan benturan kepentingan yang berpotensi untuk menempatkan Perusahaan dalam tekanan dari pihak manapun.

5. *Fairness*

Perusahaan memberikan perhatian yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dengan membuka diri terhadap segala masukan dan saran yang ingin

disampaikan oleh seluruh pemangku kepentingan guna menjamin hubungan imbal balik yang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kebijakan GCG

Kebijakan tata kelola Perusahaan yang baik antara lain meliputi pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara Direksi dan Dewan Komisaris, *check and balances*, strategi Perusahaan yang jelas, etika bisnis, hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, dan pengawasan operasional.

Beberapa pedoman-pedoman dan kebijakan Perusahaan dalam pelaksanaan penerapan GCG meliputi:

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*),

- a. Pedoman Kebijakan Perusahaan (*Code of Corporate Governance*),
- b. Board Manual,
- c. Piagam Komite Audit
- d. Piagam Satuan Pengawasan Intern,
- e. Kebijakan Pengelolaan Risiko,
- f. Peraturan Perusahaan
- g. Kebijakan lainnya yang berhubungan dengan *stakeholders* yang mengatur hak dan kewajiban karyawan, pelanggan, dan pemasok.

Tujuan Penerapan GCG

PID mengimplementasikan GCG sebagai sebuah strategi fundamental dalam melakukan transformasi dan turnaround, yang diharapkan dapat menciptakan PID sebagai sebuah korporasi yang berkelanjutan (*sustainable company*). Untuk itu dengan menerapkan GCG, PID memiliki tujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan untuk membangun daya saing yang kuat, dalam menjaga etika dan integritas agar dapat menjaga eksistensi dan pertumbuhan secara berkelanjutan;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien serta efektif selain juga memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ dalam Perusahaan;
3. Mengarahkan serta mengendalikan hubungan kerja antara organ PID;
4. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya harus dilandasi nilai moral yang tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial yang tinggi;
5. Menciptakan SDM yang profesional;

6. Meningkatkan kesejahteraan seluruh Insan PT Pelita Indonesia Djaya serta peningkatan kemanfaatan bagi *Stakeholders*;
7. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PID;
8. Memperbaiki Budaya Kerja PID.

Pengukuran Implementasi GCG

PID secara berkala melakukan pengukuran atas implementasi tata kelola perusahaan. Melalui proses pengukuran tersebut, PID memiliki tujuan untuk:

- Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
- Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
- Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi PID, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.
- Mendorong pengelolaan PID yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PID.

Mekanisme dan Struktur GCG

Mekanisme GCG merupakan mekanisme atas implementasi tata kelola perusahaan yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi tata kelola perusahaan tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *governance structure*, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme.

Mekanisme GCG dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola perusahaan tergambar pada Organ PID yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ PID yang mempunyai wewenang yang tidak

diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.

- Dewan Komisaris adalah Organ PID yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

- Direksi adalah Organ PID yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PID untuk kepentingan PID, sesuai dengan maksud dan tujuan PID serta mewakili PID, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Struktur GCG



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki tingkat kekuasaan tertinggi yang tidak bisa diberikan kepada Direksi atau Komisaris dan pihak lain dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang PID dan/atau Anggaran Dasar PID.

Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Keputusan Rups:

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perusahaan selama Tahun Buku 2022;

- 2) Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2022;
- 3) Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris;
- 4) Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.

DEWAN KOMISARIS

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Komposisi Komisaris

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN
Robert MP Sinaga	Komisaris	Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor: 2, tanggal 04 Oktober 2022 yang diaktakan dihadapan Notaris Ida Adiningsih, S.H mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) dan telah mendapat persetujuan dari KEMENKUMHAM Nomor: AHU-0198598.AH.01.11, tanggal 05 Oktober 2022.

Independensi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris bersifat independen, tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 yang telah disahkan.

Laporan Tugas Pengawasan 2022

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil keputusan RUPS atas laporan tahunan tahun buku 2022 dan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2022;
- Memberikan pendapat dan saran serta tanggapan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi atas hasil kinerja tahun buku 2022 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham pada tahun 2022;
- Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja bulanan perusahaan dan memberikan saran dan pendapat dalam rangka pencapaian target kinerja Perusahaan;
- Memberikan saran terkait dengan hal-hal yang harus segera diselesaikan di tahun 2022;

- Memperoleh akses informasi Perusahaan yang diberikan manajemen secara tepat waktu dan lengkap;
- Tidak melakukan transaksi yang berpotensi menciptakan benturan kepentingan dan keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan;
- Menelaah *draft* Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2022 yang diajukan oleh Direksi dan menyampaikan pendapat/saran kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan;
- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2022 untuk mendapat persetujuan oleh RUPS yang merupakan bagian dari pengesahan RKAP tahun 2022;
- Memberikan arahan, saran dan pendapat terkait dengan pengelolaan Perusahaan;
- Kunjungan Kerja Direksi dan Organ Dewan Komisaris ke Gudang.

Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor: 10.13/02/S-B/093/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana perubahan terakhir peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/09/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau setiap saat apabila dianggap perlu. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris, seorang atau lebih anggota Komisaris, atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2022

Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2022, Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti seminar, *training* dan *workshop*.

Organ Dewan Komisaris

Pembentukan Komite Audit pada Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor: 11.16/01/SK/DK/PID/2020 tanggal 16 November 2020 sesuai peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-09/mbu/2012 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

Pembentukan Komite Kebijakan Risiko Pada Dewan Komisaris PT. PELita Indonesia Djaya berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor: 11.16/02/SK/DK/PID/2020 tanggal 16 November 2020 sesuai peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-09/mbu/2012 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab komite Audit adalah sebagai berikut:

- Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan

efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.

- Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
- Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
- Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
- Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perseroan, serta rencana jangka panjang, Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen, dan informasi lainnya.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
- Mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah Auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan.
- Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk didalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya,
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Komite Audit

Komite Audit berkewajiban untuk:

- Melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris.
- Menjaga kerahasiaan dokumen data, dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- Sebelum tahun buku berjalan, menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahunan, terlebih dahulu wajib melakukan klarifikasi terhadap hasil kerjanya kepada Direksi dan selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.

- Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris, atas setiap pelaksanaan tugas. disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.

Komite Manajemen Risiko

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen resiko serta memastikan bahwa kebijakan manajemen resiko telah dilaksanakan dengan baik.

Komite sebagai salah satu organ pendukung Dewan Komisaris, merupakan perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Fungsi dan tugas

- Komite Pemantau Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri.
- Fungsi dan tugas lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Pengangkatan dan Pemberhentian

- Ketua Komite adalah Dewan Komisaris
- Ketua dan Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Kewenangan Komite

- Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya komite dapat mengakses catatan dan informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris;
- Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Tahun 2022 Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Lenggo Geni.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

- Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
- Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
- Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris
- Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lainnya seperti berikut:

- Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi Peraturan Perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
- Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan PID mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi utama dalam rangka membantu tugas Direksi, yaitu sebagai *liaison officer (public relation/corporate communication), institution relations, GCG implementation, monitoring pencapaian Key Performance Indicator (KPI), monitoring*

pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat Direksi.

Sampai akhir Desember 2022 Perusahaan telah memiliki Sekretaris Perusahaan. Adapun peran dan fungsi Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh ibu Tutuy Listiawati sebagai Senior Manager SDM & Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 11.16/DIR/SK/001/100/2021.

Profil Sekretaris Perusahaan



TUTUY LISTIAWATI

Lahir di Jakarta tahun 1972.

Mengawali karir pada tahun 2017 di PT PID Sebagai Senior Manager Keuangan. Di tahun 2022 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Senior Manager SDM & Umum di PT PID.

Laporan Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2022 Sekretaris Perusahaan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengelola dan mengembangkan citra positif perusahaan melalui pengembangan hubungan internal dan eksternal;
2. Melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan korporasi dan protokoler, korespondensi, dan kerumahtanggaan yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak internal, eksternal dan mitra kerja;
4. Menyelenggarakan RUPS, *corporate actions* dan *public expose*;
5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak/lembaga eksternal dalam upaya memperlancar kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta Komite Dewan Komisaris;
6. Mengkoordinir/memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi serta pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kondisi korporasi;
8. Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada calon investor, pelanggan dan masyarakat
9. Membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak *stakeholders*;
10. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda Direksi;
11. Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan atau pemerintah kepada pihak internal dan eksternal;
12. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan perusahaan;
13. Menyiapkan laporan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Mengkoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
15. Memberikan keterangan pers (*pers release*) mengenai kebijakan Perusahaan;
16. Mengkoordinasikan penyusunan laporan triwulanan Perusahaan;
17. Laporan Manajemen, *Annual Report* serta RJPP;

18. Mengusulkan tindakan koreksi maupun tindakan preventif terhadap setiap kejadian operasional yang berpotensi menimbulkan kerugian;

19. Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak eksternal, internal dan mitra kerja.

Akses Data dan Informasi Perusahaan

Untuk memperkuat upaya penerapan GCG, PID berupaya memberikan kemudahan dalam akses informasi bagi para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) melalui pengembangan sistem teknologi informasi yang kuat dan handal.

PID menyadari bahwa penyebaran informasi kepada *stakeholders* merupakan bagian penting dalam pelaksanaan prinsip transparansi. Penyebaran informasi tersebut dilakukan melalui media *website*, Buletin Sejahtera, dan sebagainya.

Stakeholder Perusahaan juga dapat memperoleh informasi mengenai produk dan manfaatnya, tentang polis, pembayaran premi, klaim, perubahan polis, dan lain-lainnya ke alamat PID

Laporan Audit Internal

Sumber daya Unit Audit Internal pada tahun 2022 berjumlah 1 Orang.

Syarat & Kompetensi Sumber Daya Unit Audit Internal

Untuk menjadi Auditor Internal, harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut:

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- Memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan;
- Secara kolektif memiliki pengetahuan tentang risiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan teknik-teknik audit berbasis teknologi informasi;
- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perundang-undangan terkait lainnya;

- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- Wajib mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh *International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing*;
- Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/ atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus;

Internal Audit Charter

PID telah memiliki *Internal Audit Charter* yang menjadi dasar dan panduan pelaksanaan kegiatan Audit Internal.

Tujuan pembentukan Internal Audit Charter adalah:

1. Menetapkan posisi kegiatan Unit Audit Internal dalam Organisasi;
2. Memberikan otorisasi kewenangan kepada Unit Audit Internal dalam memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap semua catatan dan atau informasi tentang seluruh aktivitas dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
3. Menetapkan lingkup tugas dan aktivitas Audit Internal.

Tugas dan Kewenangan Unit Audit Internal

Berdasarkan *Internal Audit Charter*, tugas dan kewenangan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Membuat pelaksanaan audit tahunan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan audit kepada Komite Audit dan *Compliance*, serta membuat rekomendasi perbaikan
3. Berkoordinasi dengan auditor eksternal dalam pelaksanaan audit, apabila ada atau diperlukan, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan audit.

Pembinaan SDM dan Pengembangan Profesi Audit

Pengembangan kompetensi bagi auditor PID dilakukan melalui pelatihan pada institusi pelatihan dalam bentuk kursus atau seminar/lokakarya terkait

dengan masalah auditing baik yang dilaksanakan oleh internal Perusahaan maupun Lembaga Pendidikan Eksternal lainnya.

Program Kerja dan Laporan Unit Audit Internal 2022

Uraian Pelaksanaan Tugas Audit Internal

- 1) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
- 2) Mengevaluasi integritas dan kehandalan, informasi dan sarana yang Digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi;
- 3) Mengevaluasi sistem yang dibuat untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja, prosedur, peraturan perundang-undangan yang dimiliki, serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan organisasi;
- 4) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan perusahaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas pada bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan penggunaan aset/alat produksi serta kegiatan lainnya dalam organisasi sesuai dengan *Good Corporate Governance*;
- 6) Melakukan audit/review atas Anak Perusahaan atas permintaan Direktur Utama dan laporan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) Membuat Laporan Hasil Audit dan hasil review dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan oleh SPI dan Auditor eksternal;
- 10) Melakukan evaluasi mutu kegiatan audit internal;
- 11) Melakukan audit khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direktur Utama;
- 12) Mengidentifikasi kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat resiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya perencanaan audit;
- 13) Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit triwulan, semester, *current audit*, *post audit*, dan audit lanjutan (audit khusus);
- 14) Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya *Good Corporate Governance* serta

mendorong efektifitas sistem pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan resiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis.

Pelaksanaan Kegiatan SPI tahun 2022

Evaluasi Pengendalian Intern

- 1) Peran serta audit intern dalam penerapan panduan *Good Corporate Governance*;
- 2) Peran serta audit intern dalam proses manajemen resiko;
- 3) Peran serta audit intern dalam penerapan pedoman perilaku *Code Of Conduct*;
- 4) Peran serta evaluasi Audit Charter sesuai perkembangan;
- 5) Peran serta evaluasi Kriteria Penilaian Kerja Unggul (KPKU)
- 6) Hasil evaluasi berdasarkan *review* dan pengumpulan informasi yang relevan seta pemantauan di lapangan ditemukan adanya penyimpangan dan kelemahan yang signifikan dalam proses pengelolaan resiko dan pengendalian intern, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi dan Keuangan Perusahaan telah melakukan kegiatan administrasi keuangan dengan tertib dan baik dan telah melakukan pengendalian pengamanan terhadap aset seperti:
 - a) Sistem pengamanan kas, telah dilakukan secara rutin dengan dilakukan kas opname dan dibuat berita acara;
 - b) Sistem pengamanan aset tetap perusahaan, telah dilakukan dengan membuat daftar aset tetap dan penyusutannya secara rinci sesuai pedoman akuntansi;
 - c) Pengelolaan pendapatan dan biaya diatur berdasarkan RKAP dan dibuat anggaran pelaksanaan dengan target masing-masing Unit dan Satuan Kerja berdasarkan *Key Performace Indicators (KPI)*, dan Implementasinya dilakukan dengan monitoring realisasi anggaran setiap bulan;
 - d) Pemantauan proses rekonsiliasi saldo bank dengan saldo bukuperusahaan setiap bulan secara rutin;
 - e) Pemantauan tentang mekanisme perlakuan dan pencatatan uang muka dan pertanggungjawaban untuk kegiatan swakelola;

f) Mengelola system persediaan bahan baku permakanan di gudang dengan di dukung system aplikasi *WMS (Warehouse Management System)*.

2. Kegiatan Operasi Perusahaan telah melakukan kegiatan operasional dengan tertib dan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah dilakukan pemantauan proses *supply* bahan makanan diatas kapal.
3. Kegiatan SDM dan Umum Pada tahun 2022 kegiatan SDM terkait dengan pengembangan SDM telah dilakukan berbagai pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan terkait dengan kegiatan umum telah dilakukan pengamanan aset tetap dengan membuat daftar aset tetap berdasarkan jenis aset.

Monitoring Tindak Lanjut Temuan

Sesuai ketentuan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal mengenai Standar Implementasi tentang Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tugas dari Kepala SPI adalah menyusun dan memelihara sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen.

Monitoring tindak lanjut temuan auditor adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh SPI untuk menentukan bahwa obyek audit (auditee) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Monitoring tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara obyektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan mengecek kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tinjau yang pernah disampaikan auditee.

Kegiatan *monitoring* tindak lanjut temuan auditor di tahun 2022 dilaksanakan sepanjang tahun dengan meminta laporan tindak lanjut kepada auditee secara berkala. Kegiatan cek fisik ke lapangan juga dilakukan untuk melihat realisasi fisik pelaksanaan tindak lanjut pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

DIREKSI

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Anggota Direksi diangkat melalui RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Komposisi Direksi

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN
Sukendra	Direktur Utama	Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor: 2, tanggal 04 Oktober 2022 yang diaktakan dihadapan Notaris Ida Adiningsih. S.H mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) dan telah mendapat persetujuan dari KEMENKUMHAM Nomor: AHU-0198598. AH.01.11, tanggal 05 Oktober 2022.
Suparno	Direktur Keuangan	
Dr. Rooshardianti	Direktur Operasi	

Independensi Direksi

Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, anggota Direksi bertindak secara mandiri, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pihak mana pun.

Tanggung Jawab Direksi dan Pembagian Tugas Direksi

1. **Direktur Utama** Menentukan, memutuskan dan menetapkan strategi perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan Perusahaan di antaranya *internal audit*, *legal and contract*, dan *corporate secretary* di mana seluruh kegiatan tersebut dikaitkan dengan usaha pencapaian visi dan misi Perusahaan.
2. **Direktur Keuangan** Menentukan, memutuskan dan menetapkan serta mengendalikan anggaran keuangan perusahaan yang meliputi pengelolaan kegiatan, akuntansi dan perpajakan, pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi, administrasi dan pelayanan umum kerumah tanggaan kantor, pengamanan di wilayah kerja perusahaan, pengelolaan teknologi informasi, Sekper dan Hukum.
3. **Direktur Operasi** Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan pembuatan kebijakan operasi Perusahaan meliputi Divisi Pengembangan Usaha, Divisi Pelayanan dan Jasa dan Divisi Komersial.

Rapat Direksi

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu. Pembahasan yang dilakukan antara lain mengenai kinerja perusahaan, namun tidak terbatas pada pengukuran kinerja Perusahaan menyangkut kegiatan operasional, kondisi keuangan, dan juga dalam rangka pemenuhan target yang telah ditetapkan. Selain itu, rapat ini juga bertindak sebagai sebuah forum sharing (saling berbagi) antara anggota Direksi mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Remunerasi

Remunerasi Direksi PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Utama PT.Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelita Indonesia Djaya Nomor: 11.30/04/S-B/090/2021 tanggal 30 September 2021 sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana perubahan terakhir peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/09/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2022

Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2021, Anggota Direksi telah mengikuti seminar, *training dan workshop*.

Laporan Pelaksanaan Direksi Tahun 2022

Tahun 2022 kembali menjadi tahun yang penuh tantangan bagi PT Pelita Indonesia Djaya, dikarenakan situasi ekonomi nasional yang terimbas dari krisis perlambatan ekonomi di skala global.

Dengan berbagai tantangan yang ada tersebut, manajemen mengambil berbagai kebijakan baik di bidang operasional maupun manajemen dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

Berkat upaya tersebut dan didorong oleh kerja keras dari personel di semua lini, Perusahaan berhasil menutup tahun 2022 dengan kinerja keuangan dan operasional yang sudah mencukupi.

Beberapa prinsip utama yang diterapkan oleh manajemen pada tahun 2022, yaitu:

1. Komitmen pada pencapaian visi dan pelaksanaan misi Perusahaan
2. Menjaga keseimbangan dalam mencapai pertumbuhan yang baik dan berkualitas.
3. Meningkatkan kompetensi, motivasi dan produktivitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi.

Inisiatif tersebut kemudian diturunkan kepada kebijakan strategis di masing-masing satuan kerja. Di bidang operasional, komitmen perusahaan untuk selalu meningkatkan layanan kepada pelanggan. Dalam tahun 2022 penyampaian keluhan pelanggan melalui *SMS center*, surat, buku keluhan, kotak saran, email dan langsung dengan petugas.

Peningkatan kompetensi personil dilakukan melalui kebijakan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan melalui *training*, *coaching*, dan *benchmarking*. Di sisi lain, perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh mulai dilakukan dengan penyusunan peta kompetensi personil yang ada sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan SDM ke depan. Pemenuhan kewajiban pasca kerja karyawan serta pengikutsertaan karyawan ke dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilakukan oleh manajemen.

Manajemen telah membuat asersi (*assertion*) Pernyataan manajemen yang terkandung didalam komponen laporan keuangan serta rangkaian deklarasi secara keseluruhan terkait penyajian Laporan Keuangan secara akurat, benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Manajemen telah menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Seiring dengan perkembangan usaha perusahaan yang terus tumbuh, PID memandang perlu dilakukannya pengendalian internal secara menyeluruh dan terintegrasi serta berupaya meningkatkan penerapan pengendalian internal melalui pengembangan sistem dan prosedur yang aplikatif dan mencegah terjadinya *fraud*.

Fungsi pelaksanaan pengendalian internal dilakukan oleh Direksi melalui Unit Internal Audit. Sedangkan fungsi pengawasan dan penasehatan telah dilakukan oleh Dewan Komisaris terkait dengan proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Profil Spi



SRI ERNAWATI

Lahir di Jakarta pada tahun 1967, menyelesaikan studi terakhir di PPM Management School dan memulai bekerja di PT PELNI tahun 1990 di Divisi Keagenan. Pada tahun 2013 sebagai General Manager pada Divisi Keagenan, kemudian tahun 2014 ditugaskan sebagai General Manager di PT PELNI Cabang Semarang.

Mulai bergabung di PT PID sejak 2016 sebagai *Corporate Secretary (Corsec)*, dan selanjutnya ditempatkan diberbagai divisi seperti, Divisi Pengembangan Bisnis, Divisi SDM & Umum, Divisi Pengadaan, dan terakhir di Unit SPI sejak Juli 2020 hingga sekarang.

MANAJEMEN RISIKO

PID menyadari pelaksanaan manajemen risiko korporat semakin menjadi tuntutan, karena keberhasilannya merupakan faktor kunci sukses pencapaian tujuan dan kemenangan persaingan ditingkat global.

Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, sekaligus memberikan gambaran komprehensif kepada stakeholder maupun pengelola Perusahaan mengenai potensi peluang maupun kerugian, dengan demikian pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja Perusahaan, sehingga memungkinkan pembuatan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam aktivitas usaha, PID menghadapi beberapa risiko yang melekat (*inherent risk*). Risiko tersebut secara umum dapat timbul akibat dipengaruhi oleh manusia, aset, alam, pendanaan, lingkungan, dan reputasi.

Sedangkan secara khusus, risiko yang dihadapi sesuai karakteristiknya dapat berbentuk risiko kegagalan operasional penerbangan, kegagalan operasi bandara, kegagalan layanan dan ketidakpatuhan pada regulasi.

Berbagai risiko tersebut ditangani melalui upaya *existing control*, mitigasi risiko, ataupun pengalihan risiko. Evaluasi selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi karena risiko itu sendiri sifatnya dinamis.

PID secara berkelanjutan mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko.

Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai dengan standar bandara internasional, manajemen PID akan menyusun profil risiko korporasi, untuk fungsi Operasional dan Teknik yang fokus pada proses bisnis perusahaan antara lain: *Safety, Security, Services through Compliance (3S+1C)* yang merupakan *compulsory* dalam pengelolaan risiko, serta di

PERKARA HUKUM

Perkara Penting adalah permasalahan hukum yang dihadapi PID selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum baik melalui jalur Pengadilan ataupun Arbitrase. Sementara Nilai Perkara merupakan nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada PID sebagai pihak tergugat atau nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PID sebagai pihak penggugat, baik kerugian materiil mau Perkara Yang dihadapi PID.

Sengketa Pajak

Tidak terdapat Sengketa Pajak yang dihadapi PID sepanjang tahun 2022.

Perkara yang Melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi PID

Sepanjang tahun 2022 tidak ada perkara hukum yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi PID.

Sanksi dari Regulator

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat sanksi dari regulator yang diberikan kepada PID.

Penyimpangan Internal

Selama tahun 2022 tidak ada penyimpangan yang bersifat kecurangan yang dilakukan oleh karyawan PID.

lingkungan Administrasi, Keuangan dan Komersial yang mengarah pada risiko tinggi.

Komponen Pengelolaan Risiko

Sistem manajemen risiko terdiri dari 3 komponen saling terkait yaitu:

1. Prinsip-prinsip manajemen risiko;
2. Kerangka kerja dalam mengelola risiko; dan
3. Proses pengelolaan risiko.

Prinsip-prinsip manajemen risiko merupakan pondasi (aturan dasar) bagi pengembangan kerangka kerja pengelolaan risiko yang merupakan pilar-pilar bagi penerapan proses manajemen risiko. Sementara proses manajemen risiko adalah penjabaran dari kerangka kerja pengelolaan risiko dalam rangka mempermudah penerapan prinsip-prinsip pengelolaan risiko, baik di tingkat korporat, di tingkat unit kerja, maupun individu.

Etika Perusahaan (Code of Conduct)

Sebagai bentuk komitmen penerapan GCG di Perusahaan, PID bertekad untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan etika tertinggi dalam kejujuran dan keadilan. Komitmen ini dirancang bukan hanya sekedar untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk memperoleh dan menjaga kepercayaan para nasabah, pemegang saham, karyawan, dan mitra usaha. Hal ini merupakan hal yang sangat substansial bagi keberhasilan usaha jangka panjang.

PID telah merumuskan berbagai kebijakan menyangkut etika Perusahaan dengan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi Etika Bisnis.

Penyebaran Etika Bisnis

Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Standar Etika Perusahaan. PID senantiasa melakukan sosialisasi dalam penerapan Etika Bisnis kepada seluruh pegawai PID, mulai dari level operasional sampai kepada top management. Sosialisasi ini dimaksudkan agar insan PID senantiasa patuh terhadap Etika Bisnis.

Penegakan Etika Bisnis

PID melakukan penegakan terhadap Etika Bisnis yang dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan Etika Bisnis. Upaya penegakan Etika Bisnis dilakukan oleh PID melalui penyediaan media pengaduan pelanggaran, penerapan *reward and punishment* serta pernyataan komitmen.

Whistleblowing System

Kebijakan pengaduan pelanggaran diperlukan untuk mengatur penyelesaian Pengaduan Pelanggaran bagi stakeholders. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*whistleblowing system*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu Perusahaan.

Jenis Pengaduan

Jenis pengaduan yang dapat disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System* adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran atas aturan atau persyaratan internal.
2. Pelanggaran atas hukum atau peraturan yang berlaku tidak termasuk *fraud* atau pencurian (termasuk *insider trading*).
3. *Fraud* atau pencurian.
4. Membahayakan kesehatan atau keselamatan.
5. Masalah-masalah sumber daya manusia yang telah gagal untuk diselesaikan melalui prosedur pengaduan SDM.

RENCANA PENGEMBANGAN GCG TAHUN 2022

PID berkomitmen untuk terus melanjutkan implementasi GCG secara konsisten.

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2022

Kegiatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022 yang telah disahkan oleh RUPS, sebagai berikut:

- a. Pengawasan atas Pelaksanaan RKAP 2022;
- b. Pengawasan dan pemberian nasihat atas hasil

6. Memalsukan atau menyembunyikan catatan keuangan.
7. Memalsukan atau menyembunyikan informasi manajemen non-finansial.
8. Perilaku tidak etis.
9. Perlakuan terhadap pelanggan yang tidak pada tempatnya.
10. Kerusakan lingkungan.

Mekanisme Sistem Pengaduan

Kebijakan Pengaduan Pelanggaran yang disusun dimaksudkan untuk mengelola dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi antara lain terkait dengan kerugian perusahaan secara finansial maupun reputasi perusahaan yang bersifat negatif. Pengaduan pelanggaran dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan, melalui *email* maupun surat resmi.

Pengaduan dari pihak ketiga dan/atau dari karyawan Perusahaan harus ditempatkan dalam kerangka peningkatan GCG. Pengaduan harus disampaikan oleh pelapor dengan rasa tanggung jawab dan bukan bersifat fitnah yang dapat mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang.

Pengaduan yang disampaikan harus memenuhi syarat-syarat bahwa pengaduan disampaikan secara tertulis, memuat identitas pelapor (kerahasiaan identitas pelapor akan tetap terjaga), memuat informasi yang memberikan petunjuk mengenai permasalahan seperti yang diuraikan pada bagian di atas, Informasi harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- audit dan *review* pengendalian intern;
- c. Pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan yang diambil Direksi Perseroan;
- d. Pengawasan dan pemberian nasihat atas penyusunan RKAP tahun 2023;
- e. Keputusan Direksi PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelita Indonesia Djaya Tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT. Pelita Indonesia Djaya dibuat oleh Notaris IDA ADININGSIH, SH berkedudukan

- di Jakarta pusat Akta Notaris Nomor: 2 tanggal 4 Oktober 2022 Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0006.AH.02-02-Tahun 2022 tanggal 22 Oktober 2022 Dewan Komisaris: Tuan Robert MP Sinaga;
- f. Remunerasi Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya (PT. PID) ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor: 10.13/02/S-B/093/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/09/2021 tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana perubahan terakhir peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/05/2019 tanggal 24 September 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;
- g. Melakukan Pengesahan pada undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 PT. Pelita Indonesia Djaya yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris HJ. OFIYATI SOBRIYAH, SH berkedudukan di Jakarta pusat Akta Notaris Nomor 22 tanggal 31 Januari 2022;
- h. Pembentukan Komite Audit pada Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor: 11.16/01/SK/DK/PID/2020 tanggal 16 November 2020 sesuai peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-09/mbu/2012 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- i. Pembentukan Komite Kebijakan Risiko Pada Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor: 11.16/02/SK/DK/PID/2020 tanggal 16 November 2020 sesuai peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-09/mbu/2012 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- j. Pelatihan Risk Management & Sustainability Komite Risiko PT. Pelita Indonesia Djaya berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor: 05.11/01/DK.PID/2022 tanggal 11 Mei 2022;
- k. Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya memberikan persetujuan pelepasan dan penghapusbukuan atas Aset kendaraan PT. Pelita Indonesia Djaya antara melalui surat No 06.09/01.B/DK.PID/2022 tanggal 09 Juni 2022 tentang persetujuan pelepasan dan penghapusbukuan atas 8 unit Aset kendaraan Toyota Innova PT. Pelita Indonesia Djaya;
- l. Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya memberikan usulan terhadap Tantiem Tahun 2021 dan Gaji / Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya Tahun 2022 kepada Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas;
- m. Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya mengadakan Rapat Laporan Manajemen dan Rapat Gabungan secara berkala setiap bulan atau per-triwulan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan mendapatkan laporan dari Direksi / manajemen PT. Pelita Indonesia Djaya;
- n. Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya memberikan evaluasi Manajemen Risiko PT. Pelita Indonesia Djaya Triwulan III tahun 2022 melalui surat nomor 12.30/02/S-B/DK.PID/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan memberikan beberapa poin kesimpulan dan saran terhadap manajemen PT. Pelita Indonesia Djaya;
- o. Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan Evaluasi Dewan Komisaris melalui review komite audit Atas Laporan Auditor Internal Triwulan III Tahun 2022 PT. Pelita Indonesia Djaya melalui surat nomor 12.30/01/S-B/DK.PID/2022 tanggal 30 Desember 2022;
- p. Kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 24 Desember 2022 untuk meninjau pelaksanaan pekerjaan di masa peak season nataru tahun 2022.
- c. Beberapa prinsip utama yang diterapkan oleh manajemen dalam melakukan perubahan kebijakan pada tahun 2022, yaitu :
- 1) Komitmen pada pencapaian visi dan pelaksanaan misi Perusahaan.
 - 2) Menjaga keseimbangan dalam mencapai pertumbuhan yang baik dan berkualitas.
 - 3) Meningkatkan kompetensi, motivasi dan produktivitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi.
- d. Inisiatif tersebut kemudian diturunkan kepada kebijakan strategis di masing-masing satuan kerja. Di bidang operasional, komitmen perusahaan untuk selalu meningkatkan layanan kepada pelanggan.
- e. Melakukan Pengesahan pada undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 PT. Pelita Indonesia Djaya yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris HJ. OFIYATI SOBRIYAH, SH berkedudukan di Jakarta pusat Akta Notaris Nomor 22 tanggal 31 Januari 2022.
- f. Dalam tahun 2022 penyampaian keluhan pelanggan melalui *SMS center*, surat, buku keluhan, kotak saran, email dan langsung dengan petugas.
- g. Meningkatkan kompetensi personil dilakukan melalui kebijakan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan melalui *training*, *coaching*, dan *benchmarking*. Di sisi lain, perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh mulai dilakukan dengan penyusunan peta kompetensi personil yang ada sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan SDM ke depan. Pemenuhan kewajiban pasca kerja karyawan serta pengikutsertaan karyawan ke dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilakukan oleh manajemen.
- h. Manajemen telah membuat asersi (*assertion*) Pernyataan manajemen yang terkandung didalam komponen laporan keuangan serta rangkaian deklarasi secara keseluruhan terkait penyajian Laporan Keuangan secara akurat, benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
- i. Manajemen telah menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.
- j. Keputusan Direksi PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelita Indonesia Djaya Tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT. Pelita Indonesia Djaya dibuat oleh Notaris IDA ADININGSIH, SH berkedudukan di Jakarta pusat Akta Notaris Nomor: 2 tanggal 4 Oktober 2022 Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0006.AH.02-02-Tahun 2022 tanggal 22 Oktober 2022 sbb:
Direktur Utama: Tuan Sukendra
Direktur Operasi: Nyonya Rooshardianti S
Direktur Keuangan: Tuan Suparno
- k. Remunerasi Direksi PT. Pelita Indonesia Djaya (PT. PID) ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor: 11.30/04/S-B/090/2021 tanggal 30 September 2021 sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana perubahan terakhir peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/09/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
- l. Direksi PT. Pelita Indonesia Djaya meminta persetujuan pelepasan dan penghapusbukuan 8 unit Aset kendaraan Toyota Innova PT. Pelita Indonesia Djaya melalui surat No 06.03/DIR/SB/001/100/2022 tanggal 03 Juni 2022.
- m. Pendampingan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya pada tanggal 24 Desember 2022 untuk meninjau pelaksanaan pekerjaan di masa peak season nataru tahun 2022.

Kegiatan Direksi

- a. Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi PT. Pelita Indonesia Djaya. Beberapa perubahan strategis dari sisi perencanaan maupun sistem manajemen perusahaan dilakukan di sepanjang tahun 2022.
- b. Dengan berbagai tantangan yang ada tersebut, manajemen mengambil berbagai kebijakan baik di bidang operasional maupun manajemen dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Berkat upaya tersebut dan didorong oleh kerja keras dari personel di semua lini, Perusahaan berhasil menutup tahun 2022 dengan kinerja keuangan dan operasional yang sudah mencukupi.



SOLID DAN FOKUS MENJAGA PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN



LAPORAN KEUANGAN

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)

Nomor : 00047/2.0999/AU.1/05/0139-2/1/II/2023
Tanggal : 28 Februari 2023

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT PELITA INDONESIA DJAYA DAN ENTITAS ANAK	
• Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2022 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021)	1 - 2
• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021)	3
• Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021)	4
• Laporan Arus Kas Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021)	5
• Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)	6 - 61
 <u>INFORMASI TAMBAHAN</u>	
LAPORAN KEUANGAN POKOK PT PELITA INDONESIA DJAYA (Informasi Keuangan - Induk Saja sebagai Laporan Keuangan tersendiri)	
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021)	
• Laporan Posisi Keuangan (Neraca) - Induk Saja	
• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Induk Saja	
• Laporan Perubahan Ekuitas - Induk Saja	
• Laporan Arus Kas - Induk Saja	

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



PT. PELITA INDONESIA DJAYA

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT. PELITA INDONESIA DJAYA DAN ENTITAS ANAKNYA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukendra
Alamat Kantor : Ruko Cempaka Mas Jl. Letjen Soeprapto
Blok Q no. 05 – Jakarta Pusat
Alamat Domisili sesuai KTP : Green Park, Jln Cutoon Wood II No. 1
Jati Warna – Pondok Gede Bekasi
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Suparno
Alamat Kantor : Ruko Cempaka Mas Jl. Letjen Soeprapto
Blok Q no. 05 – Jakarta Pusat
Alamat Domisili sesuai KTP : Villa Inti Persada Blok E3 No.10 RT 07/19
Pamulang - Tangerang
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT. Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya.
2. Laporan keuangan konsolidasian PT. Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT. Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan konsolidasian PT. Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya untuk memungkinkan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



PT. PELITA INDONESIA DJAYA

Jakarta, 28 Februari 2023
PT. Pelita Indonesia Djaya

Direktur Utama

Sukendra

Direktur Keuangan

Suparno

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00047/2.0999/AU.1/05/0139-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT PELITA INDONESIA DJAYA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DJOKO, SIDIK & INDRA



Indra Soesetjawan, Ak., CPA., CA., ACPA., CPI.
NRAP : AP. 0139

28 Februari 2023



**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

LAPORAN KEUANGAN

	Catatan	31 Des. 2022	31 Des. 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3f;3g;3j;5	22.792.560.464	33.949.640.758
Piutang Usaha	3f;3g;6	59.237.371.656	70.908.316.378
Setelah dikurangi provisi kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp4.372.876.211 dan Rp2.565.139.628			
Aset Keuangan Lancar Lainnya	3g;7	3.459.008.397	19.452.439.907
Persediaan	3l;8	9.880.441.615	4.855.617.377
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	3m;9	22.233.375.758	13.554.025.857
Aset Kontrak	10	62.101.204.126	46.284.749.763
Pajak Dibayar Dimuka	3w;18a	76.526.745.184	31.338.844.978
Jumlah Aset Lancar		256.230.707.200	220.343.635.018
ASET TIDAK LANCAR			
Properti Investasi	3n;11	19.941.529.615	17.042.363.615
Aset Tetap	3o;12	52.651.354.781	41.289.955.785
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp30.393.324.339 dan Rp25.727.763.198			
Aset Takberwujud, bersih	3p;13	2.005.878.621	2.509.700.114
Aset Hak Guna, bersih	3s;14	-	670.002.417
Aset Pajak Tangguhan	3w;18e	2.764.657.152	2.925.294.190
Aset Tidak Lancar Lainnya	3k;15	57.300.000	57.300.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		77.420.720.169	64.494.616.121
JUMLAH ASET		333.651.427.369	284.838.251.139

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Des. 2022	31 Des. 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman Jangka Pendek	3h;16	-	12.737.470.435
Utang Usaha	3h;17	41.107.066.944	29.071.418.988
Utang Pajak	3w;18b	44.136.845.927	4.297.955.248
Beban Akrua	3h;19	29.329.215.523	64.900.068.975
Bagian Lancar dari Liabilitas Jk. Panjang:	3h;21		
- Sewa Pembiayaan		5.519.000.800	1.101.752.859
- Liabilitas Sewa		-	101.678.500
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	3h;3r;20	14.604.622.816	2.249.192.968
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		134.696.752.010	114.459.537.973
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Pihak Berelasi	3f;3h;22	2.113.426.587	1.907.280.187
Liabilitas Jangka Panjang Setelah dikurangi:	3h;3s;21		
- Sewa Pembiayaan		8.369.131.000	3.838.559.225
- Liabilitas Sewa		-	477.380.592
Liabilitas Imbalan Kerja	3t;23	1.677.810.068	5.296.069.050
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		12.160.367.655	11.519.289.054
JUMLAH LIABILITAS		146.857.119.665	125.978.827.027
EKUITAS			
Modal Saham	24	2.010.000.000	2.010.000.000
Modal dasar sebanyak 2.010 saham ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal Desember 2022 dan 2021.			
Saldo Laba :			
Ditentukan Penggunaannya	3x;25a	157.660.308.343	154.442.902.454
Belum Ditentukan Penggunaannya	3x;25b	25.925.156.528	3.217.405.889
Komponen Ekuitas Lainnya	3t;26	1.067.260.689	(937.458.100)
Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada			
Pemilik Entitas Induk		186.662.725.560	158.732.850.243
Kepentingan Non Pengendali	3c;27	131.582.144	126.573.869
JUMLAH EKUITAS		186.794.307.704	158.859.424.112
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		333.651.427.369	284.838.251.139

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022	2021
Pendapatan Usaha	3v;28	457.529.361.127	336.999.559.832
Beban Usaha	3v;29	(379.658.232.730)	(302.609.591.947)
Laba Kotor		77.871.128.397	34.389.967.885
Beban Umum dan Administrasi	3v;30	(46.558.944.295)	(44.136.359.346)
Laba Usaha		31.312.184.102	(9.746.391.461)
Pendapatan (Beban) Non Usaha	3v;31	2.313.433.975	14.043.107.493
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		33.625.618.077	4.296.716.033
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan:			
Kini	3w;17c	(8.100.249.740)	(57.600.287)
Tanggungan	3w;17e	404.796.466	926.570.099
		(7.695.453.274)	868.969.812
Laba Tahun Berjalan		25.930.164.803	5.165.685.845
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan reklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	3t;26	2.570.152.293	601.973.367
Pajak Penghasilan Terkait	3w;26	(565.433.504)	(132.434.141)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		2.004.718.789	469.539.226
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		27.934.883.591	5.635.225.071
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk		25.925.156.527	5.160.100.449
Kepentingan Non Pengendali	3j;27	5.008.275	5.585.396
Laba Tahun Berjalan		25.930.164.803	5.165.685.845
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk		27.929.875.316	5.629.639.675
Kepentingan Non Pengendali	3j;27	5.008.275	5.585.396
Laba Tahun Berjalan		27.934.883.591	5.635.225.071
Laba Bersih per Saham Dasar		13.897.952,04	2.569.992,96

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	465.343.481.935	373.608.842.564
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(402.582.500.325)	(201.675.516.017)
Pembayaran Operasional	(39.951.355.924)	(109.133.646.344)
Pengeluaran Lain-lain	(2.356.227.356)	(26.236.618.870)
Pembayaran Pajak	(13.449.259.266)	(20.072.092.998)
Penerimaan Lain-lain	222.822.595	293.606.750
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	7.226.961.660	16.784.575.085
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan Aset Tetap	(16.043.332.143)	(4.152.460.478)
Penerimaan Dari Penjualan Aset Tetap	2.028.000.000	-
Penambahan Aset Tak Berwujud	-	(1.866.569.800)
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(14.015.332.143)	(6.019.030.278)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman Bank	8.947.819.716	29.200.000.000
Pembayaran utang Bank	(13.316.529.526)	(20.658.326.909)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dan (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(4.368.709.811)	8.541.673.091
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(11.157.080.294)	19.307.217.898
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	33.949.640.758	14.642.422.860
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR	22.792.560.464	33.949.640.758

*Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan*

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Saldo Laba		Komponen Ekuitas Lainnya	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Ditentukan Penggunaannya				Belum Ditentukan Penggunaannya
Saldo per 31 Desember 2020	2.010.000.000	131.974.755.011	20.525.452.883	(1.406.997.326)	222.515.512	153.325.726.080
Divestasi PT PANI	-	22.468.147.443	(22.468.147.443)	-	(101.527.039)	(101.527.039)
Labanya Tahun Berjalan	25b	-	5.160.100.449	-	5.585.396	5.165.685.845
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	3f;26	-	-	469.539.226	-	469.539.226
Saldo per 31 Desember 2021	2.010.000.000	154.442.902.454	3.217.405.889	(937.458.100)	126.573.869	158.859.424.112
Cadangan Umum	-	3.217.405.889	(3.217.405.889)	-	-	-
Labanya Tahun Berjalan	-	-	25.925.156.527	-	5.008.275	25.930.164.803
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	-	-	-	2.004.718.789	-	2.004.718.789
Saldo per 31 Desember 2022	2.010.000.000	157.660.308.343	25.925.156.527	1.067.260.689	131.582.144	186.794.307.704

*Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Pelita Indonesia Djaya didirikan di Jakarta pada Tanggal 29 September 1969 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 53 tanggal 29 September 1969 oleh Notaris Djojo Muljadi. S.H yang diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12 tanggal 10 Februari 1970.

Dalam perkembangannya PT Pelita Indonesia Djaya mengalami perubahan nama dikarenakan adanya keberatan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 26 tentang pemakaian nama Perseroan Terbatas. maka diputuskan merubah nama Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya Cooperation berkedudukan di Jakarta menjadi PT Pelita Indonesia Djaya berkedudukan di Jakarta. Hal ini telah disahkan dengan Akta Notaris SP. Henny Singgih. S.H No : 22 Tanggal 10 September 2001.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris No. 5, tanggal 12 Februari 2020, dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, S.H., dan telah mendapat Persetujuan Menhumkam Nomor : AHU-AH.01.03-0116585, tanggal 02 Maret 2020.

Maksud dan tujuan Perusahaan didirikan sebagai berikut:

- a) Berdagang dalam arti kata seluas-luasnya, menjalankan perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal. Selanjutnya bertindak sebagai perwakilan dari badan - badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- b) Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dan Perusahaan-Perusahaan dibidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat/laut, kepariwisataan, perhotelan, dan real estate serta percetakan.
- c) Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha yang berhubungan dengan rumah pendingin (*coold storage*).
- d) Mengusahakan galangan-galangan pembuatan dan reparasi kapal-kapal (*shipdocking and shiprepairing*).
- e) Menjalankan segala sesuatu yang selaras atau yang berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat dimuka dan akan menjalankan usaha-usahanya dalm arti kata yang seluas-luasnya, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain, secara komisi atau tidak ataupun bersama-sama dengan orang atau badan lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan asal yang demikian itu tidak melanggar hukum.

Perusahaan berkedudukan Ruko Cempaka Mas Blok Q Nomor 5, di Jalan Letjend Soeprapto, Jakarta Pusat.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, Entitas memiliki karyawan sebanyak 1.434 orang yang terdiri dari karyawan tetap 60 orang, karyawan PKWT 82 orang dan karyawan *outsourcing* 1.292 orang. Sedangkan tahun 2020 Entitas memiliki karyawan sebanyak 1.433 orang yang terdiri dari karyawan tetap 61 orang, karyawan PKWT 62 orang dan karyawan *outsourcing* 1.310 orang. Seluruh karyawan tersebut tidak diaudit.

b. Susunan Komisaris dan Direktur

Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 2, tanggal 04 Oktober 2022 yang diaktakan dihadapan Notaris Ida Adiningsih. S.H mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) dan telah mendapat persetujuan dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0198598.AH.01.11, tanggal 05 Oktober 2022. Maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Komisaris	:	Robert MP Sinaga
Direktur Utama	:	Sukendra
Direktur Keuangan	:	Suparno
Direktur Operasi	:	Dr. Rooshardianti

Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 5, tanggal 12 Februari 2020 yang diaktakan dihadapan Notaris Ida Adiningsih. S.H mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) dan telah mendapat persetujuan dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU-AH.01.03-0116585, tanggal 02 Maret 2020, maka susunan Komisaris dan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Komisaris	:	Muhammad Tukul Harsono
Direktur Utama	:	Effendi
Direktur Operasi	:	Dr. Rooshardianti

c. Entitas Anak

Entitas Anak yang dikonsolidasi dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Presentasi Kepemilikan	Tahun Operasi Komersial	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi	
					2022	2021
PT Pelita Bandar Nasional	Surabaya	Bongkar Muat	98%	1989	7.020.944.497	7.697.477.666

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

PT Pelita Bandar Nasional Surabaya, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19, tanggal 28 Juni 1989, juncto Akta Perubahan No. 15, tanggal 15 Maret 1999, kedua-duanya dibuat dihadapan Notaris Admadji, SH., di Surabaya dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan Nomor C- 13213 HT 01.01 tahun 2000, tanggal 6 Juli 2000.

Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 10, tanggal 22 Juni 2022, dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-000599339.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 22 Agustus 2022.

Berdasarkan Akte No. 3 tanggal 11 Juni 201, Notaris Sujadi. S.H., modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp250.000.000.

Maksud dan Tujuan Perusahaan didirikan adalah :

- Melakukan kegiatan jasa bongkar muat termasuk kegiatan dalam bidang stevedoring, cargodoring, recover, dan kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan usaha bongkar muat.
- Kegiatan usaha lainnya yang menunjang pelaksanaan usaha bongkar muat.

Perusahaan berkedudukan di Jalan Perak Barat No. 437. Surabaya. Pada tanggal 31 Desember 2020 jumlah karyawan tetap Perusahaan adalah 10 orang (tidak audit).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelita Bandar Nasional per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	2022	2021
Dewan Komisaris:		
Komisaris Utama :	Effendi	Effendi
Anggota Komisaris :	-	Hefi Apriyanto
Direksi :		
Direktur Utama :	Nur Hasanudin	Nur Hasanudin
Direktur Operasional :	Akhmad Syafran	-

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)

a. Penerapan dari amendemen dan/atau penyesuaian tahunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau sebelumnya:

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan PSAK 69, "Agrikultur";
- Penyesuaian Tahunan PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- Penyesuaian Tahunan PSAK 73, "Sewa";

b. Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi dan Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap" tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal.

Efektif 1 Januari 2025

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK 74, "Kontrak Asuransi" tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia.

b. Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyajian laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Asumsi ini digunakan berdasarkan pengetahuan manajemen atas fakta-fakta dan keadaan sekarang, asumsi-asumsi yang timbul atas pengetahuan tersebut dan ekspektasi saat ini atas kejadian dan tindakan di masa yang akan datang.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan konsep harga perolehan dan basis akrual, kecuali disebutkan lain dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 4.

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan aset dan liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan dan hasil usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dari Perusahaan dan entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Perusahaan memiliki pengendalian ketika Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas.

Perusahaan menggunakan metode akuisisi untuk mencatat akuisisi entitas anak. Biaya perolehan termasuk nilai wajar imbalan kontinjensi pada tanggal akuisisi.

Kepentingan nonpengendali atas total laba rugi komprehensif entitas anak diidentifikasi sesuai proporsinya dan disajikan sebagai bagian dari total laba komprehensif yang dapat diatribusikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak diidentifikasi pada tanggal kombinasi bisnis yang selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas perubahan ekuitas entitas anak dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh dalam tahun berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai. Bila pengendalian berakhir dalam tahun berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk bagian tahun ketika pengendalian masih berlangsung.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Kepentingan nonpengendali disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian dalam hal yang material telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak.

d. Kombinasi Bisnis

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi untuk setiap akuisisi yang dilakukan baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui akan berdampak pada aset atau liabilitas.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Jika, setelah penilaian kembali jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada). Selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak diakui ke laba rugi pada saat kehilangan pengendali.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendali.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7, Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas pelapor;
 - b) Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas pelapor; atau
 - c) Personal manajemen kunci Entitas pelapor atau perusahaan induk Entitas pelapor.
- 2) Suatu perusahaan berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

2) Suatu perusahaan berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- a) Entitas dan Entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas induk Entitas anak dan Entitas anak berikutnya terkait dengan Entitas lain);
- b) Suatu Entitas adalah Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau Entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- c) Kedua perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- d) Satu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah Entitas asosiasi dari Entitas ketiga;
- e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan;
- f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
- g) Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (entitas induk dari entitas); dan
- h) Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi penting dengan pihak berelasi baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

g. Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain; dan
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah grup telah melakukan pemilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Aset Keuangan (lanjutan)

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pengukuran

Pada pengakuan awal grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

• **Instrumen Utang**

Pengukuran instrumen utang selanjutnya tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset dan karakteristik arus kas aset tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah aset yang dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual di mana arus kas tersebut semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam "penghasilan bunga" dalam laporan laba rugi konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi konsolidasian dan disajikan sebagai "lain-lain, bersih". Kerugian penurunan nilai disajikan sebagai item baris terpisah dalam laporan laba rugi konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2022, aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan aset keuangan lancar lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

• **Instrumen Ekuitas**

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Perseroan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Perseroan untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan / (kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Saat membuat penilaian perusahaan menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan bukan perubahan jumlah kerugian kredit yang diharapkan. Untuk membuat penilaian tersebut, perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal dan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yaitu tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal.

Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo pada entitas sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup). *Expected Credit Loss (ECL)* didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan.

Cadangan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangkan dari jumlah tercatat bruto aset tersebut.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit yang diharapkan ECL tersebut untuk piutang usaha dan piutang lain-lain.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan nilai wajar efek yang signifikan dan berkepanjangan di bawah harga perolehan dapat dianggap sebagai indikator bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.

Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer). Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan. dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, dan utang pihak berelasi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Setelah pengakuan awal sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, Grup mencatat liabilitas keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika dampak diskontonya signifikan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika dibayar.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang membuktikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil yang diterima setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

i. Saling-Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian jika dan hanya jika saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

j. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai Setara Kas antara lain:

- 1) Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya (termasuk *deposit on call*), dan
- 2) Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

k. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai bank garansi jaminan pelaksanaan dan lainnya untuk tujuan tertentu disajikan sebagai "kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya."

l. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode First In First Out. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

I. Persediaan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih pada tahun berjalan.

Cadangan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca).

Persediaan rusak atau persediaan yang alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakan, dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok "aset tidak lancar lainnya".

m. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus.

Pada akhir periode pelaporan biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan. Biaya dibayar dimuka jangka panjang disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca).

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

n. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui dalam jumlah tercatat properti investasi jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan properti investasi tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

Properti investasi awalnya diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Selanjutnya setelah penilaian awal, properti investasi dinilai dengan menggunakan nilai wajar, yaitu setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan dan akan digunakan sebagai properti investasi setelah selesai.

Akumulasi biaya perolehan dan biaya pembangunan (termasuk biaya pinjaman yang terjadi) diamortisasi pada saat selesai dan siap untuk digunakan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Properti Investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan properti investasi (ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset) diakui dalam laba rugi konsolidasian pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Manajemen melakukan reklasifikasi penyajian aset tetap berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Makassar, Surabaya dan Tretes, dari sebelumnya diklasifikasikan sebagai aset tetap berubah menjadi properti investasi pada triwulan III tahun 2021.

Pada triwulan IV tahun 2021, manajemen melakukan perubahan kebijakan pengukuran dari model biaya menjadi model nilai wajar terhadap aset berupa tanah dan bangunan tersebut. Perubahan model pengukuran tersebut berlaku prospektif sebagaimana diatur pada standar yang berlaku. Nilai wajar didasarkan pada laporan penilaian aset tanah dan bangunan oleh penilai independen bernomor 00017/2.0069-07/PI/05/0523/1/II/2022, tanggal 27 Desember 2021 dan 00176/2.0126-00/PI/05/0156/1/XII-2021, tanggal 31 Desember 2021.

Kenaikan (penurunan) yang berasal dari nilai wajar pada tanggal posisi laporan keuangan dibanding dengan nilai buku atas penerapan pertama kali atau nilai wajar sebelumnya diakui sebagai keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar aset non keuangan dan disajikan pada pendapatan (beban) non usaha.

Selanjutnya pada setiap tanggal laporan posisi keuangan atau sekurang-kurangnya pada akhir tahun dengan pilihan model nilai wajar. Perseroan melakukan telaahan atas nilai wajar properti investasi - tanah dan bangunan. Kenaikan (penurunan) yang berasal dari nilai wajar pada tanggal posisi laporan keuangan dibanding nilai wajar sebelumnya, merupakan keuntungan (kerugian) dan disajikan pada kelompok pendapatan (beban) non usaha.

o. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan (*acquisition cost*) setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Namun, tidak termasuk biaya perbaikan dan perawatan sehari-hari.

Sampai dengan saat ini, Perusahaan masih memilih menggunakan model biaya (*cost model*) dalam melakukan pengukuran untuk seluruh aset tetapnya setelah pengakuan awal aset tetap yang bersangkutan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan seperti beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut dan diakui dalam laporan rugi komprehensif konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Penyusutan (selain tanah) dimulai pada tanggal aset tersebut digunakan atau siap untuk digunakan, penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Tarif Penyusutan %
Bangunan	40	2,5
Mesin Instalasi dan Peralatan Penunjang	6-7	15
Alat-alat Berat	12	8,33
Kendaraan	5	20,00
Inventaris dan Perabotan Rumah Tangga	6-7	15,00

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Nilai residu, umur manfaat serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset Tetap Usul Hapus

Aset tetap yang tidak memberikan manfaat dalam aktivitas produksi/usahanya atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan/pelepasannya dikategorikan sebagai aset tetap usul hapus dan disajikan pada kelompok aset tidak lancar lainnya.

Aset tetap pada kategori tersebut dilakukan penurunan nilai sebesar nilai tercatatnya pada saat tidak lagi memberikan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Akumulasi penurunan nilai aset tetap usul hapus dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Aset tetap usul hapus dihentikan pengakuannya bilamana telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap usulan penghapusan ini diakui pada kelompok pendapatan atau beban non usaha.

p. Aset Takberwujud

Aset Takberwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sesuai umur manfaat ekonomis dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mengalami penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan.

Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengubah periode atau metode amortisasi dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dicatat sebagai beban pada laba rugi sesuai dengan fungsi aset takberwujud tersebut.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi diuji setiap tahun untuk penurunan nilai secara individual atau pada tingkat unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Aset Takberwujud (lanjutan)

Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak maka perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi.

Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode tidak dapat ditangguhkan termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan awal operasi dan biaya pra-operasi / perintisan usaha.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud selama 5 (lima) tahun.

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.

Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

Setiap tanggal pelaporan, aset non-keuangan yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Pemulihan nilai langsung diakui dalam laba rugi konsolidasian, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali.

Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik kembali.

r. Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak merupakan kewajiban perusahaan untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan di mana perusahaan telah menerima imbalan (atau jumlah yang jatuh tempo) dari pelanggan sebelum kewajiban pelaksanaan direalisasikan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Transaksi Sewa

Pada tanggal awal dimulainya suatu kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak mengandung sewa apabila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah:

- 1) Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- 2) Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Aset yang diperoleh melalui sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Pada tanggal permulaan, lessee mengukur aset hak guna pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessee, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh lessee dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar serta biaya restorasi.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Grup menggunakan suku bunga yang diterbitkan Lembaga Penjamin Pinjaman sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi penghentian tersebut.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Transaksi Sewa (lanjutan)

Setelah awal masa sewa, setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi.

Aset hak-guna disajikan sebagai bagian dari Aset Tetap, sedangkan liabilitas sewa disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa satu tahun atau kurang dan sewa dengan aset bernilai rendah.

Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset hakguna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

t. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang dibayarkan dalam waktu kurang dari satu tahun, meliputi antara lain gaji, upah dan iuran jaminan sosial. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada laporan rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan serta dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar/beban akrual.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Grup memberikan program imbalan pasti berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak untuk karyawan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020. Hak atas imbalan ini biasanya berdasarkan pencapaian masa kerja karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama. Estimasi biaya imbalan ini diakui selama masa kerja. Metode perhitungan aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini adalah *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali imbalan pascakerja yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya dan dilaporkan di saldo laba.

Biaya jasa kini, biaya bunga dan biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi konsolidasian.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Pada tanggal 4 April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") menerbitkan siaran pers mengenai 'Mengatribusikan manfaat untuk masa kerja (PSAK 24)' sebagai tanggapan terhadap International Financial Accounting Standard Interpretation Committee Agenda Decision: International Accounting Standard ("IAS") 19 Employee Benefit - Attributing Benefit to periods of service ("IFRIC") yang diterbitkan di bulan Mei 2021. DSAK-IAI menilai bahwa skema manfaat pensiun yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja sepertinya memiliki karakteristik yang serupa dengan pola fakta yang dibahas dalam IFRIC.

Manajemen telah mengkaji dampak siaran pers DSAK-IAI ini dan menyimpulkan bahwa dampak perubahan pola fakta tidak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode lalu, dan oleh karena itu telah membukukan dampak perubahan tersebut pada laporan laba rugi periode berjalan.

u. Provisi

Provisi diakui apabila Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban ini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai beban bunga.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- 2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
- 3) Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel. Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Grup menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut: (lanjutan)

- 4) Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah marjin.
- 5) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- a) Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan).
- b) Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu. Perusahaan memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Uang yang diterima sehubungan dengan pelayanan jasa yang belum dilaksanakan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan disajikan sebagai liabilitas kontrak.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

w. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut diakui langsung pada ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Aset dan liabilitas pajak kini diakui, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut. maka kelebihanannya diakui sebagai aset dan jika jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

w. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding ketika hasil banding sudah diputuskan kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Tangguhan

Grup menggunakan metode neraca (*balance sheet method*) pada akuntansi pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer yang ada antara aset dan liabilitas atas dasar pajak dengan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian. Untuk masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi, aset atau liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam jumlah bersih.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditinjau kembali pada tanggal laporan posisi keuangan dan nilai tercatat tersebut diturunkan apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai untuk kompensasi tersebut.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

w. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan. kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pajak tangguhan yang berkaitan dengan transaksi baik yang ada di pendapatan komprehensif lainnya atau langsung dibebankan ke ekuitas, dicatat pada pendapatan komprehensif lainnya atau ekuitas bersangkutan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan serta Perseroan dan entitas anak yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

x. Penggunaan Saldo Laba

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar keputusan/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) direalisasikan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Penggunaan tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada pembagian dividen, biaya pegawai dan penyisihan saldo laba ke cadangan umum. Pembagian laba tersebut tidak diperlakukan sebagai beban (expense) melainkan sebagai distribusi/ pengurang saldo laba.

y. Laba Per Saham Dasar

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

z. Informasi Segmen

Grup melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasi utama dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Direksi adalah pengambil keputusan operasional Grup. Segmentasi berdasarkan sifat usaha. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- 1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban;
- 2) yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;
- 3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

z. Informasi Segmen

Untuk tujuan manajemen, Grup membagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji hasil operasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

aa. Kejadian Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian. apabila jumlahnya material telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset atau liabilitas yang terpengaruh di masa mendatang.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah utang pajak kini atau masa mendatang atau jumlah klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan karena proses pemeriksaan yang masih berlangsung atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

a. Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan (lanjutan)

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan utang pajak yang tidak pasti atau klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan terkait dengan ketidakpastian posisi perpajakan, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" dan PSAK 46, "Pajak Penghasilan". Grup membuat analisa untuk semua ketidakpastian posisi perpajakan untuk menentukan jika utang pajak atas manfaat pajak yang tidak pasti atau cadangan atas klaim restitusi pajak yang tidak dapat terpulihkan harus diakui.

b. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu saat sewa terjadi, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

c. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

d. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Provisi yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

d. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Estimasi dan Asumsi

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun-tahun mendatang dipaparkan di bawah ini.

a. Cadangan Penurunan Nilai Piutang

Grup menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan piutang lain-lain dengan menggunakan tingkat provisi yang berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Grup menyesuaikan kerugian kredit historis masa lalu dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan.

Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

b. Cadangan Penurunan Nilai Persediaan

Grup menghitung pencadangan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang akan digunakan pada masa datang dan kondisi dari persediaan. Ketidakpastian terkait dengan faktor-faktor ini dapat menyebabkan nilai realisasi yang berbeda dengan nilai tercatat dari persediaan.

c. Pemulihan Dari Aset Pajak Tangguhan

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai dengan nilai dimana kemungkinan besar penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

c. Pemulihan Dari Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai dengan nilai dimana kemungkinan besar penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

d. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Grup mengestimasi masa manfaat dari aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan ekspektasi utilisasi dari aset dengan didukung rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud didasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain penggunaan aset. Namun, ada kemungkinan, hasil operasi di masa depan dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Jumlah dan saat beban dicatat setiap periode akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan kondisi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Grup akan meningkatkan beban usaha dan menurunkan aset tidak lancar yang tercatat. Penambahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap Grup menurunkan beban usaha dan meningkatkan aset tidak lancar yang tercatat.

e. Nilai Wajar Properti Investasi

Nilai wajar dari properti investasi ditentukan menggunakan teknik valuasi yang dilakukan oleh penilai independen profesional yang memiliki kualifikasi yang relevan dan memiliki pengalaman yang berhubungan dengan properti investasi yang akan dinilai. Setiap perubahan dalam asumsi penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal akan berdampak pada nilai tercatat properti investasi.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

f. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali suatu aset atau unit penghasil kas ditentukan berdasarkan yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai, dihitung berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen.

Asumsi penting untuk penurunan nilai aset non keuangan sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini. Rencana strategis mencakup perkiraan dampak perubahan iklim bisnis di masa depan terhadap Grup sejauh ini dapat diperkirakan dengan andal.

g. Liabilitas Imbalan Kerja

Nilai kini kewajiban imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan sejumlah asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas investasi dana program pensiun iuran pasti dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat kewajiban imbalan kerja.

Asumsi penting lainnya untuk kewajiban imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

h. Pajak Penghasilan

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, provisi, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat dipulihkan nilainya, dimana hal ini tergantung pada kecukupan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen atas arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi penjualan barang atau jasa, harga, biaya operasi, belanja modal dan transaksi lainnya di masa depan.

i. Cadangan Penurunan Nilai Persediaan Usang dan Bergerak Lambat

Cadangan persediaan usang dan bergerak lambat diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia. termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Cadangan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas		
Rupiah	82.188.643	135.714.443
Sub Jumlah	82.188.643	135.714.443
Bank		
Pihak berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	21.788.501.811	32.574.876.968
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	646.423.054	578.397.545
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	135.904.853	381.522.255
PT Bank BJB	15.324.221	154.520.358
Jumlah Pihak Berelasi	22.586.153.939	33.689.317.126
Pihak Ketiga:		
PT Bank Central Asia (Persero), Tbk	124.217.882	124.609.189
Jumlah Pihak Ketiga	124.217.882	124.609.189
Jumlah	22.792.560.464	33.949.640.758

Seluruh kas dan setara kas adalah milik Perusahaan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas kewajiban/ pinjaman lainnya serta tidak ada yang dibatasi penggunaannya.

6. PIUTANG USAHA

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pihak Berelasi		
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	58.558.199.393	61.056.723.270
PT Sarana Bandar Nasional	-	698.527.513
Sub Jumlah	58.558.199.393	61.755.250.783
Pihak Ketiga		
PT Cakrawala Inti Persada	1.100.000.000	4.840.000.000
PT PINDAD Internasional	700.000.000	-
PT Karya Retra	683.981.360	683.981.360
PT Kukuh Mandiri	261.990.760	261.990.760
PT Wahana Ria Cakrawala	237.691.740	237.691.740
PT Kasuang Semesta Mandiri	164.298.240	164.298.240
Koperasi Bina Sejahtera	-	1.179.605.657
CV Yoga Pratama Jaya	-	447.076.326
RS Pelayaran Nasional Indonesia	-	318.426.380
Jumlah Dipindahkan	3.147.962.100	8.133.070.463

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

	31 Desember 2022	31-Des-21
Jumlah Pindahan	3.147.962.100	8.133.070.463
PT Hoka Mandiri	-	112.500.000
Lainnya	957.833.387	2.440.222.298
Sub Jumlah	4.105.795.487	10.685.792.761
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.071.023.332)	(2.300.368.133)
Jumlah Entitas Induk	58.592.971.547	70.140.675.411
Entitas Anak		
Sinar Jaya Wijaya	308.954.752	415.297.171
PT Prima Sejahtera Line	348.240.045	298.925.457
Sari Ampenan	159.636.579	232.639.748
Eddy Barokah	76.070.964	76.320.964
PT Sumber Graha Sejahtera	53.100.647	-
Lainnya	250.000	9.229.122
Sub Jumlah	946.252.987	1.032.412.462
Cadangan kerugian penurunan nilai	(301.852.878)	(264.771.495)
Jumlah Entitas Anak	644.400.109	767.640.967
Jumlah	59.237.371.656	70.908.316.378

Rincian piutang usaha berdasarkan umurnya:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
0 - 30 hari	-	1.505.489.921
31 - 60 hari	1.490.118.461	2.029.154.304
61 - 90 hari	146.755.613	1.372.658.146
91 - 120 hari	158.096.800	915.129.024
> 120 hari	3.257.077.600	5.895.773.828
Jumlah	5.052.048.474	11.718.205.223

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo Awal	2.565.139.628	858.778.470
Pembentukan	1.807.736.583	1.706.361.158
Saldo Akhir	4.372.876.211	2.565.139.628

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Terhadap piutang usaha yang berasal dari pihak-pihak berelasi, Perseroan tidak membentuk cadangan provisi atas penurunan nilai karena manajemen berkeyakinan jumlah piutang tersebut dapat tertagih.

7. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>Pihak Berelasi</u>		
Piutang Pegawai	623.833.387	625.023.291
<u>Pihak Ketiga</u>		
Koperasi	2.111.660.118	2.134.680.670
Lainnya	921.579.370	16.890.800.424
Sub Jumlah	3.657.072.875	19.650.504.385
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(198.064.478)	(198.064.478)
Jumlah	3.459.008.397	19.452.439.907

Piutang lainnya kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2021 merupakan pembayaran pinjaman modal kerja untuk Koperasi Karyawan PID dan piutang lelang kendaraan bermotor kepada karyawan serta piutang atas pelepasan PT PANI.

8. PERSEDIAAN

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Permakanan	2.885.363.790	2.697.090.211
Supplement Food	2.727.467.600	
Bahan <i>Chemical</i>	2.144.996.415	1.818.527.166
Maintenance	1.012.062.014	
Meal Box	598.782.898	
AMDK	439.742.185	
Lainnya	72.026.713	340.000.000
Jumlah	9.880.441.615	4.855.617.377

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat persediaan tidak melebihi nilai pengganti atau pemulihan dan tidak terdapat persediaan usang.

Persediaan tidak diasuransikan dan manajemen berpendapat bahwa, tingkat risiko yang akan terjadi terhadap persediaan tidak signifikan sehingga tidak perlu untuk diasuransikan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Uang Muka	21.756.677.977	12.952.525.489
b. Biaya Dibayar Dimuka	476.697.781	601.500.368
Jumlah	22.233.375.758	13.554.025.857
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Uang Muka:		
Permakanan	8.926.641.346	3.713.713.350
Jasa Pelayanan Lainnya	6.596.572.886	-
Administrasi dan umum	3.359.223.362	3.893.937.470
Jasa Pelayanan Kapal	2.032.663.645	4.697.223.112
Jasa Kebersihan di Kapal	794.775.738	647.651.557
Lainnya	46.801.000	-
Jumlah	21.756.677.977	12.952.525.489
b. Biaya Dibayar Dimuka:		
Biaya Asuransi	430.588.837	557.055.924
Biaya Sewa	44.444.444	44.444.444
Administrasi dan Umum	1.664.500	-
Jumlah	476.697.781	601.500.368

Uang muka permakanan merupakan uang muka yang dibayarkan divisi pengadaan untuk membeli bahan makanan yang akan dikirim ke kapal-kapal PT Pelni (Persero).

Uang muka jasa pelayanan lainnya merupakan uang muka yang dibayarkan divisi komersial untuk membeli material dan suku cadang untuk pekerjaan pemeliharaan di atas kapal PT Pelni (Persero).

Uang muka administrasi dan umum merupakan uang muka tunjangan hari raya karyawan dan biaya operasional kantor untuk tahun 2022 dan pembayaran utang pajak atas pemeriksaan pajak tahun 2018 dan 2019 serta tunjangan pendidikan pegawai organik PT PID untuk tahun 2021.

Uang muka jasa pelayanan kapal merupakan uang muka gaji pengamanan kapal dan tiket petugas di kapal.

Uang muka jasa kebersihan di kapal merupakan alat penunjang kebersihan diatas kapal-kapal PT Pelni (Persero).

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

10. ASET KONTRAK

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pihak Berelasi		
PT PELNI:		
Permakanan	34.578.308.188	24.045.507.060
Usaha Jasa	16.719.760.689	12.768.123.344
Usaha lainnya	8.746.783.316	5.075.463.164
Sub Jumlah	60.044.852.194	41.889.093.568
Pihak Ketiga		
Usaha lainnya	2.056.351.932	4.395.656.195
Jumlah	62.101.204.126	46.284.749.763

Aset kontrak permakanan merupakan pendapatan yang masih harus diterima atas jasa pengadaan bahan permakanan di atas kapal Pelni, jasa *outsourcing*, pekerjaan perawatan dan perbaikan kapal.

Aset kontrak usaha jasa merupakan pendapatan yang masih harus diterima atas jasa pengamanan, CS kapal dan darat, janitor dan house keeping.

Aset kontrak usaha lain merupakan pendapatan yang masih harus diterima atas jasa perbaikan di atas kapal dan tenaga kerja bongkar muat.

11. PROPERTI INVESTASI

	2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Tanah	15.294.363.614	2.549.066.000	-	-	17.843.429.614
Gedung	1.748.000.001	350.100.000	-	-	2.098.100.001
Jumlah	17.042.363.615	2.899.166.000	-	-	19.941.529.615
	2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Tanah	-	13.189.174.709	-	2.105.188.905	15.294.363.614
Gedung	-	900.440.001	-	847.560.000	1.748.000.001
Jumlah	-	14.089.614.710	-	2.952.748.905	17.042.363.615

Berdasarkan laporan penilaian aset tanah dan bangunan oleh penilai independen bernomor 00148/2.0004-01/PI/09/0378/1/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, nilai wajar tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Perak Timur No. 114, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, sebesar Rp2.940.791.000. Peningkatan nilai wajar tanah dan bangunan sebesar Rp2.899.166.000 diakui sebagai keuntungan surplus nilai wajar pada kelompok pendapatan non usaha pada tahun terjadinya. (Lihat Catatan 31a)

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

11. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Berdasarkan laporan penilaian aset tanah dan bangunan oleh penilai independen bernomor 00017/2.0069-07/PI/05/0523/1/II/2022, tanggal 27 Desember 2021, nilai wajar tanah dan bangunan yang berlokasi di Wisma Bahtera Tretes, Prigen, Kabupaten Pasuruan masing-masing sebesar Rp13.507.590.000 dan Rp978.500.000, serta 00176/2.0126-00/PI/05/0156/1/XII-2021, tanggal 31 Desember 2021, nilai wajar tanah dan bangunan yang berlokasi di Maros, Sulawesi Selatan sebesar Rp2.514.648.615. Peningkatan nilai wajar tanah dan bangunan sebesar Rp14.089.614.710 diakui sebagai keuntungan surplus nilai wajar pada kelompok pendapatan non usaha pada tahun terjadinya. (Lihat Catatan 31a)

12. ASET TETAP

	2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan:					
<u>Perolehan Langsung</u>					
Tanah	3.713.978.048	-	16.000.000	-	3.697.978.048
Gedung	16.632.640.067	-	-	-	16.632.640.067
Kendaraan	8.986.819.822	2.093.108.570	-	-	11.079.928.392
Inventaris Kantor	1.569.662.278	90.322.178	-	-	1.659.984.456
Kontainer	773.449.543	145.000.000	-	-	918.449.543
Perl. Produksi	1.640.523.713	487.979.287	-	-	2.128.503.000
Sub Jumlah	33.317.073.471	2.816.410.035	16.000.000	-	36.117.483.506
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>					
Kendaraan	33.651.645.507	17.039.574.168	3.887.724.060	-	46.803.495.615
Jumlah	66.968.718.978	19.855.984.203	3.903.724.060	-	82.920.979.121
Akumulasi					
Penyusutan dan					
Penurunan Nilai:					
<u>Perolehan Langsung</u>					
Gedung	1.544.347.486	229.004.130	-	-	1.773.351.616
Kendaraan	3.274.917.281	1.406.666.935	-	-	4.681.584.216
Inventaris Kantor	879.519.974	198.497.502	-	-	1.078.017.476
Kontainer	773.449.549	2.416.667	-	-	775.866.216
Perl. produksi	841.171.365	441.336.567	-	-	1.282.507.932
Sub Jumlah	7.313.405.654	2.277.921.801	-	-	9.591.327.456
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>					
Kendaraan	18.414.357.543	5.594.306.450	(3.206.667.104)	-	20.801.996.890
Jumlah	25.727.763.198	7.872.228.251	(3.206.667.104)	-	30.393.324.345
Nilai Buku	41.240.955.780				52.527.654.776
Aset Dalam Penyelesaian	49.000.005	74.700.000	-	-	123.700.005
Nilai Bersih	41.289.955.785				52.651.354.781

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

	2021				Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Biaya Perolehan:					
<u>Perolehan Langsung</u>					
Tanah	1.637.320.846	3.207.465.740	-	(1.130.808.538)	3.713.978.048
Gedung	16.650.192.236	830.007.831	-	(847.560.000)	16.632.640.067
Kendaraan	8.986.819.822	-	-	-	8.986.819.822
Inventaris Kantor	1.688.420.222	64.112.728	182.870.672	-	1.569.662.278
Kontainer	1.151.213.300	-	377.763.757	-	773.449.543
Perl. Produksi	1.640.523.713	-	-	-	1.640.523.713
Sub Jumlah	15.104.297.903	4.101.586.299	560.634.429	(1.978.368.538)	33.317.073.471
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>					
Kendaraan	31.167.381.903	2.484.263.604	-	-	33.651.645.507
Jumlah	46.271.679.806	6.585.849.903	560.634.429	(1.978.368.538)	66.968.718.978
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai:					
<u>Perolehan Langsung</u>					
Gedung	1.116.144.969	428.202.517	-	-	1.544.347.486
Kendaraan	2.149.148.812	1.125.768.469	-	-	3.274.917.281
Inventaris Kantor	757.054.551	206.078.402	83.612.979	-	879.519.974
Kontainer	1.151.213.306	-	(377.763.757)	-	773.449.549
Perl, produksi	579.434.390	261.736.975	-	-	841.171.365
Jumlah	5.752.996.028	2.021.786.362	(461.376.736)	-	7.313.405.654
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>					
Kendaraan	15.812.186.989	4.300.185.270	(1.698.014.716)	-	18.414.357.543
Jumlah	21.565.183.017	6.321.971.633	(2.159.391.452)	-	25.727.763.198
Nilai Buku	24.706.496.789				41.240.955.780
Aset Dalam Penyelesaian	5.894.936.943	-	-	(5.845.936.938)	49.000.005
Nilai Bersih	30.601.433.732				41.289.955.785

Seluruh aset tetap tidak diasuransikan dan manajemen berpendapat bahwa, tingkat risiko yang akan terjadi terhadap aset tetap tidak signifikan sehingga tidak perlu untuk diasuransikan.

Reklasifikasi ke Properti Investasi terdiri dari Jalan dan Bangunan Gudang Makassar sebesar Rp757.300.000, Tanah dan Hak atas Tanah Wisma Bahtera Tretes sebesar Rp1.101.183.538, Jalan dan Bangunan Wisma Bahtera Tretes sebesar Rp78.260.000 serta Tanah dan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perak Timur 114 masing - masing sebesar Rp29.625.000 dan Rp12.000.000 (Lihat Catatan 11)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada potensi penurunan nilai aset tetap pada tanggal laporan posisi keuangan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

	2022	2021
Beban Pokok Usaha (lihat catatan 29)	5.889.308.012	4.219.053.542
Beban Umum & Administrasi (lihat catatan 30)	1.982.920.239	2.102.918.090
Jumlah	7.872.228.251	6.321.971.633

13. ASET TAKBERWUJUD

	2022				Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Biaya Perolehan:					
Perangkat Lunak	3.404.159.935	-	-	-	3.404.159.935
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai:					
Perangkat Lunak	894.459.821	503.821.493	-	-	1.398.281.314
Nilai Buku	4.298.619.756	503.821.493	-	-	2.005.878.621
	2021				Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Biaya Perolehan:					
Perangkat Lunak	1.537.590.135	-	-	1.866.569.800	3.404.159.935
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai:					
Perangkat Lunak	577.410.092	317.049.729	-	-	894.459.821
Nilai Buku	2.115.000.227	317.049.729	-	1.866.569.800	2.509.700.114

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada potensi penurunan nilai aset tidak berwujud pada tanggal laporan posisi keuangan.

Beban amortisasi aset tak berwujud dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

	2022	2021
Beban Pokok Usaha (catatan 29)	49.694.649	48.279.865
Beban Umum dan Administrasi (catatan 30)	454.126.844	268.769.864
Jumlah	503.821.493	317.049.729

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

14. ASET HAK GUNA

	2022			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan:				
Gedung	719.065.881	-	719.065.881	-
Alat Angkut	2.168.348.762	-	2.168.348.762	-
Jumlah	2.887.414.643	-	2.887.414.643	-
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai:				
Gedung	523.366.782	99.661.573	623.028.355	-
Alat Angkut	1.694.045.444	102.485.155	1.796.530.599	-
Jumlah	2.217.412.226	202.146.728	2.419.558.954	-
Nilai Buku	670.002.417			-
	2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan:				
Gedung	719.065.881	-	-	719.065.881
Alat Angkut	2.168.348.762	-	-	2.168.348.762
Jumlah	2.887.414.643	-	-	2.887.414.643
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai:				
Gedung	360.284.210	163.082.572	-	523.366.782
Alat Angkut	1.168.777.056	525.268.388	-	1.694.045.444
Jumlah	1.529.061.266	688.350.960	-	2.217.412.226
Nilai Buku	1.358.353.377			670.002.417

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada potensi penurunan nilai aset hak guna pada tanggal neraca.

Beban amortisasi aset hak guna dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

	2022	2021
Beban Umum dan Administrasi (catatan 30)	202.146.728	823.003.468
Pendapatan Non Usaha (catatan 31a)	-	(134.652.508)
Jumlah	202.146.728	688.350.960

Aset hak guna merupakan objek sewa kendaraan alat angkut selama 3 (tiga) tahun sejak Desember 2018 hingga Desember 2021 dan sewa Gedung di Sumur Batu dan Kemayoran Jakarta Pusat dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun sejak November 2020 hingga Desember 2023.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Deposito Pihak berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	57.300.000	57.300.000
Jumlah	57.300.000	57.300.000

16. PINJAMAN JANGKA PENDEK

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-	12.737.470.435
	-	12.737.470.435

Pinjaman jangka pendek merupakan utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 5.000.000.000 dengan nomor surat RCO.JKB/0045/KMK/2020 dengan Tingkat suku bunga: 8,50% per tahun. Jangka Waktu Kredit 1 Oktober 2020 s/d 30 September 2021 (12 bulan). Tujuan penggunaan kredit yaitu pembiayaan kebutuhan produktif usaha food and beverages, outshourching service, car rent, wisata, informastion technology service management (ITSM), maintenance service, crewing dan usaha penunjang lainnya untuk melayani PT Pelni (Persero). Penerima kredit menyerahkan agunan kepada Bank Sebidang tanah SHGB rumah toko 4 (empat) lantai di komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q No. 5 Jl. Letjen Suprpto, Kel Sumur Batu Kec Kemayoran Jakarta Pusat.

Perjanjian kredit ini telah dilakukan addendum I (kesatu) dengan Nomor Akta 01, tanggal 01 April 2021 dengan jangka waktu 01 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022, terakhir telah diubah dengan addendum II (kedua) tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2023. Kemudian diubah yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.JKB/0099/KMK/2021, Akta Nomor 02, tanggal 1 Nopember 2021, dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., notaris di Jakarta.

Selanjutnya, dilakukan Addendum I, tanggal 31 Oktober 2022, tentang penurunan limit kredit semula Rp12.000.000.000 menjadi Rp10.000.000.000 dan perpanjangan jangka waktu kredit terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023. Agunan kredit dalam bentuk:

- Bukan Aset Tetap, berupa seluruh tagihan/piutang usaha kepada pihak ketiga, telah diikat Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W10.00606013.AH.05.01.Tahun 2021, tanggal 4 Nopember 2021 dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000;
- Aset Tetap, yaitu tanah dan bangunan ruko, terletak di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q, Nomor 5, Jalan Letjen Suprpto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan bukti kepemilikan berupa: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1488/Sumur Batu, telah diikat Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00622/2022, tanggal 12 April 2021, dengan nilai pengikatan sebesar Rp8.487.000.000.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

16. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

b. (lanjutan)

Tanah dan bangunan villa yang terletak di Jalan Wilis (Taman Wisata) Nomor 19, Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan berupa:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00804/Pecalukan, seluas 3.915 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00805/Pecalukan, seluas 3.766 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00806/Pecalukan, seluas 4.488 M2;

Ketiga sertifikat tersebut telah diikat Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02783/2021, tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp9.000.000.000.

Tidak ada pengingkaran kewajiban oleh Grup sehubungan dengan kewajiban tersebut diatas.

Fasilitas pinjaman jangka pendek telah dilunasi oleh Perusahaan pada periode Desember 2022.

17. UTANG USAHA

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT Amidis Tirta Mulia	4.243.293.663	2.270.567.784
PT Tisindo Jaya	4.042.074.484	2.122.130.503
PT Telekomunikasi Indonesia	2.306.372.386	6.447.402.085
PT Osami	2.093.625.060	-
PT Ferindo Sakti	1.906.094.611	737.325.434
PT Sukanda Djaya	1.666.083.106	2.910.666.957
PT Telenet	1.530.015.925	4.514.293.888
CV Berkat Zaitun	1.410.534.500	-
PT Sang Hyang Seri	1.355.970.000	-
PT Enseval Putera Megatrading Tbk	1.292.579.162	1.011.747.847
CV Subandar	1.277.891.050	-
Ciputri Prakarsa Utama	1.194.075.100	-
PT Tani Hub Indonesia	1.092.537.640	-
PT Sinar Niaga Sejahtera	924.435.389	-
PT Cipta Karya Mandiri Insani	807.458.061	436.600.863
Kios Torah	560.160.000	-
CV Sedulur Papat Sejahtera	501.950.000	-
PT Pasific Prima Indah	490.985.470	-
PT Sumber Hasil Laut	468.098.500	-
PT Sreeya Sewu Indonesia	459.200.000	-
PT Berkah Rezeki Bahari	457.480.000	-
PT Terra Makmurindo	403.934.800	-
CV Ilfa Raya	379.271.001	-
Saldo dipindahkan	30.864.119.908	20.450.735.361

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

17. UTANG USAHA (lanjutan)

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo pindahan	30.864.119.908	20.450.735.361
PT Hoka Karya Mandiri	360.136.494	1.808.861.716
PT Isat Telkom	278.350.000	768.650.000
CV Dwi Putra Perkasa	214.872.500	323.075.000
PT Iti Marine & Oifield Utama	201.454.023	647.923.584
PT Metta Karuna Jaya	19.554.545	745.136.516
PT Selaras Makmur Pangan Jaya	-	453.241.800
Lainnya (di bawah 300 juta)	9.168.579.474	3.873.795.011
Jumlah	41.107.066.944	29.071.418.988

18. PERPAJAKAN

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Pajak Dibayar Dimuka		
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		
PPN Masukan	68.283.788.450	23.095.888.244
Pajak Penghasilan 28a	8.242.956.734	8.242.956.734
Jumlah	76.526.745.184	31.338.844.978
b. Utang Pajak		
<u>Entitas Induk:</u>		
PPH Pasal 21	725.204.533	332.601.302
PPH Pasal 25	197.865.930	-
PPH Pasal 23	5.451.757	74.666.488
PPH Pasal 4 ayat 2	22.795.336	3.923.020
PPH Pasal 29	558.901.025	-
PPN Keluaran	42.579.800.955	-
Pajak Daerah	46.051.405	3.886.701.430
Sub Jumlah	44.136.070.941	4.297.892.240
<u>Entitas Anak:</u>		
PPH Pasal 29	774.986	63.008
Sub Jumlah	774.986	63.008
Jumlah	44.136.845.927	4.297.955.248

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban (Manfaat) Pajak :

	2022	2021
Beban Pajak Kini:		
Entitas Induk	8.039.821.460	-
Entitas Anak	60.428.280	57.600.287
Sub Jumlah	8.100.249.740	57.600.287
Manfaat Pajak Tangguhan		
Entitas Induk	(396.638.562)	(926.570.099)
Entitas Anak	(8.157.904)	-
Sub Jumlah	(404.796.466)	(926.570.099)
Jumlah	7.695.453.274	(868.969.812)

d. Rekonsiliasi Fiskal

	2022	2021
Laba Sebelum Pajak - Entitas Induk	33.568.339.426	4.253.096.457
Absorb (Laba) Rugi Anak Perusahaan	(245.405.494)	(273.684.385)
Laba Sebelum Koreksi Fiskal	33.322.933.932	3.979.412.072
Koreksi Fiskal:		
<u>Perbedaan Temporer:</u>		
Beban Manfaat Karyawan	(1.048.106.689)	826.267.639
Beban Penyisihan Piutang	1.770.655.200	1.623.131.411
Beban Penyusutan Aset Tetap	1.863.005.460	1.590.116.624
Jumlah	2.585.553.971	4.039.515.673
<u>Perbedaan Permanen:</u>		
Sumbangan Duka	62.521.100	131.205.000
Rumah Tangga	520.309.455	353.374.054
Entertainment	525.574.410	252.275.145
Promosi Lainnya	205.399.500	184.533.952
Denda/Klaim	64.622.481	-
Beban Telekomunikasi	345.433.065	539.860.351
Beban Rapat Dinas	167.919.040	404.541.776
Beban Non Usaha Lainnya	1.831.798.056	-
Pendapatan Luar Usaha Lain-lain	(2.940.791.000)	(13.790.912.798)
Pendapatan Jasa Giro dan Deposito	(146.631.713)	(225.147.104)
Jumlah	636.154.394	(12.150.269.624)
Laba (Rugi) Fiskal	36.544.642.298	(4.131.341.879)

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rekonsiliasi Fiskal (lanjutan)

	2022	2021
Laba (Rugi) Fiskal - Pembulatan	36.544.643.000	-
Taksiran pajak penghasilan	8.039.821.460	-
Kredit Pajak:		
Pajak Penghasilan Pasal 22	4.179.741.515	2.780.963.821
Pajak Penghasilan Pasal 23	2.113.983.340	2.653.335.124
Pajak Penghasilan Pasal 25	1.187.195.580	1.962.221.182
Kurang (Lebih) Bayar Pajak	558.901.025	(7.396.520.127)

Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab III, pasal 17 ayat (2), bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebelumnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020, antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022.

e. Pajak Tangguhan

	2022			
	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif	Saldo Akhir
Penyisihan Piutang	586.276.262	379.391.505	-	965.667.767
Penyusutan	1.020.009.969	409.861.201	-	1.429.871.170
Imbalan Kerja	1.319.007.959	(384.456.240)	(565.433.504)	369.118.215
Jumlah	2.925.294.190	404.796.466	(565.433.504)	2.764.657.152
	2021			
	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif	Saldo Akhir
Penyisihan Piutang	192.566.264	393.709.998	-	586.276.262
Penyusutan	668.928.749	351.081.220	-	1.020.009.969
Imbalan Kerja	1.269.663.219	181.778.881	(132.434.141)	1.319.007.959
Jumlah	2.131.158.232	926.570.099	(132.434.141)	2.925.294.190

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

19. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Usaha Jasa Pelayanan Kapal Lainnya	10.066.542.236	38.218.147.155
Usaha Permakaman	1.804.380.450	16.459.083.329
Usaha Jasa	8.318.984.375	5.405.131.353
Umum dan Administrasi	7.547.250.987	4.817.707.138
Pembelian Persediaan	1.143.609.664	-
Usaha Non Jasa Pelayanan Kapal	448.447.811	-
Jumlah	29.329.215.523	64.900.068.975

Pada tahun 2021 Perusahaan menerima Surat Nomor 11.19/04/S-B/010/2021 mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2020, yang menimbulkan kewajiban pada PT Pelita Indonesia Djaya sebesar Rp3.431.046.779 atas pembayaran upah dan THR petugas kebersihan lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam perjanjian Nomor TH.03.04-02/SS/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Pekerjaan Jasa Pelayanan Kebersihan (*Cleaning Services*) di Kapal Penumpang PT Peln (Persero). Kemudian atas pembayaran upah, THR dan cuti petugas kasur di atas kapal lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam Perjanjian Nomor TH.1.22-03/SS/2020 Tanggal 22 Januari 2020 tentang Pekerjaan Jasa Pengelolaan Kasur untuk Kapal Penumpang PT Peln (Persero) sebesar Rp488.012.718. Perusahaan telah membayarkan secara bertahap atas selisih kurang bayar upah, THR dan cuti sebesar Rp1.240.907.544.

Kemudian upah, THR, cuti dan asuransi petugas hiburan diatas kapal lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam Perjanjian Nomor 02.06-05/SS/2020 Tanggal 06 Februari 2020 tentang Pekerjaan Jasa Pengelolaan Hiburan di Kapal Penumpang PT Peln (Persero) sebesar Rp528.281.174 serta PT PID segera menyetorkan iuran asuransi yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak ke PT Peln (Persero) yang terdiri dari Asuransi Kesehatan sebesar Rp425.036.814 dan Asuransi Ketenagakerjaan sebesar Rp253.554.996.

20. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Utang Lain-lain	13.251.347.091	1.890.878.394
b. Liabilitas Kontrak	1.353.275.726	358.314.574
Jumlah	14.604.622.816	2.249.192.968

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

20. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA (lanjutan)

a. Utang Lain-lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Biaya Pegawai	9.115.318.556	846.683.204
BPJS Ketenagakerjaan	775.952.310	12.435.781
Uang Titipan	724.672.920	662.385.162
Lainnya	2.635.403.305	369.374.247
Jumlah	13.251.347.091	1.890.878.394

b. Liabilitas Kontrak

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Usaha Jasa Pelayanan Kapal	250.163.638	261.949.831
Usaha Non Jasa Pelayanan Kapal	829.917.341	-
Lainnya	273.194.746	96.364.743
Jumlah	1.353.275.726	358.314.574

Utang lain-lain biaya pegawai merupakan kewajiban biaya gaji dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK R.I. atas kegiatan yang berhubungan dengan PSO tahun 2020.

Utang lain-lain lainnya merupakan kewajiban atas biaya seragam pegawai produksi dan kegiatan operasional kantor.

21. LIABILITAS JANGKA PANJANG

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Sewa Pembiayaan	13.888.131.800	4.940.312.084
Liabilitas Sewa Hak Guna	-	579.059.091
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	13.888.131.800	5.519.371.175
Bagian Lancar Jatuh Tempo 1 Tahun :		
- Sewa Pembiayaan	5.519.000.800	1.101.752.859
- Liabilitas Sewa Hak Guna	-	101.678.500
Jumlah	5.519.000.800	1.203.431.359
Bagian Jatuh Tempo Lebih dari 1 Tahun	8.369.131.000	4.315.939.817

Utang sewa pembiayaan merupakan kewajiban yang timbul akibat pembelian kendaraan untuk operasional maupun yang akan disewakan dengan cara angsuran atau sewa pembiayaan. (lihat catatan 12).

Liabilitas sewa hak guna merupakan perjanjian sewa Grup yang terdiri dari sewa gedung dan alat angkut yang memiliki jangka waktu sewa lebih dari 1 tahun.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

22. UTANG PIHAK BERELASI

Saldo utang kepada PT PELNI (Persero) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.113.426.587 dan Rp1.907.280.187.

Utang kepada PT PELNI (Persero) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tersebut terkait dengan pembayaran iuran kesehatan YKPP, iuran dana pensiun dan iuran BPJS Kesehatan yang diberikan kepada karyawan PT PELNI (Persero) yang diperbantukan.

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawannya sesuai dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No.11/2020. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja yang dihitung oleh aktuaris independen sesuai laporannya No. 2120/PSAK-TBA.AN/III-2023, tanggal 28 Februari 2023 dan No. 1336/PSAK-TBA.AN/I-2022, tanggal 11 Januari 2022. Perhitungan aktuarial menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah karyawan (orang)	69	69
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun
Tingkat Kematian	TMI - III (2019) Avg.	TMI - III (2019) Avg.
Tingkat Cacat	0,02% dari TMI IV (2019)	0,02% dari TMI IV (2019)
Tingkat Bunga Aktuarial	7,23% IGSYC	7,08% IGSYC
Tingkat Kenaikan Gaji	5,00% per tahun	5,00% per tahun
Tingkat Pengunduran Diri:		
◦ Usia 18-30 Tahun	5% per tahun	5% per tahun
◦ Usia 31-40 Tahun	4% per tahun	4% per tahun
◦ Usia 41-44 Tahun	3% per tahun	3% per tahun
◦ Usia 45 - 52 Tahun	1% per tahun	1% per tahun
◦ Usia 53 - 55 Tahun	0% per tahun	0% per tahun

Beban (pendapatan) yang diakui dalam laba rugi sebagai berikut:

	2022	2021
Biaya Jasa Kini	237.753.199	473.625.464
Biaya Bunga	374.940.504	352.642.175
Biaya Jasa Lalu -Vested	(531.984.299)	-
Perubahan Program Manfaat (dari UU No. 13 ke UU Cipta Kerja)	(1.117.307.341)	-
Jumlah	(1.036.597.937)	826.267.639

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebagai berikut:

	2022	2021
Nilai Kini Kewajiban Pada Awal Periode	5.296.069.050	5.771.196.449
Biaya Bunga	374.940.504	352.642.175
Biaya Jasa Kini	237.753.199	473.625.464
Pembayaran Manfaat	(11.508.752)	(699.421.671)
Biaya Jasa Lalu - Vested (dampak IFRICH)	(531.984.299)	-
Perubahan Program Manfaat (dari UU No. 13 ke UU Cipta Kerja) (Keuntungan)/Kerugian Aktuarial	(1.117.307.341)	-
	(2.570.152.293)	(601.973.367)
Nilai Kini Kewajiban pada Akhir Periode	1.677.810.068	5.296.069.050

24. MODAL SAHAM

Sesuai dengan Akta No. 7, tanggal 10 Juni 2009, Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto S.H., yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU- 43800.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 4 September 2009, rincian pemegang saham dan persentase kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh (Lembar)	Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Nilai Saham
PT Pelni (Persero)	2.000	99,50%	2.000.000.000
YKPP	10	0,50%	10.000.000
Jumlah	2.010	100,00%	2.010.000.000

25. SALDO LABA

	2022	2021
a. Ditentukan Penggunaannya :		
Saldo awal	154.442.902.454	131.974.755.011
Penambahan Cadangan Umum	3.217.405.889	22.468.147.443
Jumlah	157.660.308.343	154.442.902.454
b. Belum Ditentukan Penggunaannya :		
Saldo awal	3.217.405.889	20.525.452.883
Cadangan umum	(3.217.405.889)	(22.468.147.443)
Laba tahun berjalan	25.925.156.528	5.160.100.449
Jumlah	25.925.156.528	3.217.405.889

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

25. SALDO LABA (lanjutan)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya, No. 14, tanggal 27 Mei 2022, dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih SH., bahwa laba bersih PT Pelita Indonesia Djaya tahun buku 2021 sebesar Rp3.217.405.889 digunakan sepenuhnya untuk Dana Cadangan PT Pelita Indonesia Djaya.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum tentang Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya, No. 4, tanggal 15 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih SH., dan Surat Direksi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelita Indonesia Djaya, No. 11.30/04/S-B/090/2021, tanggal 30 Nopember 2021, bahwa laba bersih PT Pelita Indonesia Djaya tahun buku 2020 sebesar Rp22.468.147.443 digunakan sepenuhnya untuk Dana Cadangan PT Pelita Indonesia Djaya.

26. KOMPONEN EKUITAS LAIN

	2022	2021
Saldo Awal	(937.458.100)	(1.406.997.326)
Keuntungan Aktuarial - neto	2.004.718.789	469.539.226
Saldo Akhir	1.067.260.689	(937.458.100)

27. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo awal		
Modal disetor	5.000.000	5.000.000
Bagian laba tahun lalu	121.573.869	115.988.473
Bagian laba tahun berjalan	5.008.275	5.585.396
Jumlah	131.582.144	126.573.869

28. PENDAPATAN USAHA

	2022	2021
Jasa Bahan Permakanan	312.738.275.208	180.812.030.083
Jasa <i>Cleaning Services</i>	46.204.581.556	49.452.451.480
Jasa <i>Maintenance</i>	8.738.753.855	17.656.956.888
Jasa Pelayanan Kapal Lainnya	1.291.112.250	1.045.087.245
Jasa Sistem Komunikasi Kapal	12.745.433.646	24.198.069.521
Jasa Pengamanan	21.666.211.799	20.155.851.405
Saldo dipindahkan	403.384.368.314	293.320.446.622

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

28. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

	2022	2021
Saldo pindahan	403.384.368.314	293.320.446.622
Jasa <i>Frontliner & Manage Service</i>	24.029.267.741	18.686.321.327
Jasa Penyewaan Kendaraan	9.970.770.360	9.204.291.643
Jasa Hiburan Band	1.354.911.362	-
Jasa <i>House Keeping</i>	6.915.928.170	4.633.577.223
Jasa Janitor	3.787.882.814	3.025.628.430
Jasa Wisata Bahari	1.361.236.579	683.277.268,00
Jasa Penyediaan Cover dan Kasur	2.227.504.030	1.231.639.287
Non Jasa Pelayanan Kapal Lainnya	638.927.355	2.801.855.683
Jasa Bongkar Muat	3.755.103.452	3.303.063.549
Wisma Tretes	103.460.950	109.458.800
Jumlah	457.529.361.127	336.999.559.832

29. BEBAN POKOK USAHA

	2022	2021
Bahan Permakanan	253.732.506.331	159.883.099.914
<i>Cleaning Services</i> Kapal dan Gedung	42.710.600.543	40.067.837.094
<i>Frontliner & Manage Service</i>	23.975.429.669	24.453.153.364
Pengamanan/Denkawal	20.843.915.556	20.588.040.131
Sistem Komunikasi Kapal	7.484.043.652	21.595.947.452
<i>Maintenance</i>	6.923.187.808	15.439.985.437
<i>House Keeping</i>	6.259.686.731	5.572.612.656
Beban Penyusutan (catatan 12)	5.889.308.012	4.219.053.542
Janitor	3.148.298.002	2.709.450.629
Penyewaan Kendaraan	2.070.391.689	1.148.973.238
Penyediaan <i>Cover dan Kasur</i>	1.849.124.813	802.504.848
Non Jasa Pelayanan Kapal Lainnya	1.678.136.299	1.990.665.800
Wisata Bahari	1.555.774.866	966.447.706
Hiburan Band	861.747.425	449.272.485
Bongkar Muat	125.479.840	1.390.959.027
<i>Outsourcing</i> Lainnya	112.868.869	978.872.375
Beban Amortisasi (catatan 13)	49.694.649	48.279.865
Wisma Tretes	87.444.000	99.651.983
Usaha Sampingan Lainnya	300.593.976	204.784.401
Jumlah	379.658.232.730	302.609.591.947

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2022	2021
Gaji, Tunjangan dan Lembur	29.344.702.936	31.255.644.047
Penyusutan dan amortisasi (catatan 12 & 13)	2.639.193.810	3.194.691.422
Jamuan dan Sumbangan	652.438.010	385.755.145
Konsultan	1.231.790.096	1.911.770.350
Administrasi Kantor	416.650.970	2.148.252.993
Pemeliharaan	688.723.414	3.403.410.216
Pemasaran	324.756.759	430.494.068
Air, Listrik dan Telekomunikasi	875.182.676	859.362.803
Sewa	1.446.870.026	326.407.818
Pajak	926.595.832	-
Asuransi	1.536.970.551	-
Software/Piranti Lunak	643.238.081	-
Rumah Tangga	645.911.355	-
Pakaian Kerja	135.459.200	-
Kesehatan	957.125.706	-
Jamsostek	1.548.064.996	-
Perjalanan Dinas	403.208.204	-
Pengiriman	234.943.174	-
BBM	350.648.868	-
Perlengkapan Kantor	455.401.881	-
Rapat	242.257.540	-
Kepedulian Lingkungan	167.465.505	112.340.737
Perayaan	599.805.767	25.000.000
Lainnya	91.538.938	83.229.747
Jumlah	46.558.944.295	44.136.359.346

31. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA

	2022	2021
Pendapatan Non Usaha:		
Kenaikan Nilai Wajar		
Properti Investasi (catatan 11)	2.899.166.000	14.089.614.710
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	1.357.229.695	1.640.737.235
Pendapatan Jasa Giro	221.714.705	292.180.598
Pendapatan Bunga Deposito	1.107.890	1.426.152
Lainnya	1.998.179.624	319.240.341
Sub Jumlah - dipindahkan	6.477.397.914	16.343.199.036

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

31. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA (lanjutan)

	2022	2021
Sub Jumlah - pindahan	6.477.397.914	16.343.199.036
Beban Non Usaha:		
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang	1.807.736.583	1.623.131.411
Beban Bunga	591.650.075	382.732.965
Beban Administrasi Bank	179.575.390	294.227.167
Lainnya	1.585.001.891	-
Sub Jumlah	4.163.963.939	2.300.091.543
Jumlah Pendapatan Non Usaha, Bersih	2.313.433.975	14.043.107.493

Pendapatan non usaha lainnya tahun 2022, termasuk keuntungan perubahan perhitungan program manfaat dari UU No. 13 ke UU Cipta Kerja sebesar Rp1.048.106.689.

Beban non usaha lainnya tahun 2022, termasuk pengakuan kelebihan estimasi pendapatan CS Kapal tahun 2021 sebesar Rp896.290.584.

32. INFORMASI SEGMENT USAHA

Operasi Yang Dilanjutkan	2022			
	Pendapatan Usaha	Beban Pokok Usaha	Beban Umum dan Administrasi	Laba (Rugi) Usaha
Usaha Permakanan	312.738.275.209	253.731.514.331	38.421.401.670	20.585.359.208
Usaha CS Kapal & Gedung	46.204.581.556	43.026.342.710	1.003.676.623	2.174.562.223
Usaha Jasa ITSM	12.790.508.396	7.597.226.301	2.354.210.929	2.839.071.166
Usaha Pengawasan dan Pengamanan	21.666.211.799	20.975.208.446	463.128.389	227.874.964
Usaha Front Liner & Manager Service	24.124.547.213	23.953.720.756	114.492.326	56.334.130
Jasa Maintenance	8.784.320.355	6.923.187.808	120.917.782	1.740.214.764
Usaha Kendaraan Dinas	9.970.770.360	7.518.363.134	517.205.424	1.935.201.801
Usaha Jasa House Keeping	6.915.928.170	6.259.686.731	439.830.052	216.411.387
Usaha Janitor	3.787.882.814	3.151.582.894	426.464.728	209.835.192
Usaha Sampingan Lainnya	3.971.622.914	2.430.380.261	1.032.980.844	508.261.809
Usaha Kapal Pinisi	1.361.236.579	1.555.774.866	(130.384.611)	(64.153.676)
Usaha Tretes	103.460.950	104.923.000	(979.904)	(482.146)
Usaha Jasa Hiburand Band	1.354.911.362	861.747.425	330.531.276	162.632.662
Usaha Anak PT.PBN	3.755.103.452	1.568.574.066	1.465.468.767	721.060.619
TOTAL	457.529.361.127	379.658.232.730	46.558.944.295	31.312.184.102

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

32. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Operasi Yang Dilanjutkan	2021			
	Pendapatan Usaha	Beban Pokok Usaha	Beban Umum dan Administrasi	Laba (Rugi) Usaha
Usaha Permakanan	180.812.030.083	159.883.099.914	24.307.269.869	(3.378.339.700)
Usaha CS Kapal & Gedung	49.452.451.480	40.067.837.094	6.714.901.935	2.669.712.451
Usaha Jasa ITSM	24.198.069.521	21.644.227.317	2.199.763.927	354.078.277
Usaha Pengawalan dan Pengamanan	20.155.851.405	20.588.040.131	2.736.862.613	(3.169.051.339)
Usaha Front Liner & Manager Service	18.686.321.327	24.453.153.364	2.537.322.448	(8.304.154.485)
Jasa Maintenance	17.656.956.888	15.439.985.437	2.216.940.522	30.929
Usaha Kendaraan Dinas	9.204.291.643	5.366.233.780	1.249.804.892	2.588.252.971
Usaha Jasa House Keeping	4.633.577.223	5.572.612.656	629.170.359	(1.568.205.792)
Usaha Janitor	3.025.628.430	2.709.450.629	410.835.006	(94.657.205)
Pendapatan Non Jasa Pel. Kapal Lainnya	2.801.855.683	1.990.665.800	380.450.020	430.739.863
Usaha Sampingan Lainnya	2.276.726.532	1.986.161.623	196.889.536	93.675.373
Usaha Kapal Pinisi	683.277.268	966.447.706	92.778.815	(375.949.253)
Usaha Tretes	109.458.800	101.444.983	14.862.865	(6.849.048)
Usaha Jasa Hiburand Band	-	449.272.485	-	(449.272.485)
Usaha Anak PT.PBN	3.303.063.549	1.390.959.027	448.506.538	1.463.597.984
TOTAL	336.999.559.832	302.609.591.947	44.136.359.345	(9.746.391.460)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK RERELASI

a. Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak - pihak berelasi:

No.	Pihak-Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi	Transaksi
1)	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Entitas Induk	Utang piutang, pendapatan dan beban
2)	PT Rumah Sakit Pelni	Entitas Asosiasi	Uang muka kerja usaha pemasangan aplikasi rental mobil dan jasa antar jemput pasien
3)	PT Pelita Bandar Nasional	Entitas Anak	Penyertaan, utang-piutang
4)	PT PBM Sarana Bandar Nasional	Entitas Dalam 1 Grup	Sewa Mobil
5)	PT Sarana Bandar Logistik	Entitas Dalam 1 Grup	Sewa Mobil
6)	PT Sarana Bandar Indotrading	Entitas Dalam 1 Grup	Sewa Mobil

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

34. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Berikut ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan:

	31 Desember 2022	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan:		
Kas dan Setara Kas	22.792.560.464	22.792.560.464
Piutang Usaha	59.237.371.656	59.237.371.656
Aset Keuangan Lancar Lainnya	3.459.008.397	3.459.008.397
Jumlah	85.488.940.517	85.488.940.517
Liabilitas Keuangan:		
Utang Usaha	41.107.066.944	41.107.066.944
Utang Pihak Berelasi	2.113.426.587	2.113.426.587
Liabilitas Kontrak Sewa Jangka Panjang	8.369.131.000	8.369.131.000
Bagian lancar dari Liabilitas Jangka Panjang	5.519.000.800	5.519.000.800
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	14.604.622.816	14.604.622.816
Jumlah	71.713.248.147	71.713.248.147
	31 Desember 2021	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan:		
Kas dan Setara Kas	33.949.640.758	33.949.640.758
Piutang Usaha	70.908.316.378	70.908.316.378
Aset Keuangan Lancar Lainnya	19.452.439.907	19.452.439.907
Jumlah	137.262.922.532	137.262.922.532
Liabilitas Keuangan:		
Utang Usaha	29.071.418.988	29.071.418.988
Utang Pihak Berelasi	1.907.280.187	1.907.280.187
Liabilitas Kontrak Sewa Jangka Panjang	4.315.939.817	4.315.939.817
Bagian lancar dari Liabilitas Jangka Panjang	1.203.431.359	1.203.431.359
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	2.249.192.969	2.249.192.969
Jumlah	103.647.332.294	103.647.332.294

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

35. CAPAIAN KINERJA DAN RASIO KEUANGAN PENTING - TIDAK DIAUDIT

Keterangan 1	2022 2	2021 3	Deviasi (%) 4 = (2 - 3) / 3
Kas dan Setara Kas (KS)	22.792.560.464	33.949.640.758	-32,86%
Piutang Usaha (PU)	59.237.371.656	70.908.316.378	-16,46%
Persediaan	9.880.441.615	4.855.617.377	103,48%
Aset Lancar (AL)	256.230.707.200	220.343.635.018	16,29%
Penyusutan dan Amortisasi (PA)	8.528.501.823	7.413.744.965	15,04%
Jumlah Aset (JA)	333.651.427.369	284.838.251.139	17,14%
Liabilitas Jk Pendek (KL)	134.696.752.010	114.459.537.973	17,68%
Liabilitas Jk Panjang (KJP)	12.160.367.655	11.519.289.054	5,57%
Jumlah Liabilitas (JK)	146.857.119.665	125.978.827.026	16,57%
Modal Kerja Bersih (MKB)=(AL-KL)	121.533.955.190	105.884.097.045	14,78%
Akumulasi Saldo Laba (RE)	183.585.464.871	157.660.308.343	16,44%
Ekuitas (EK)	186.794.307.704	158.859.424.112	17,58%
Labanya Berjalan (LRB)	25.930.164.803	5.165.685.845	401,97%
Modal Sendiri (MS) = (EK - LRB)	160.864.142.902	153.693.738.267	4,67%
Pajak Penghasilan (PJ)	8.100.249.740	57.600.287	13962,86%
Jumlah Pendapatan Usaha (JPU)	457.529.361.127	336.999.559.832	35,77%
Labanya Kotor (LK)	77.871.128.397	34.389.967.885	126,44%
Bunga (BU)	591.650.075	382.732.965	54,59%
EBIT=(LRB+BU+PJ)	34.622.064.618	5.606.019.097	517,59%
EBITDA=(EBIT+PA)	43.150.566.441	13.019.764.062	231,42%

Keterangan 1	2022 2	2021 3	Deviasi (%) 4 = (2 - 3) / 3
Rasio Likuiditas			
Rasio Lancar (AL/KL), %	190,23	95,85	98,46%
Rasio Cepat (KS+PU)/KL, %	60,90	91,61	-33,52%
Rasio Kas (KS/KL), %	16,92	29,66	-42,95%
Rasio Leverage			
Rasio Liabilitas atas Aset (JK/JA), %	44,02	44,23	-0,48%
Rasio Liabilitas atas Ekuitas (JK/EK), %	78,62	79,30	-0,86%
Rasio Liabilitas Jk.Panjang thd Ekuitas (KJP/EK),%	72,11	72,05	0,08%

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

35. CAPAIAN KINERJA DAN RASIO KEUANGAN PENTING - TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

Keterangan 1	2022 2	2021 3	Deviasi (%) 4 = (2 - 3) / 3
Rasio Aktivitas			
Rasio Perputaran Persediaan (JPU/SD), Kali	4,631	6,940	-33,28%
Rasio Perputaran Aset (PU/JA), Kali	18	25	-28,68%
Rasio Penagihan Rata ² (PU/JPU x 365), Hari	47	77	-38,47%
Rasio Profitabilitas			
Rasio Imbalan Ekuitas (LRB/MS), %	16,12	3,36	379,59
Rasio Imbalan Investasi (EBIT+PA)/JA, %	12,93	4,57	182,94
Rasio Marjin Laba Kotor atas Penjl. (LK/JPU),%	17,02	10,20	66,78
Rasio Marjin Laba atas Penjl. (LRB/JPU),%	5,67	1,53	269,73
Rasio EBITDA atas Penjualan, %	9,43	3,86	144,11
Rasio Z-Score Model			
Z-Score Model			
$Z = (6,56 \times MKB)/JA + (3,26 \times RE)/JA + (6,72 \times EBIT)/JA + (1,05 \times EK)/JK$	7,14	5,90	25,50

- Jika hasilnya $Z < 1,1$ mengindikasikan kelangsungan usaha dalam prediksi Pailit.
- Jika hasilnya $1,1 > Z < 2,6$ mengindikasikan kelangsungan usaha dalam prediksi *Gray Area*.
- Jika hasilnya $Z > 2,6$ mengindikasikan kelangsungan usaha dalam prediksi Tidak Pailit.

1) Rasio Likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya secara umum mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2021. Hal ini tercermin dari rasio cepat mengalami penurunan 33,52% dari semula 91,61% menjadi 60,90% dan rasio kas mengalami penurunan 42,95% dari semula 29,66% menjadi 16,92%, meskipun rasio lancar meningkat 98,46% dari semula 95,85% menjadi 190,23%.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

35. CAPAIAN KINERJA DAN RASIO KEUANGAN PENTING - TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

- 1) Rasio Likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. (lanjutan)

Penurunan rasio likuiditas tahun 2022 dipengaruhi oleh penurunan kas dan setara kas 32,86% dari semula Rp33.949.640.758 menjadi Rp22.792.560.464, penurunan piutang usaha 16,46% dari semula Rp70.908.316.378 menjadi Rp59.237.371.656 dan peningkatan liabilitas jangka pendek 17,68% dari semula Rp114.459.537.973 menjadi Rp134.696.752.010, meskipun aset lancar mengalami peningkatan 16,29% dari semula Rp220.343.635.018 menjadi Rp256.230.707.200.

- 2) Rasio Leverage adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya apabila saat ini perusahaan dilikuidasi.

Tingkat kemampuan Perusahaan tahun 2022 dalam memenuhi seluruh kewajibannya apabila dilakukan likuidasi pada saat ini secara umum mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Hal ini tercermin dari hasil perhitungan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset mengalami penurunan 0,48% dari semula 44,23% menjadi 44,02%, rasio jumlah liabilitas terhadap ekuitas mengalami penurunan 0,86% dari semula 79,30% menjadi 78,62% meskipun rasio jumlah liabilitas jangka panjang terhadap jumlah ekuitas meningkat 0,08 dari semula 72,05% menjadi 72,11%.

Peningkatan tingkat kemampuan Perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah aset 17,14% dari Rp284.838.251.139 menjadi Rp333.651.427.369 dan jumlah ekuitas meningkat 17,58% dari Rp158.859.424.112 menjadi Rp186.794.307.704 dan diikuti pula dengan peningkatan jumlah liabilitas sebesar 16,57% dari Rp125.978.827.026 menjadi Rp146.857.119.665 yang dipengaruhi peningkatan liabilitas jangka pendek 17,68% dari Rp114.459.537.973 menjadi Rp134.696.752.010 dan liabilitas jangka panjang meningkat 5,57% dari semula Rp11.519.289.054 menjadi Rp12.160.367.655.

- 3) Rasio Aktivitas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada pengendaliannya.

Tingkat efektivitas perusahaan tahun 2022 cenderung kurang efektif dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada, hal ini tercermin dari perputaran persediaan turun 33,28% dari semula 6,940 kali menjadi 4,631 kali dan perputaran aset turun 28,68% dari semula 25 kali menjadi 18 kali, meskipun rasio penagihan rata-rata piutang meningkat dari 77 hari menjadi 47 hari.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan persediaan 103,48% dari semula Rp4.855.617.377 menjadi Rp9.880.441.615, jumlah aset meningkat 17,14% dari Rp284.838.251.139 menjadi Rp333.651.427.369 dan penurunan piutang usaha 16,46% dari semula Rp70.908.316.378 menjadi Rp59.237.371.656, namun diikuti peningkatan pendapatan usaha 35,77% dari semula Rp336.999.967.885 menjadi Rp457.529.361.127.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

35. CAPAIAN KINERJA DAN RASIO KEUANGAN PENTING - TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

- 4) Rasio Profitabilitas atau rasio kemampuan laba perusahaan adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan.

Pada tahun 2022, tingkat efektivitas penggunaan sumber daya mengalami peningkatan, hal ini tercermin dari hasil imbalan (*return*) terhadap ekuitas meningkat 379,59% dari semula 3,36% menjadi 16,12%, rasio imbalan terhadap investasi meningkat 182,94% dari semula 4,57% menjadi 12,93%, margin laba kotor meningkat 66,78% dari semula 10,20% menjadi 17,02%, margin laba bersih atas penjualan meningkat 269,73% dari semula 1,53% menjadi 5,67%, dan rasio EBITDA terhadap Penjualan mengalami peningkatan 144,11% dari semula 3,86% menjadi 9,43%.

Peningkatan tingkat efektivitas penggunaan sumber daya pada tahun 2022 dipengaruhi peningkatan laba tahun berjalan 401,97% dari semula Rp5.165.685.845 menjadi Rp25.930.164.803, EBITDA meningkat 231,42% dari semula Rp13.019.764.062 menjadi Rp43.150.566.441 dan pendapatan usaha meningkat 35,77% dari semua Rp336.999.559.832 menjadi Rp457.529.361.127, meskipun beban usaha mengalami peningkatan 25,46% dari Rp302.609.591.947 menjadi Rp379.658.232.730 dan beban umum dan administrasi meningkat sebesar 5,49% dari semula Rp44.136.359.346 menjadi Rp46.558.944.295.

- 5) Rasio Z Score

Dari hasil perhitungan Z-score model tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 7,14 dan 5,90 maka sesuai hipotesis dengan perolehan angka $Z > 2.6$, bahwa mengindikasikan kelangsungan usaha dalam prediksi Tidak Pailit.

Peningkatan Z Score pada tahun 2022 dipengaruhi oleh peningkatan laba tahun berjalan 402,42% dari Rp5.165.685.845 menjadi Rp25.930.164.803 sehingga mengakibatkan EBIT meningkat 517,59% dari Rp5.606.019.097 menjadi Rp34.622.064.618, modal kerja bersih meningkat 14,78% dari Rp105.884.097.045 menjadi Rp121.533.955.190, saldo laba (*retained earning*) meningkat 16,44% dari Rp157.660.308.343 menjadi Rp183.585.464.871, ekuitas meningkat 17,58% dari Rp158.859.424.112 menjadi Rp186.794.307.704 dan jumlah aset meningkat 17,14% dari Rp284.838.251.139 menjadi Rp333.651.427.369.

36. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tidak terdapat kejadian penting setelah periode pelaporan keuangan yang berdampak material terhadap laporan keuangan PT Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

37. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen PT Pelita Indonesia Djaya bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2023.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN - INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2022
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Des. 2022	31 Des. 2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	18.237.843.683	27.671.628.788
Piutang Usaha	58.592.971.547	70.140.675.411
Setelah dikurangi provisi kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.071.023.332 dan Rp2.300.368.133		
Aset Keuangan Lancar Lainnya	3.440.508.397	19.419.939.907
Persediaan	9.880.441.615	4.855.617.377
Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka	21.990.698.016	13.389.013.530
Aset Kontrak	61.844.852.194	46.968.749.681
Pajak Dibayar Dimuka	76.526.745.184	31.338.844.978
Jumlah Aset Lancar	250.514.060.636	213.784.469.672
ASET TIDAK LANCAR		
Penyertaan Pada Entitas Asosiasi	6.447.525.034	6.202.119.540
Properti Investasi	19.941.529.615	17.042.363.615
Aset Tetap	52.132.080.858	41.072.434.289
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp29.650.743.364 dan Rp25.120.881.790		
Aset Takberwujud, bersih	2.005.878.621	2.509.700.114
Aset Hak Guna, bersih	-	670.002.417
Aset Pajak Tangguhan	2.736.933.141	2.905.728.083
Jumlah Aset Tidak Lancar	83.263.947.268	70.402.348.058
JUMLAH ASET	333.778.007.904	284.186.817.730

INFORMASI TAMBAHAN

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN - INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2022
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2021)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Des. 2022	31 Des. 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Pinjaman Jangka Pendek	-	12.737.470.435
Utang Usaha	41.107.066.944	29.071.418.988
Utang Pajak	44.136.070.941	4.297.892.240
Beban Akrua	29.233.322.381	64.745.155.579
Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang		
- Sewa Pembiayaan	5.519.000.800	1.101.752.859
- Liabilitas Kontrak Sewa	-	101.678.500
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	14.259.453.625	1.931.725.707
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	134.254.914.691	113.987.094.308
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang Pihak Berelasi	2.813.426.585	1.854.864.312
Liabilitas Jangka Panjang Setelah dikurangi:		
- Sewa Pembiayaan	8.369.131.000	3.838.559.225
- Liabilitas Kontrak Sewa	-	477.380.592
Liabilitas Imbalan Kerja	1.677.810.068	5.296.069.050
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	12.860.367.653	11.466.873.179
JUMLAH LIABILITAS	147.115.282.344	125.453.967.487
EKUITAS		
Modal Saham	2.010.000.000	2.010.000.000
Modal dasar sebanyak 2.010 saham ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal Desember 2022 dan 2021.		
Cadangan Umum	157.660.308.343	154.442.902.453
Saldo Laba	25.925.156.528	3.217.405.889
Komponen Ekuitas Lainnya	1.067.260.689	(937.458.099)
JUMLAH EKUITAS	186.662.725.560	158.732.850.243
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	333.778.007.904	284.186.817.730

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - INDUK SAJA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2022	2021
Pendapatan Usaha	453.774.257.675	333.696.496.283
Beban Usaha	(378.089.658.664)	(301.218.632.920)
LABA KOTOR	75.684.599.011	32.477.863.363
Beban Administrasi dan Umum	(44.638.562.555)	(42.474.329.138)
LABA USAHA	31.046.036.456	(9.996.465.775)
Pendapatan (Beban) Non Usaha	2.522.302.970	14.249.562.232
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	33.568.339.426	4.253.096.457
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan:		
Kini	(8.039.821.460)	-
Tangguhan	396.638.562	907.003.992
Jumlah	(7.643.182.898)	907.003.992
LABA TAHUN BERJALAN	25.925.156.528	5.160.100.449
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja :		
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	2.570.152.293	601.973.367
Efek pajak keuntungan (kerugian) Terkait	(565.433.504)	(132.434.141)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	2.004.718.789	469.539.226
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	27.929.875.316	5.629.639.676
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	13.895.460,36	2.567.214,15

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN ARUS KAS - INDUK SAJA
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021)
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	462.626.635.337	372.436.478.451
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(422.151.407.524)	(278.352.180.518)
Pembayaran Operasional	(10.509.602.895)	(31.212.217.619)
Pengeluaran Lain-lain	(8.013.503.325)	(32.258.798.358)
Pembayaran Pajak	(13.389.542.964)	(20.072.092.999)
Penerimaan Lain-lain	146.631.713	225.147.104
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	8.709.210.342	10.766.336.062
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan Aset Tetap	(15.802.285.637)	(1.168.710.057)
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	2.028.000.000	-
Penambahan Aset Tak Berwujud	-	(1.597.799.936)
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(13.774.285.637)	(2.766.509.993)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Pinjaman Bank	8.947.819.716	29.200.000.000
Pembayaran Utang Bank	(13.316.529.526)	(20.658.326.908)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dan (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(4.368.709.810)	8.541.673.092
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(9.433.785.105)	16.541.499.161
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	27.671.628.788	11.130.129.627
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR	18.237.843.683	27.671.628.788

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - INDUK SAJA
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020)
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal		Laba (Rugi)		Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah Ekuitas
	Ditempatkan dan Disetor Penuh	Dicadangkan	Belum Dicadangkan	Dicadangkan		
Saldo per 31 Desember 2020	2.010.000.000	131.974.755.011	20.525.452.882	(1.406.997.326)	(1.406.997.326)	153.103.210.567
Cadangan Umum	-	22.468.147.442	(22.468.147.442)	-	-	-
Laba Tahun Berjalan	-	-	5.160.100.449	-	-	5.160.100.449
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	-	-	-	469.539.226	469.539.226	469.539.226
Saldo per 31 Desember 2021	2.010.000.000	154.442.902.453	3.217.405.889	(937.458.100)	(937.458.100)	158.732.850.243
Cadangan Umum	-	3.217.405.889	(3.217.405.889)	-	-	-
Laba Tahun Berjalan	-	-	25.925.156.528	-	-	25.925.156.528
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	-	-	-	2.004.718.789	2.004.718.789	2.004.718.789
Saldo per 31 Desember 2022	2.010.000.000	157.660.308.343	25.925.156.528	1.067.260.689	1.067.260.689	186.662.725.560

